



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM**  
**PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**PEMBIMBING:**

**A. Nelson Aritonang, Ph.D**

**Rosilawati, S.Sos, MPS.Sp**

Oleh:

**Metiara Cahya Ningrum**

**NRP. 2003063**

**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL**  
**BANDUNG**  
**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM  
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN SOSIAL  
Nama Mahasiswa : Metiara Cahya Ningrum  
NRP : 2003063  
Program : Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial  
Program Sarjana Terapan

**Pembimbing:**



(A. Nelson Aritonang, Ph.D)



(Rosilawati, S.Sos, MPS.Sp)

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial**

**Program Sarjana Terapan**

**Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung,**



**Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kami, sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan praktikum ini. Laporan praktikum laboratorium yang berjudul “Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial” ini dapat selesai dengan tepat pada waktunya.

Keberhasilan Praktikum Laboratorium ini tentu tidak lepas dari semua doa dan usaha dari berbagai pihak yang terlibat, terutama kedua orang tua praktikan yang telah mendukung dengan sepenuh hati, baik secara moril maupun meteril. Dalam kesempatan ini, praktikan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktikum Laboratorium ini, kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc. selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan arahan dan kelengkapan sarana prasarana dalam kegiatan praktikum;
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah memberikan arahan demi kelancaran praktikum;
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang telah membantu kelancaran kegiatan praktikum;
4. A. Nelson Aritonang, Ph.D dan Rosilawati S.Sos, MPS.Sp selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan dukungan sehingga pelaksanaan praktikum laboratorium ini berjalan lancar dan laporan ini dapat diselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya.
5. Rekan-rekan anggota kelompok 11, yang telah bekerja sama dengan baik melakukan kegiatan praktikum; serta
6. Semua pihak yang memberi dukungan dalam kegiatan Praktikum Laboratorium.

Praktikan menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan, saran dan kritik yang sifatnya membangun diharapkan oleh praktikan demi kesempurnaan penyusunan laporan praktikum berikutnya. Akhir kata, praktikan berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat membantu bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik pekerjaan sosial.

Bandung, April 2023

Praktikan

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
I.    Pendahuluan .....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Tujuan dan Manfaat Praktikum.....	1
C.    Waktu dan Lokasi Praktikum.....	3
D.    Proses Praktikum.....	6
E.    Sistematika Laporan .....	20
II.   Praktikum Laboratorium .....	21
A.    Profil Analisis Jaminan Sosial .....	21
B.    Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial .....	46
C.    Profil Pemberdayaan Sosial.....	75
D.    Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial .....	101
E.    Profil Analisis Penanggulangan Bencana .....	122
III.  Kesimpulan dan Rekomendasi .....	142
A.    Kesimpulan.....	142
B.    Rekomendasi .....	143
DAFTAR PUSTAKA .....	145
LAMPIRAN.....	147

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. 1 Jumlah PPKS di Desa Soreang .....	21
Tabel 2.1. 2 Rencana Program Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK .....	36
Tabel 2.1. 3 RAB Program Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK APBD.....	41
Tabel 2.1. 4 Analisis SWOT .....	42
Tabel 2.1. 5 Jadwal dan Langkah-langkah Program Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK APBD .....	43
Tabel 2.2. 1 Rencana Program KPM Disiplin Lapor .....	65
Tabel 2.2. 2 RAB Program KPM Disiplin Lapor .....	70
Tabel 2.2. 3 Kebutuhan Alat Program KPM Disiplin Lapor .....	70
Tabel 2.2. 4 Analisis SWOT Program KPM Disiplin Lapor .....	71
Tabel 2.2. 5 Jadwal Kegiatan Program KPM Disiplin Lapor .....	72
Tabel 2.3. 1 Rencana Kegiatan Program Bank Sampah Beriman 3M.....	91
Tabel 2.3. 2 RAB Program Bank Sampah Beriman 3M .....	95
Tabel 2.3. 3 Alat yang Dibutuhkan .....	96
Tabel 2.3. 4 Analisis SWOT Program Bank Sampah Beriman 3M.....	97
Tabel 2.3. 5 Jadwal dan Langkah-langkah Program Bank Sampah Beriman 3M .....	98
Tabel 2.4. 1 Rencana Program Mas Kelik .....	113
Tabel 2.4. 2 RAB Program Mas Kelik.....	116
Tabel 2.4. 3 Alat-alat dalam Program Mas Kelik .....	117
Tabel 2.4. 4 Analisis SWOT Program Mas Kelik.....	118
Tabel 2.4. 5 Jadwal Kegiatan Program Mas Kelik.....	119
Tabel 2.5. 1 Rencana Program SD Cibiru Tangguh Bencana.....	133
Tabel 2.5. 2 RAB Program SD Cibiru Tangguh Bencana .....	136
Tabel 2.5. 3 Alat-Alat Program SD Cibiru Tangguh Bencana .....	137
Tabel 2.5. 4 Analisis SWOT Program SD Cibiru Tangguh Bencana .....	138
Tabel 2.5. 5 Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan Program SD Cibiru Tangguh Bencana.....	139

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Desa Soreang .....	6
Gambar 1. 2 Pembagian Kelompok Praktikum.....	7
Gambar 1. 3 Pembekalan Sosialisasi Praktikum Laboratorium.....	8
Gambar 1. 4 Bimbingan Pra Lapangan 1 .....	9
Gambar 1. 5 Bimbingan Pra Lapangan 2 .....	9
Gambar 1. 6 Upacara Pelepasan Praktikan .....	10
Gambar 1. 7 Pengantaran Praktikan di Lokasi Praktikum .....	10
Gambar 1. 8 Pembekalan Analis Jaminan Sosial.....	10
Gambar 1. 9 Pengajuan surat izin ke Kantor Desa Soreang .....	11
Gambar 1. 10 Pembukaan Kegiatan Praktikum .....	11
Gambar 1. 11 Wawancara dengan PSM .....	12
Gambar 1. 12 Inisiasi Sosial ke Posyandu Purbasari .....	12
Gambar 1. 13 Wawancara dengan Klien.....	12
Gambar 1. 14 Bimbingan Profil Analis Jaminan Sosial .....	13
Gambar 1. 15 Pembekalan Profil Analis SDBS.....	13
Gambar 1. 16 Wawancara dengan Kader PKK.....	14
Gambar 1. 17 Wawancara dengan Puskesmas.....	14
Gambar 1. 18 Konfirmasi Isu SDBS.....	14
Gambar 1. 19 Wawancara Pendamping PKH Desa Soreang.....	15
Gambar 1. 20 Wawancara dengan KPM PKH RW 10 .....	15
Gambar 1. 21 Wawancara dengan Ketua Kelompok KPM .....	15
Gambar 1. 22 Pembekalan Profil Analis Pemberdayaan Sosial .....	16
Gambar 1. 23 Wawancara dengan Ketua Forum RW .....	16
Gambar 1. 24 Kunjungan ke Bank Sampah Beriman .....	16
Gambar 1. 25 Wawancara dengan Inisiator Bank Sampah.....	17
Gambar 1. 26 Konfirmasi Isu Pemberdayaan Sosial .....	17
Gambar 1. 27 Konfirmasi Isu Penataan Lingkungan Sosial .....	18
Gambar 1. 28 Wawancara tentang Program LCO .....	18
Gambar 1. 29 Pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana.....	18
Gambar 1. 30 Wawancara dengan Kepsek SD Cibiru .....	19
Gambar 1. 31 Konfirmasi Isu Penanggulangan Bencana.....	19
Gambar 2.1. 1 Pohon Masalah Jaminan Sosial .....	30
Gambar 2.2. 1 Pohon Masalah Isu Sumber Dana Bantuan Sosial .....	58
Gambar 2.3. 1 Pohon Masalah Isu Pemberdayaan Sosial.....	86
Gambar 2.4. 1 Pohon Masalah Isu Penataan Lingkungan Sosial.....	107
Gambar 2.5. 1 Pohon Masalah Isu Penanggulangan Bencana.....	128

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1. 1 SURAT IZIN PRAKTIKUM.....	147
LAMPIRAN 1. 2 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 1 .....	148
LAMPIRAN 1. 3 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 2 .....	149
LAMPIRAN 1. 4 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 3 .....	150
LAMPIRAN 1. 5 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 5 .....	151
LAMPIRAN 1. 6 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 4 .....	152
LAMPIRAN 1. 7 UNDANGAN SUPERVISI LEMBAGA.....	153
LAMPIRAN 1. 8 SUPERVISI DOSEN PEMBIMBING.....	154
LAMPIRAN 1. 9 SUPERVISI LEMBAGA.....	154
LAMPIRAN 1. 10 LEMBAR LAPORAN PENGELUARAN PKH.....	155
LAMPIRAN 1. 11 LEMBAR EVALUASI PROFIL 1 .....	156
LAMPIRAN 1. 12 LEMBAR EVALUASI PROFIL 2 .....	157
LAMPIRAN 1. 13 LEMBAR EVALUASI PROFIL 3 .....	158
LAMPIRAN 1. 14 LEMBAR EVALUASI PROFIL 4 .....	159
LAMPIRAN 1. 15 LEMBAR EVALUASI PROFIL 5 .....	160
LAMPIRAN 1. 16 LOKAKARYA .....	161

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV Pekerjaan Sosial dan Program Pascasarjana Spesialis Pekerjaan Sosial. Proses pendidikan di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) *indoor* dan *outdoor*. Kegiatan praktikum menjadi wadah bagi mahasiswa dalam mengasah keterampilan-keterampilan dasar dan keterampilan-keterampilan khusus dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Dengan demikian mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam praktik aras mikro, meso, dan makro, baik dalam bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi sosial. Praktikum Laboratorium disamping dilaksanakan dalam ruangan laboratorium, juga mahasiswa diberikan kesempatan melakukan aktivitas di masyarakat dan/atau organisasi sosial untuk memahami fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai lima profil lulusan, yaitu sebagai Analis Jaminan Sosial, Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analis Pemberdayaan Sosial, Analis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analis Penanggulangan Bencana. Demikian pula dalam praktikum ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial. Kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan organisasi sosial.

### **B. Tujuan dan Manfaat Praktikum**

#### **1. Tujuan Praktikum**

Adapun tujuan dilaksanakannya praktikum laboratorium bagi mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu:

- a. Untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam

kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

- b. Untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
- c. Untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
- e. Untuk mempraktikkan keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
  - 1) Pendekatan Awal
  - 2) Asesmen
  - 3) Perencanaan Intervensi

## **2. Manfaat Praktikum**

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinil orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta Kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
  - 2) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan Teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
  - 3) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial
  - 4) Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial

- 5) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
  - 6) Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
    - a) Pendekatan awal
    - b) Asesmen
    - c) Rencana Intervensi
- b. Bagi Lembaga
- 1) Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
  - 2) Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

## **C. Waktu dan Lokasi Praktikum**

### **1. Waktu Praktikum**

Kegiatan praktikum dilaksanakan mulai dari tanggal 25 Januari sampai dengan 15 April 2023 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Waktu Pelaksanaan Praktikum

No	Rincian Kegiatan	Februari				Maret				April			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	III	IV
1	Pembekalan Praktikum Laboratorium												
2	Pembekalan Materi Analisis Jaminan Sosial												
3	Praktik Analisis Jaminan Sosial												
4	Supervisi												
5	Penyusunan Laporan Analisis Jaminan Sosial												
6	Pembekalan Materi Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial												
7	Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial												
8	Penyusunan Laporan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial												
9	Pembekalan Materi Analisis Pemberdayaan Sosial												
10	Praktik Analisis Pemberdayaan Sosial												
11	Penyusunan Laporan Analisis Pemberdayaan Sosial												

12	Pembekalan Analisis Penata Lingkungan Sosial												
13	Praktik Analisis Penata Lingkungan Sosial												
14	Penyusunan Laporan Analisis Penata Lingkungan Sosial												
15	Pembekalan Materi Analisis Penanggulangan Bencana												
16	Praktik Analisis Penanggulangan Bencana												
17	Penyusunan Laporan Analisis Penanggulangan Bencana												



Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana, dilaksanakan praktik lapangan selama 2 minggu dan 1 hari sebelum turun ke lapangan dilaksanakan pembekalan. Praktikan melaksanakan praktikum laboratorium mulai dari tahap inisiasi sosial, asesmen, sampai dengan tahap penyusunan rencana intervensi.

Adapun rincian proses praktikum dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra lapangan, lapangan, dan pasca lapangan.

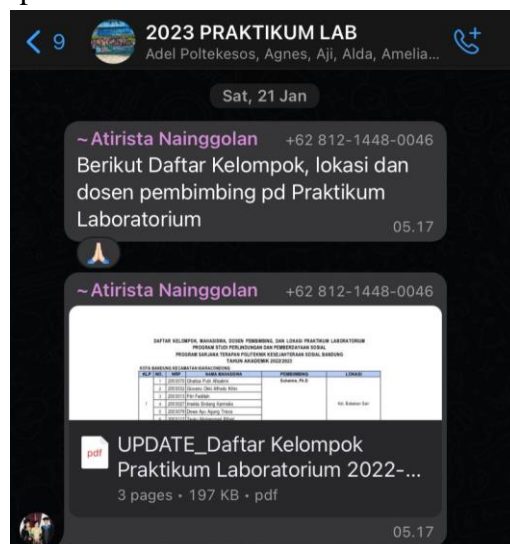
### 1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan dilaksanakan sebelum praktikan turun ke lapangan untuk melaksanakan praktikum laboratorium. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari sampai dengan 7 Februari 2023, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

#### a. Pembentukan Kelompok, Penetapan Lokasi dan Dosen Pembimbing Praktikum

Kegiatan praktikum laboratorium diawali dengan pembentukan kelompok, mahasiswa membentuk kelompok secara mandiri yang terdiri dari 7-8 orang dan dibagi menjadi 12 kelompok. Selanjutnya setiap kelompok ditetapkan lokasi dan dosen pembimbing untuk praktikum laboratorium. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Whatsapp Group Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Angkatan 2020.

Adapun praktikan menjadi anggota kelompok 11 dengan dosen pembimbing yaitu, Bapak Nelson Aritonang, Ph. D dan Ibu Rosilawati, S. Sos, MPS. Sp. Kelompok 11 ditempatkan di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung sebagai lokasi pelaksanaan Praktikum Laboratorium.



Gambar 1. 2 Pembagian Kelompok Praktikum

b. Pembekalan Sosialisasi Pedoman Praktikum Laboratorium

Pembekalan sosialisasi pedoman praktikum laboratorium dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 08.30-11.30 WIB, bertempat di Auditorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Pada kegiatan pembekalan sosialisasi pedoman praktikum laboratorium, mahasiswa diberikan penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, manfaat dilaksanakannya praktikum laboratorium, capaian mahasiswa Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dalam praktikum laboratorium yaitu, profil Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Dalam pembekalan ini disampaikan bahwa mahasiswa akan belajar bagaimana melaksanakan asesmen di masyarakat dan menciptakan program rencana intervensi untuk lima profil Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Sosialisasi ini disampaikan oleh Ibu Lina Favourita Sutiaputri, Ph. D dan Ibu Dra. Atirista Nainggolan, MP.



*Gambar 1. 3 Pembekalan Sosialisasi Praktikum Laboratorium*

c. Bimbingan Pra Lapangan dengan Dosen Pembimbing

Sebelum turun ke lapangan, praktikan mendapat bimbingan dari dosen pembimbing sebanyak tiga kali dimulai pada tanggal 25 Januari 2023 – 3 Februari 2023. Dalam bimbingan tersebut praktikan mendapat tugas untuk membuat booklet yang berisi kelima profil yaitu, profil analisis jaminan sosial, analisis sumber dana bantuan sosial, analisis pemberdayaan sosial, analisis penataan lingkungan sosial, dan analisis penanggulangan bencana. Selain itu, praktikan juga membuat rencana jadwal kegiatan selama praktikum laboratorium.



*Gambar 1. 4 Bimbingan Pra Lapangan 1*



*Gambar 1. 5 Bimbingan Pra Lapangan 2*

d. Pelepasan Praktikum

Pada tanggal 8 Februari 2023, praktikan mengikuti upacara pelepasan praktikum laboratorium di halaman Gedung Rektorat Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung bersama dengan Program Studi Pekerjaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial. Setelah upacara pelepasan, praktikan menuju Desa Soreang dan dilaksanakan kegiatan pengantaran praktikan oleh dosen pembimbing kepada pihak Pemerintahan Desa Soreang. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Desa Soreang.



*Gambar 1. 6 Upacara Pelepasan Praktikan*



*Gambar 1. 7 Pengantaran Praktikan di Lokasi Praktikum*

## **2. Tahap Pelaksanaan**

### **a. Pembekalan Analis Jaminan Sosial**

Pembekalan dilaksanakan sebelum praktikan turun ke lapangan untuk mengkaji profil analis jaminan sosial di Desa Soreang. Kegiatan pembekalan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2023 bertempat di Gedung Pascasarjana secara daring dengan narasumber ibu Gayatri Waditra Nirwesti, ME selaku Koordinator Jaminan Sosial Bappenas RI.



*Gambar 1. 8 Pembekalan Analis Jaminan Sosial*

b. Praktik Lapangan Analisis Jaminan Sosial

Kegiatan lapangan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023. Dimulai dengan pengajuan surat izin ke Kantor Desa Soreang pada tanggal 7 Februari 2023.



*Gambar 1. 9 Pengajuan surat izin ke Kantor Desa Soreang*

Kemudian, pada tanggal 8 Februari 2023 praktikan mengikuti pembukaan kegiatan praktikum sekaligus pengantaran dari dosen pembimbing kepada pihak Desa Soreang. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Desa Soreang.



*Gambar 1. 10 Pembukaan Kegiatan Praktikum*

Selanjutnya dimulai tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023 praktikan melakukan analisis data terkait Jaminan Sosial yang diperoleh dari perangkat Desa, Pekerja Sosial Masyarakat, dan beberapa masyarakat. Pada tanggal 9 April praktikan melakukan wawancara dengan Ibu Tuting selaku Pekerja Sosial Masyarakat di Desa Soreang dan memperoleh data terkait peta sosial masyarakat Desa Soreang, termasuk jumlah PPKS yang ada di Desa Soreang.



*Gambar 1. 11 Wawancara dengan PSM*

Pada tanggal 10 Februari 2023, praktikan melakukan inisiasi sosial dengan mengikuti kegiatan Posyandu di RW 15 “Posyandu Purbasari”. Melalui kegiatan tersebut, praktikan mendekati diri dengan masyarakat RW 15 dan beberapa kader yang berada di Desa Soreang.



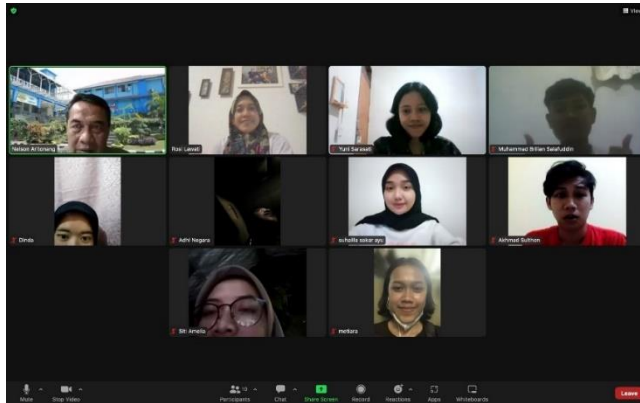
*Gambar 1. 12 Inisiasi Sosial ke Posyandu Purbasari*

Pada tanggal 15 Februari 2023, praktikan melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang tergolong dalam kategori fakir miskin, beliau bernama ibu In. Beliau belum memiliki BPJS Kesehatan dan belum terdaftar sebagai peserta Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).



*Gambar 1. 13 Wawancara dengan Klien*

Setelah mendapatkan data-data di lapangan dan melakukan analisis terhadap data tersebut dalam kaitannya dengan isu jaminan sosial, praktikan melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing pada tanggal 20 Februari 2023 untuk berkonsultasi terkait Profil Analisis Jaminan Sosial.



*Gambar 1. 14 Bimbingan Profil Analisis Jaminan Sosial*

c. Pembekalan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Pembekalan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 bertempat di Auditorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan narasumber bapak Tonton Heriyanto selaku CSR Manager PT AAPC Indonesia.



*Gambar 1. 15 Pembekalan Profil Analisis SDDBS*

d. Praktik Lapangan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Praktik lapangan dimulai pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan 4 Maret 2023. Namun, praktikan telah melakukan wawancara dengan Ibu-Ibu Kader PKK dan Pusat Kesejahteraan Sosial pada tanggal 17 Februari 2023 dan dilanjutkan wawancara dengan Pusat Kesejahteraan Sosial pada tanggal 23 Februari 2023. Pada wawancara tersebut, praktikan

mendapatkan informasi terkait jenis-jenis bantuan sosial yang ada di Desa Soreang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.



*Gambar 1. 16 Wawancara dengan Kader PKK*



*Gambar 1. 17 Wawancara dengan Puskesmas*

Setelah melakukan wawancara dengan Kader PKK dan Puskesmas Desa Soreang, praktikan mendapatkan isu masalah terkait Program Keluarga Harapan yang kemudian praktikan mengajukan isu masalah tersebut kepada dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan dan melanjutkan analisis data.



*Gambar 1. 18 Konfirmasi Isu SDBS*

Kemudian praktikan melakukan wawancara dengan Pendamping PKH Desa Soreang pada tanggal 3 Maret 2023. Wawancara tersebut bertujuan mendapatkan data-data terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Soreang. Analisis data dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih dilakukan oleh praktikan hingga tanggal 14 Maret 2023. Selama proses tersebut, praktikan menggali informasi dari beberapa narasumber yaitu, Keluarga Penerima Manfaat PKH di RW 10 dan ketua kelompok KPM PKH di RW 08.



*Gambar 1. 19 Wawancara Pendamping PKH Desa Soreang*



*Gambar 1. 20 Wawancara dengan KPM PKH RW 10*



*Gambar 1. 21 Wawancara dengan Ketua Kelompok KPM*

e. Pembekalan Analisis Pemberdayaan Sosial

Pembekalan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 bertempat di

Auditorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan narasumber bapak Samsul Maarif selaku Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kabupaten Cianjur.



*Gambar 1. 22 Pembekalan Profil Analisis Pemberdayaan Sosial*

f. Praktik Lapangan Analisis Pemberdayaan Sosial

Praktik lapangan dilaksanakan pada tanggal 8-18 Maret 2023. Namun, pada tanggal 23 Februari 2023 praktikan melakukan wawancara dengan ketua forum RW Desa Soreang dan melakukan pengamatan langsung di Bank Sampah Beriman yang bertempat di RW 10.



*Gambar 1. 23 Wawancara dengan Ketua Forum RW*



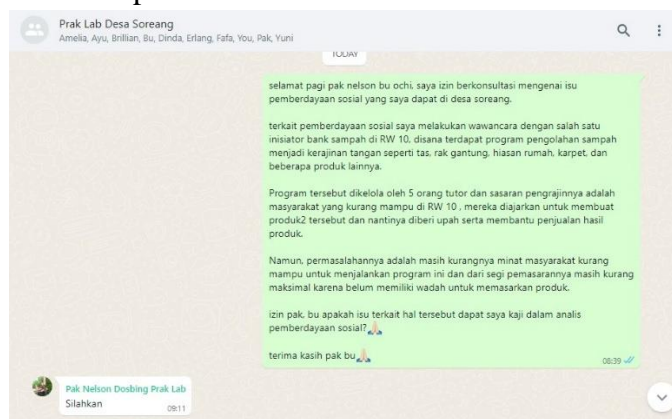
*Gambar 1. 24 Kunjungan ke Bank Sampah Beriman*

Pada tanggal 3 Maret 2023, praktikan melakukan wawancara kembali dengan Bapak Agus Hilman selaku inisiator Bank Sampah Beriman.



*Gambar 1. 25 Wawancara dengan Inisiator Bank Sampah*

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, praktikan mengajukan isu masalah yang ditemui kepada dosen pembimbing. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data yang telah didapat.



*Gambar 1. 26 Konfirmasi Isu Pemberdayaan Sosial*

- g. **Pembekalan Analis Penataan Lingkungan Sosial**  
Pembekalan Profil Analis Penataan Lingkungan Sosial dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2023 bertempat di Auditorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan narasumber bapak Ade Reno, AKS, MSW selaku Deputy 1 CEO Islamic Relief Indonesia. Praktikan berhalangan hadir dalam kegiatan pembekalan.
- h. **Praktik Lapangan Analis Penataan Lingkungan Sosial**  
Praktik lapangan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan 1 April 2023. Dalam menggali informasi praktikan melakukan wawancara dengan Pengurus Bank Sampah Beriman dan Bapak/Ibu RW 10 selaku inisiator Bank Sampah Beriman dan pengelola program Lubang Cerdas

Organik (LCO). Setelah mendapat informasi, praktikan mengajukan isu masalah kepada dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan.



Gambar 1. 27 Konfirmasi Isu Penataan Lingkungan Sosial



Gambar 1. 28 Wawancara tentang Program LCO

i. Pembekalan Analis Penanggulangan Bencana

Pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana dilaksanakan pada tanggal 5 April 2023 bertempat di Auditorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dengan narasumber bapak Moh Robi Amri selaku Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta.



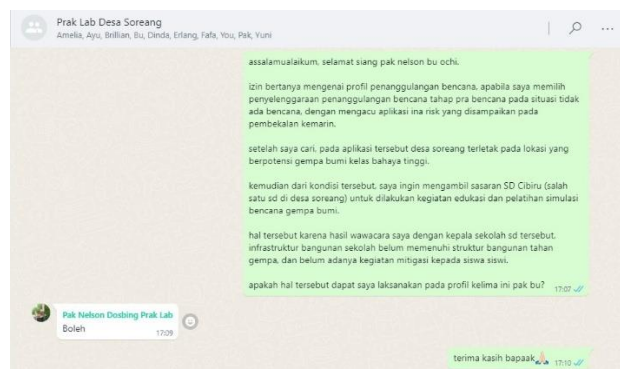
Gambar 1. 29 Pembekalan Profil Analis Penanggulangan Bencana

- j. **Praktik Lapangan Analisis Penanggulangan Bencana**  
Praktik lapangan dilakukan pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan 14 April 2023. Praktikan menggali informasi tentang isu penanggulangan bencana melalui wawancara dengan kepala sekolah SD Cibiru, salah satu SD yang terletak di Desa Soreang. Praktikan melakukan wawancara pada tanggal 6 April 2023 di SD Cibiru Desa Soreang.



*Gambar 1. 30 Wawancara dengan Kepsek SD Cibiru*

Setelah melakukan wawancara, praktikan mengajukan isu masalah yang akan dikaji dalam profil analisis penanggulangan bencana untuk mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan praktikum laboratorium.



*Gambar 1. 31 Konfirmasi Isu Penanggulangan Bencana*

### **3. Tahap Pasca Lapangan**

- a. **Finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum**

Penyusunan laporan dilaksanakan pada tanggal 16 – 26 April 2023.

b. Ujian Lisan Praktikum

Ujian Lisan dilakukan pada tanggal 2 – 3 Mei 2023 secara luring.

c. Perbaikan dan penyerahan laporan

**E. Sistematika Laporan**

Laporan praktikum laboratorium program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial disusun berdasarkan sistematika berikut ini :

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**I. PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, serta sistematika penulisan.

**II. PRAKTIKUM LABORATORIUM**

Memuat tinjauan tentang laporan profil analisis jaminan sosial, profil analisis sumber dana bantuan sosial, profil analisis pemberdayaan sosial, profil analisis penataan lingkungan sosial, dan profil analisis penanggulangan bencana. Setiap profil analisis memuat tentang gambaran umum masalah, tinjauan konsep atau teori yang relevan dengan kasus atau masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, asesmen, rencana intervensi yang terdiri dari latar belakang, tujuan intervensi, bentuk kegiatan dan program, sistem partisipan, metode dan teknik yang digunakan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, jadwal dan langkah-langkah.

**III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Memuat tentang kesimpulan yang menggambarkan tentang kesimpulan proses praktikum serta rekomendasi menggambarkan saran atau kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh program studi perlindungan dan pemberdayaan sosial dan politeknik kesejahteraan sosial bandung dalam meningkatkan pelaksanaan praktikum agar semakin baik untuk kedepannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## II. Praktikum Laboratorium

### A. Profil Analisis Jaminan Sosial

#### 1. Gambaran Umum Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh praktikan dari Ibu Tuting Sutinah selaku Pekerja Sosial Masyarakat di Desa Soreang mengenai “Rekap BNBA Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Desa Soreang” pada bulan Februari 2023, Desa Soreang mempunyai luas 2.430.291,50 Km<sup>2</sup> dengan rincian data sebagai berikut:

- a. Jumlah KK : 5.402
- b. Jumlah Jiwa : 18.465
- c. Penduduk Laki-Laki : 9.431
- d. Penduduk Perempuan : 9.034

Sedangkan jumlah PPKS di Desa Soreang adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.1. 1 Jumlah PPKS di Desa Soreang*

NO	JENIS PPKS	JUMLAH
1.	Disabilitas	33
2.	Pemulung	2
3.	Fakir Miskin	20
4.	Lanjut Usia Terlantar	55
5.	PSK	1
6.	WRSE	3

*Sumber: Rekap BNBA PPKS Desa/Kel. Soreang Kec. Soreang*

Data tersebut menggambarkan jumlah masyarakat yang tergolong dalam PPKS di Desa Soreang. Terdapat beberapa potensi dan isu permasalahan yang praktikan temukan di lapangan melalui wawancara dengan beberapa key person di Desa Soreang. Beberapa temuan potensi dan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lansia Terlantar belum mendapatkan JKN-KIS PBI
- b. Rendahnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap pelayanan jaminan sosial
- c. Banyaknya PRSE yang belum tercover PBI-JK
- d. Jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan para pekerja home industri konveksi yang masih rendah
- e. Masih terdapat masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

- f. Jamsosmas dana sehat yang berpotensi untuk dikembangkan dalam kebermanfaatannya di masyarakat,
- g. Rendahnya partisipasi pedagang kaki lima dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- h. Rendahnya kepesertaan pekerja sektor informal petani pada BPJS Ketenagakerjaan

Dari identifikasi potensi dan permasalahan di atas, praktikan tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masyarakat fakir miskin yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan kepesertaan PBI-JK.

Padahal pemerintah Kabupaten Bandung pada akhir tahun 2022 telah mencapai target *Universal Health Coverage (UHC)* sebesar 96,41% jiwa, yang artinya 96,41% dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung telah resmi terdaftar dalam kepesertaan JKN. *UHC* atau jaminan kesehatan semesta merupakan sistem kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil dalam pelayanan kesehatan. Target *UHC* adalah minimal 95% jumlah penduduk terdaftar sebagai peserta JKN. Pemerintah Kabupaten Bandung dikatakan sudah mencapai target *UHC*, dan terus meningkatkan *UHC* termasuk melalui pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu yang kesulitan mengakses pelayanan kesehatan dikarenakan kendala biaya.

Kondisi yang terjadi di lapangan adalah masyarakat yang tergolong dalam fakir miskin masih ada yang belum terdaftar sebagai peserta PBI-JK, itu artinya pelaksanaan *UHC* memang masih perlu di tingkatkan, termasuk di Desa Soreang. Masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta penerima bantuan iuran akan kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, khususnya ketika mereka berada dalam keadaan sakit yang membutuhkan perawatan medis, tetapi dengan biaya yang mahal. Beberapa rumah sakit di Kabupaten Bandung pun tidak menerima surat permohonan keringanan biaya seperti SKTM sebagai pengganti KIS. Di Desa Soreang, terdapat pula masyarakat fakir miskin yang belum mengetahui mekanisme pengurusan PBI-JK dan bahkan belum terlalu aware terhadap pentingnya jaminan kesehatan. Selain itu, beberapa masyarakat fakir miskin yang sudah mengurus pengajuan PBI-JK belum terdaftar dikarenakan mereka tidak terdaftar dalam DTKS yang menyebabkan mereka tidak dapat menerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Berdasarkan data di Puskesmas Desa Soreang, masyarakat yang terdata di DTKS sebanyak 3.556 PBI APBN sudah termasuk masyarakat fakir miskin, tetapi kondisi di lapangan masih terdapat masyarakat yang belum menjadi peserta

PBI-JK. Terdapat pula masyarakat yang sudah terdaftar di DTKS, tetapi belum juga menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Padahal mereka adalah masyarakat yang sangat membutuhkan jaminan kesehatan.

Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, kerentanan masyarakat yang tergolong dalam fakir miskin terhadap risiko kesehatan akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan masalah kemiskinan. Mereka seharusnya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, kondisi ini juga akan memengaruhi pelaksanaan *UHC* di Kabupaten Bandung. Maka dari itu, praktikan tertarik untuk mengkaji jaminan kesehatan di Desa Soreang dengan harapan semakin meningkatnya jumlah masyarakat fakir miskin yang memperoleh haknya dengan terdaftar sebagai peserta PBI-JK sehingga akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat fakir miskin semakin maksimal.

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Konsep Jaminan Sosial**

Menurut Nughroho (1995) Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi yang ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik sandang, pangan, dan papan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup.

Pada prinsipnya, standar hidup masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan pendidikan maupun kesehatan. Masalah kemiskinan menjadi suatu isu yang menghambat tercapainya tujuan negara dalam mensejahterakan rakyat. Kewajiban negara terhadap rakyatnya sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea 4 (empat) yaitu berupa negara harus menjamin sistem hukum yang adil, menjamin Hak Asasi Manusia, mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, memberi jaminan sosial, dan memberi kebebasan beribadah kepada warga negaranya.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.

Menurut Kartonegoro (2008), Jaminan sosial merupakan konsepsi kesejahteraan yang melindungi resiko baik sosial maupun ekonomi masyarakat dan membantu perekonomian

nasional dalam rangka mengoreksi ketidakadilan distribusi penghasilan dengan memberikan bantuan kepada golongan ekonomi rendah. Pelaksanaan Jaminan Sosial di Indonesia diwujudkan oleh pemerintah melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

SJSN menjadi kewajiban negara yang wajib diberikan untuk warga negaranya. Selain itu, seluruh warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjadi peserta jaminan sosial. Tujuan dari jaminan sosial tercantum dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 Bab II pasal 3 yang menyatakan “Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.” Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) azas jaminan sosial, yaitu kemanusiaan, manfaat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan prinsip jaminan sosial adalah kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, keterhati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib, dana amanat, hasil pengelolaan dana digunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta.

**b. Konsep Jaminan Kesehatan Nasional**

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan resmi beroperasi pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu jaminan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh

jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata. Adapun manfaat dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS meliputi:

- 1) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama  
Pelayanan kesehatan yang diberikan untuk perorangan yang bersifat non spesifik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan ini diberikan oleh puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter, praktik mandiri dokter gigi, klinik pertama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri, Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara, Faskes Penunjang: Apotik dan Laboratorium.
- 2) Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)  
Manfaat yang akan didapatkan oleh peserta adalah meliputi pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan (promotif preventif) dan pelayanan kuratif dan rehabilitatif (pengobatan).
- 3) Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)  
Manfaat yang akan didapatkan oleh peserta adalah meliputi:
  - a) pendaftaran dan administrasi;
  - b) akomodasi rawat inap;
  - c) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
  - d) tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
  - e) pelayanan kebidanan, ibu, bayi dan balita meliputi:
    - (1) persalinan pervaginam bukan risiko tinggi;
    - (2) persalinan dengan komplikasi dan/atau penyulit pervaginam bagi Puskesmas PONE (Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar);
    - (3) pertolongan neonatal dengan komplikasi;
  - f) pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
  - g) pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama
- 4) Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan  
Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus, yang diberikan oleh:
  - a) Klinik utama atau yang setara.
  - b) Rumah Sakit Umum baik milik Pemerintah maupun swasta

- c) Rumah Sakit Khusus
  - d) Faskes Penunjang: Apotik, Optik dan Laboratorium.
- 5) Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)  
 Manfaat yang akan diperoleh peserta BPJS adalah administrasi pelayanan; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar yang dilakukan di unit gawat darurat; pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialisik; tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis; pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; pelayanan penunjang diagnostik lanjutan (laboratorium, radiologi dan penunjang diagnostik lainnya) sesuai dengan indikasi medis; rehabilitasi medis; dan pelayanan darah.
- 6) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)  
 Manfaat yang akan diperoleh peserta BPJS adalah perawatan inap non intensif; dan perawatan inap intensif (ICU,ICCU, NICU, PICU).

**c. Konsep Kepesertaan PBI-JK**

Sasaran dari jaminan kesehatan adalah seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kepesertaan JKN merupakan kewajiban seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Peserta JKN-KIS dibagi atas 6 jenis kepesertaan. Salah satu jenis kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk PPKS adalah BPJS PBI atau PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan), yaitu peserta BPJS bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, iurannya akan dibayarkan oleh pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, diantaranya disebutkan bahwa:

- 1) Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait
- 2) Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu
- 3) Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan

- 4) Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Adapun Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- 2) Memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil
- 3) Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Sebagai peserta JKN-KIS, peserta PBI-JK akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dengan fasilitas yang diterima sebagai berikut:

- 1) Peserta PBI-JK hanya berhak untuk mendapatkan layanan BPJS Kelas 3
- 2) Peserta PBI-JK juga tidak bisa meng-upgrade kelas perawatannya, jika sewaktu-waktu yang bersangkutan mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit
- 3) Peserta PBI-JK juga dibebaskan dari iuran bulanan, sebab iuran kepesertaan mereka akan dibayarkan oleh pemerintah
- 4) Jika kepesertaan PBI telah dinonaktifkan selama 6 bulan, tetapi yang bersangkutan memerlukan layanan kesehatan, maka yang bersangkutan harus melakukan pengajuan diri kembali ke Dinas Sosial dan melakukan pengaktifan kembali kepesertaan PBI-JK tersebut di sana.

Sumber pendanaan kepesertaan PBI-JK berasal dari APBN dan APBD. Peserta PBI-JK APBN adalah penerima bantuan iuran yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan peserta PBI-JK APBD adalah penerima bantuan iuran yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **d. Konsep Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin**

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 BAB I pasal (1) tentang Penanganan Fakir Miskin, “fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”. Fakir miskin memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara, diantaranya adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan; hak mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun,

mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; dan hak meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Bentuk penanganan fakir miskin yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 BAB III pasal (7) salah satunya adalah penyediaan layanan kesehatan yang dilakukan melalui jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin.

PBI-JK merupakan program JKN yang sangat penting untuk menjamin kesehatan masyarakat yang tidak mampu (fakir miskin), sebab mereka adalah orang yang rentan mengalami risiko keuangan maupun kesehatan. Selain itu, melalui program PBI-JK, masyarakat yang tidak mampu akan terjamin dalam mengakses pelayanan kesehatan yang layak.

### **3. Asesmen**

#### **a. Identifikasi Masalah**

Dalam mengidentifikasi masalah terkait pelaksanaan jaminan sosial bagi fakir miskin di Desa Soreang, praktikan menggali informasi berdasarkan sumber data primer yaitu, melalui wawancara dengan beberapa key person dan masyarakat yang tergolong dalam fakir miskin yang ada di Desa Soreang. Adapun dalam mengkaji hasil wawancara tersebut, praktikan menggunakan tools/teknologi pohon masalah. Melalui teknologi ini, dapat diketahui fokus masalah, penyebab munculnya masalah, serta diketahui dampak dari masalah yang terjadi. Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Pak Iyus selaku Bidang Pelayanan Publik dan Pak Rohman selaku Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan Sosial pada tanggal 09 Februari 2023

Melalui wawancara tersebut, praktikan mendapat informasi mengenai pelayanan publik yang biasanya diakses oleh masyarakat adalah pelayanan SKTM ke Puskesmas. Dalam satu bulan terdapat 30% masyarakat yang mengajukan SKTM untuk keperluan keringanan biaya rumah sakit dan pengajuan keringanan biaya sekolah. Selain itu, praktikan mendapat informasi mengenai kepesertaan PBI-JK pada masyarakat fakir miskin. Permasalahan yang ada adalah terdapat masyarakat yang sudah terdaftar dalam kepesertaan

PBI-JK, tetapi masih terdapat pula masyarakat fakir miskin yang belum terdaftar. Masyarakat fakir miskin yang belum terdaftar dalam kepesertaan PBI-JK APBN diajukan oleh pemerintah desa dalam kepesertaan PD Pemda atau PBI-JK APBD melalui beberapa persyaratan.

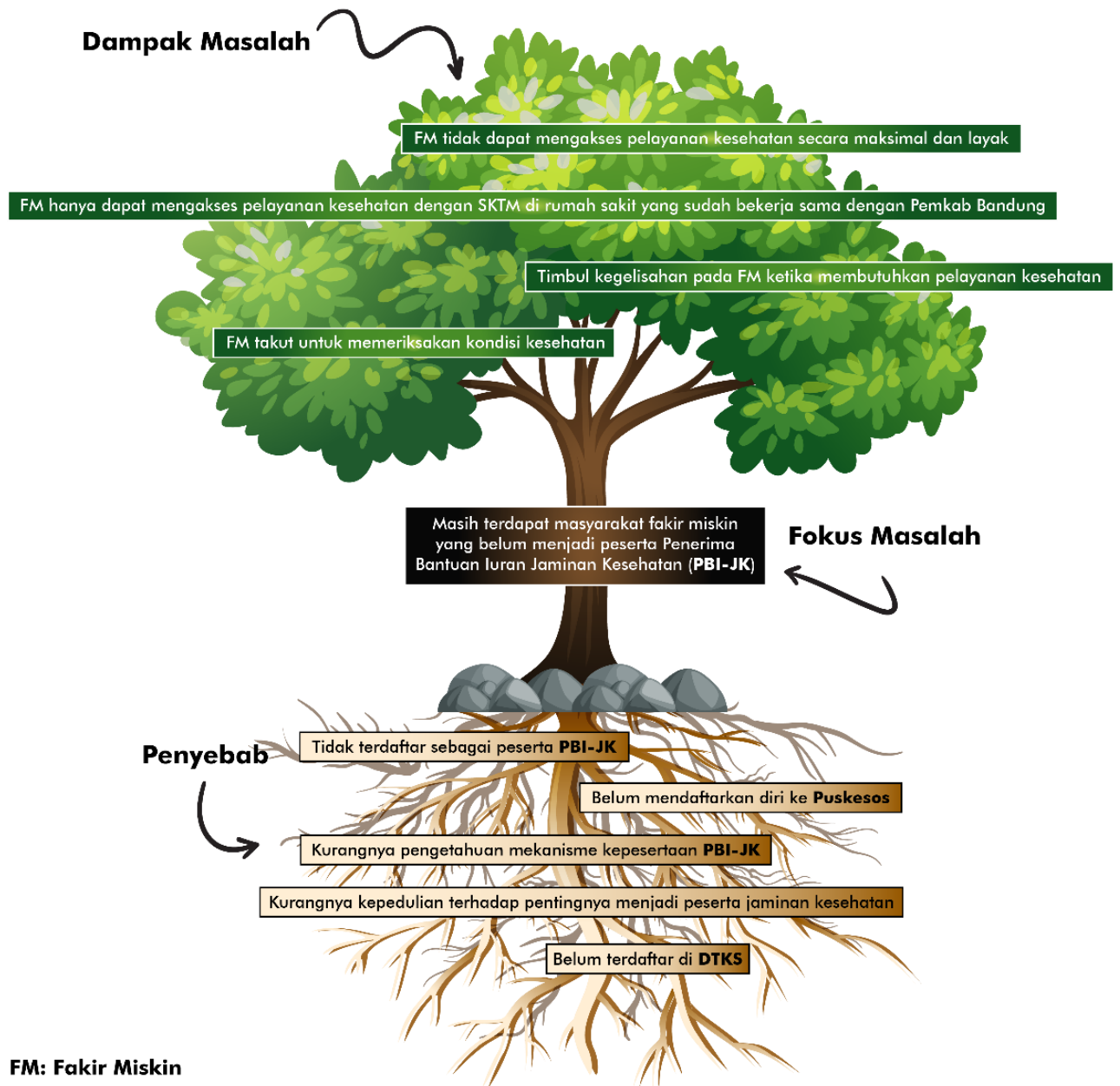
2) Wawancara dengan Ibu Tuting selaku Pekerja Sosial Masyarakat pada tanggal 09 Februari 2023

Melalui wawancara tersebut, praktikan mendapatkan informasi mengenai data PPKS Desa Soreang, gambaran masyarakat fakir miskin di RW 15, dan kepesertaan PBI-JK pada masyarakat fakir miskin. Dari pernyataan Ibu Tuting, bahwa masih terdapat masyarakat fakir miskin yang belum mendapat bantuan PBI-JK.

3) Wawancara dengan Ibu Iin selaku masyarakat fakir miskin di RW 15 Desa Soreang pada tanggal 15 Februari 2023

Ibu Iin merupakan salah satu masyarakat fakir miskin di RW 15 yang belum terdaftar sebagai peserta PBI-JK, penyebabnya ialah ia belum melakukan pembaruan status kependudukan dari awalnya sebagai janda dan saat ini sudah menikah. Pekerjaan beliau sebagai buruh jahit konveksi dengan pendapatan yang hanya cukup untuk kebutuhan makannya saja. Beliau tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan kondisi lingkungan yang kumuh. Ia merasa membutuhkan bantuan PBI-JK karena ia pernah mengalami sakit yang cukup lama dan harus menggunakan biaya pribadi dengan jumlah yang besar, pada kondisi tersebut awalnya Ibu Iin tidak melakukan pemeriksaan karena takut akan biaya pengobatan yang mahal dan hanya menggunakan obat warung, tetapi karena keadaannya semakin mendesak ia pun akhirnya melakukan pengobatan dengan biaya mandiri.

Dari hasil wawancara di atas, isu permasalahan yang dapat diidentifikasi di Desa Soreang berkaitan dengan jaminan sosial adalah masih terdapat masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Untuk mengetahui penyebab dan dampak dari isu permasalahan tersebut, praktikan menggunakan teknologi pekerjaan sosial berupa pohon masalah. Adapun pohon masalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. 1 Pohon Masalah Jaminan Sosial

## 1) Penyebab Masalah

- a) Tidak Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Masih terdapat masyarakat fakir miskin yang belum masuk dalam DTKS, hal ini terjadi karena belum dilakukannya pemutakhiran data ulang.

- b) Tidak Terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Masih terdapat masyarakat fakir miskin yang tidak terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), sehingga mereka tidak menerima bantuan iuran dari pemerintah. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu terdapat kasus masyarakat sudah mengajukan pengurusan PBI-JK, tetapi karena adanya nomor NIK yang tidak sesuai antara data yang tertera di Kartu Keluarga (KK) dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), membuat mereka tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.

- c) Kurangnya Pengetahuan Mengenai Mekanisme Kepesertaan PBI-JK

Masih terdapat masyarakat fakir miskin yang kurang memahami mekanisme kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

- d) Kurangnya Kepedulian Akan Pentingnya Memiliki Jaminan Kesehatan

Sebagian masyarakat fakir miskin masih kurang memiliki awareness akan pentingnya terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan, masyarakat baru akan menyadari pentingnya hal tersebut ketika mereka mengalami sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan dan tidak mampu secara keuangan.

## 2) Dampak Masalah

- a) Masyarakat Fakir Miskin Tidak Dapat Mengakses Pelayanan Kesehatan Secara Layak dan Terjangkau

Sebagian masyarakat fakir miskin di Desa Soreang yang tidak mendapat PBI-JK, mengalami kendala dalam hal pembiayaan sehingga sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

- b) Fakir Miskin hanya dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan SKTM di rumah sakit yang sudah bekerja sam dengan Pemkab Bandung

Berdasarkan Data Dibedasken Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung sejauh ini bermitra dengan 16 rumah sakit yang ada di wilayah Kabupaten Bandung. Masyarakat fakir miskin yang kurang mengetahui daftar rumah sakit tersebut, kesulitan mengakses pelayanan kesehatan karena hanya rumah sakit yang bermitra dengan Pemda Kabupaten Bandung yang menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai pengganti KIS/Kartu kepesertaan BPJS.

c) Timbul Kegelisahan Pada Masyarakat Fakir Miskin Ketika Membutuhkan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat fakir miskin yang belum menerima PBI-JK merasa gelisah ketika dirinya atau keluarganya mengalami sakit dan membutuhkan biaya yang besar.

d) Masyarakat Fakir Miskin Takut Untuk Memeriksa Kondisi Kesehatan

Masyarakat fakir miskin yang belum menerima PBI-JK takut memeriksa kondisi kesehatannya karena tidak memiliki biaya yang cukup.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, fokus masalah yang dipilih oleh praktikan adalah masih terdapat masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Masalah tersebut dapat dilihat melalui beberapa kasus yang ditemukan oleh praktikan di masyarakat. Terdapat salah satu masyarakat di RW 15 yang mengalami sakit dengan waktu yang lama, tetapi ia tidak mau melakukan pengobatan ke rumah sakit karena takut akan biaya pengobatan yang mahal. Kondisi ini membuat masyarakat hanya mengandalkan obat tradisional dan obat warungan untuk pengobatan, padahal seharusnya mereka bisa mendapatkan penanganan yang lebih sesuai apabila melakukan pemeriksaan dengan dokter.

Selain itu, kondisi yang terjadi di masyarakat adalah terdapat masyarakat fakir miskin yang mengajukan SKTM sebagai pengganti KIS, tetapi ditolak oleh pihak rumah sakit karena rumah sakit tersebut tidak terdaftar sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Bandung yang melayani penggunaan SKTM sebagai pengganti KIS, akhirnya ia harus menggunakan biaya pribadi untuk pengobatan dengan berhutang ke tetangga karena keterbatasan biaya yang dimiliki. Kondisi tersebut tentu semakin meningkatkan

kemiskinan dan kerentanan masyarakat fakir miskin terhadap risiko kesehatan dan ekonomi

**b. Identifikasi Kebutuhan**

Dengan melihat penyebab masalah yang dikaji melalui pohon masalah, masyarakat fakir miskin di Desa Soreang yang belum menjadi peserta PBI-JK yaitu penyebab utamanya adalah mereka tidak terdaftar dalam PBI-JK serta penyebab lainnya yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat fakir miskin tentang mekanisme PBI-JK dan masih terdapat fakir miskin yang belum terdaftar di DTKS. Maka dari itu, diperlukan pendampingan kepada masyarakat fakir miskin di Desa Soreang untuk segera memproses pengajuan PBI-JK agar mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak, adil, dan tidak akan memperparah kondisi kesejahteraan.

**c. Identifikasi Potensi dan Sumber**

Sistem sumber yang terdapat di Desa Soreang adalah:

- 1) Sistem Sumber Informal  
keluarga, kerabat, tetangga terdekat
- 2) Sistem Sumber Formal  
Pemerintah Desa Soreang
- 3) Sistem Sumber Kemasyarakatan  
BPJS Kesehatan, Puskesmas Desa Soreang, Rumah Sakit di Kabupaten Bandung, Kader PKK, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

**4. Rencana Intervensi**

**a. Latar Belakang**

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. UUD 1945 mengamanatkan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu, adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam

memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Seiring dengan dimulainya JKN per 1 Januari 2014, semua program jaminan kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah (Askes PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri, dan Jamkesmas), diintegrasikan ke dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Sama halnya dengan program Jamkesmas, pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung juga telah melaksanakan tanggung jawabnya kepada masyarakat fakir miskin, yaitu dengan melaksanakan PBI-JK dan sudah menyasar ke desa/kelurahan di Kabupaten Bandung termasuk Desa Soreang. Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, terdapat target Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta dimana setiap daerah minimal 95% masyarakatnya sudah terdaftar kepesertaannya dalam program JKN. Pada akhir tahun 2022, UHC Kabupaten Bandung pun telah mencapai 96,41% yang berarti telah memenuhi target UHC itu sendiri. Target UHC ini meliputi kepesertaan penerima bantuan iuran (PBI) maupun non penerima bantuan iuran (Non-PBI).

Akan tetapi, pelaksanaan PBI-JK di Desa Soreang untuk masyarakat fakir miskin ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena sebagian masyarakat yang tergolong fakir miskin belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) karena berbagai penyebab. Penyebabnya adalah tidak terdaftar dalam PBI-JK, belum mendaftarkan diri ke Puskesmas Desa Soreang, kurangnya pengetahuan mengenai mekanisme PBI-JK, kurangnya kepedulian akan pentingnya menjadi peserta jaminan kesehatan, dan tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Oleh karena itu, solusi agar program PBI-JK dapat tepat sasaran dan tersebar merata ke seluruh masyarakat fakir miskin, maka perlu dilaksanakan pendampingan kepada fakir miskin sebagai upaya mendapatkan bantuan iuran jaminan kesehatan

## **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Program Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK memiliki dua tujuan, yaitu terdiri dari tujuan umum dan khusus. Adapun hal tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum  
Pemerataan PBI-JK bagi seluruh masyarakat fakir miskin di Desa Soreang.
- 2) Tujuan Khusus
  - a) Meningkatkan partisipasi masyarakat fakir miskin dalam Jaminan Kesehatan Nasional sebagai peserta PBI-JK
  - b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta PBI-JK mengenai mekanisme PBI-JK
  - c) Menyadarkan masyarakat fakir miskin tentang pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program BPJS Kesehatan
  - d) Mengantisipasi risiko sosial ekonomi yang ditimbulkan dari masalah kesehatan pada masyarakat fakir
  - e) Mengupayakan hak fakir miskin sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
  - f) Memperbarui data fakir miskin yang belum mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan

## **c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Nama program yang akan dilaksanakan adalah ” Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK APBD”, yang terdiri dari kegiatan penyuluhan dan fasilitasi pengajuan kepesertaan PBI-JK. Kegiatan penyuluhan mengenai program jaminan kesehatan dan kepesertaan PBI dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkan *awareness* masyarakat fakir miskin akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan dan menggerakkan mereka untuk mengurus pengajuan kepesertaan PBI-JK. Selain itu, dilaksanakannya fasilitasi kepada masyarakat fakir miskin di Desa Soreang untuk melakukan pengajuan PBI-JK APBD, yang diawali dengan pendataan masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta PBI-JK dan dilanjutkan dengan pendampingan pengajuan PBI-JK APBD. Sasaran program ini adalah masyarakat fakir miskin di Desa Soreang yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK)

Tabel 2.1. 2 Rencana Program Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK

No	Kegiatan Penyelesaian Masalah	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) & Kepesertaan PBI-JK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pemahaman tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> <li>2. Memberikan pemahaman tentang mekanisme PBI-JK</li> <li>3. Menyadarkan masyarakat fakir miskin tentang pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Program BPJS Kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat fakir miskin memiliki pengetahuan tentang Jaminan Kesehatan Nasional</li> <li>2. Masyarakat fakir miskin memahami mekanisme PBI-JK</li> <li>3. Masyarakat fakir miskin memiliki kesadaran tentang pentingnya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)</li> </ol>	Masyarakat fakir miskin di Desa Soreang yang belum menjadi peserta PBI-JK	Pekerja Sosial Masyarakat	BPJS Kesehatan Kabupaten Bandung (Narasumber)

2.	Fasilitasi Pengajuan Kepesertaan PBI-JK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan hak fakir miskin sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)</li> <li>2. Meningkatkan partisipasi masyarakat fakir miskin dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta PBI-JK</li> <li>3. Memperbarui data fakir miskin yang belum mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpenuhi hak fakir miskin sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)</li> <li>2. Meningkatnya partisipasi masyarakat fakir miskin dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai peserta PBI-JK</li> <li>3. Mendapat data terbaru tentang fakir miskin yang belum mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan</li> </ol>	Masyarakat fakir miskin di Desa Soreang yang belum menjadi peserta PBI-JK	Pekerja Sosial Masyarakat	Tim Kerja Masyarakat (Kader PKK)
----	---	---	---	---	---------------------------	----------------------------------

#### **d. Sistem Partisipan**

Netting (2017) mengatakan bahwa sistem partisipan terdiri atas sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengendali, sistem pelaksana perubahan, sistem sasaran, dan sistem kegiatan. Adapun sistem partisipan dalam rencana intervensi masalah ini adalah sebagai berikut:

1) Sistem inisiator (*initiator system*)

Sistem inisiator merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian adanya masalah dan merasa perlu adanya program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu praktikan sebagai pekerja sosial.

2) Sistem agen perubahan (*change agent*)

Sistem agen perubahan merupakan seseorang atau lembaga yang mengkoordinasikan upaya perubahan atau pemecahan masalah, yaitu pekerja sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Puskesmas Soreang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kantor Cabang Soreang, Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

3) Sistem klien (*client system*)

Sistem klien dalam program ini ialah masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Desa Soreang, sebagai penerima utama dalam usaha perubahan dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program.

4) Sistem pendukung (*support system*)

Sistem pendukung merupakan pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan dalam penyelesaian masalah yang ada, yaitu Pemerintah Desa Soreang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

5) Sistem pengendali (*controlling system*)

Sistem pengendali adalah seseorang atau pihak yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas perubahan yang diusulkan tersebut. Dalam program ini yaitu, Kepala Desa Soreang.

6) Sistem pelaksana perubahan (*implementing system*)

Dalam hal ini sistem pelaksana perubahan yaitu, pekerja sosial masyarakat, kader PKK, pemerintah Desa Soreang yang akan mengkoordinasikan usaha perubahan atau penyelesaian masalah. Sistem pelaksana perubahan memiliki keahliannya yang berbeda-beda untuk melakukan perubahan terencana.

7) Sistem sasaran (*target system*)

Sistem sasaran merupakan orang/sekumpulan orang-orang yang dijadikan sasaran perubahan yang diharapkan dapat memengaruhi dan mencapai tujuan pertolongan. Sistem sasaran utama dalam program ini ialah masyarakat fakir miskin yang sudah menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Desa Soreang.

8) Sistem kegiatan (*action system*)

Sistem kegiatan merupakan orang-orang yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan perubahan. Dalam program ini yaitu, dan pekerja sosial masyarakat, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Soreang, Kader PKK.

**e. Metode dan Teknik**

Metode pekerjaan sosial yang akan digunakan dalam pelaksanaan program Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK adalah *Community Organization And Community Development (COCD)*. COCD sebagai metode pekerjaan sosial dengan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial masyarakat secara umum dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara khusus.

Menurut Edi Suharto (2010:37) *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Secara singkat *community development* adalah suatu cara kerja untuk memecahkan masalah masyarakat. Dengan demikian penggunaan dari kedua metode ini dalam tahap pemahaman serta analisis masalah di masyarakat dimana *community organization* adalah sebagai metode intervensi yang ditekankan terhadap pemecahan masalah, sedangkan *community development* adalah sebagai proses interaksi sosial yang penekanannya terhadap perubahan sosial

Teknik yang akan digunakan dalam program ini adalah penyuluhan dan fasilitasi.

1) Penyuluhan

Penyuluhan yang akan diterapkan adalah penyuluhan sosial, dimana penyuluhan sosial sebagai suatu proses sosial dan interaksi sosial perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan,

maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial Pasal 1 ayat 1). Teknik penyampaian yang akan dilakukan adalah dengan penyuluhan langsung yaitu melalui pertemuan dalam kunjungan ke rumah-rumah masyarakat fakir miskin yang menjadi sasaran program. Selain itu, metode penyuluhan akan dilaksanakan secara individu, yaitu dengan melakukan pendekatan *person to person* dengan masyarakat fakir miskin.

Penyuluhan dilakukan dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat khususnya fakir miskin tentang jaminan kesehatan nasional dan mekanisme kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK). Selain itu, penyuluhan dilakukan untuk menyadarkan masyarakat fakir miskin tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan dengan menjadi peserta jaminan kesehatan nasional melalui kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).

## 2) Fasilitasi

Fasilitasi dilakukan sebagai upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kemudahan yang dimaksud dalam penyelesaian masalah ini adalah kemudahan masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan agar dapat menjadi peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah, guna memberikan hak mereka dengan mempermudah masyarakat fakir miskin mengakses pelayanan kesehatan.

Dalam program ini, yang akan berperan adalah fasilitator yang terdiri dari pekerja sosial masyarakat dibantu oleh praktikan yang akan melakukan pendataan di setiap RW bersama kader PKK yang akan membantu masyarakat fakir miskin untuk melakukan pengajuan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

## f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan program, perlu dilakukan penyusunan rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Adapun rincian rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. 3 RAB Program Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK APBD

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Administrasi</b>					
1.	Proposal Pengajuan	40	Lembar	1.000	40.000
2.	Surat Menyurat	50	Lembar	1.000	50.000
3.	Amplop	10	Lembar	2.000	20.000
4.	ATK	1	Pack	30.000	30.000
<b>Jumlah</b>					<b>140.000</b>
<b>Logistik</b>					
5.	Brosur	100	Lembar	3.000	300.000
6.	Kuota internet (15 orang)	10	GB	30.000	450.000
7.	Biaya Transportasi (15 orang)	1	Bulan	200.000	3.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>3.750.000</b>
<b>Konsumsi</b>					
8.	Makan siang fasilitator (4 pertemuan)	15	Paket	15.000	900.000
<b>Jumlah</b>					<b>900.000</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					<b>4.790.000</b>

**g. Analisis Kelayakan Program**

Analisis uji kelayakan dilakukan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari program yang akan dilaksanakan. Berikut matriks analisis kelayakan program (analisis SWOT):

Tabel 2.1. 4 Analisis SWOT

<b>Internal</b>	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat fakir miskin memiliki kemauan untuk membuat perubahan</li> <li>2. Kebutuhan masyarakat fakir miskin akan jaminan sosial cukup tinggi</li> <li>3. Ketersediaan masyarakat fakir miskin untuk mengikuti proses pendampingan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan masyarakat fakir miskin tentang JKN dan mekanisme PBI-JK</li> <li>2. Membutuhkan waktu yang lama karena jumlah RW di Desa Soreang sejumlah 24</li> </ol>
<b>Eksternal</b>	<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan dari Pemerintah Desa Soreang dan beberapa pihak terkait (BPJS Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Bandung)</li> <li>2. Adanya keakraban antara Kader PKK, PSM, dan masyarakat sehingga mempermudah pendampingan</li> </ol>	<b>Strategi SO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pengetahuan mengenai JKN dan mekanisme PBI-JK bagi masyarakat fakir miskin</li> <li>2. Membuat jadwal dan pembagian kerja TKM dengan efektif dan efisien</li> </ol>
<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuota PD Pemda yang belum dapat mencakup seluruh masyarakat fakir miskin</li> <li>2. Desakan dari masyarakat akan hasil dari Pengajuan PBI-JK karena memakan waktu yang lama</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa dilaksanakannya program adalah sebagai upaya untuk membantu masyarakat miskin dalam proses pengajuan PBI-JK yang harapannya dapat memperoleh jaminan kesehatan yang layak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat komitmen tentang kesediaan mengikuti seluruh alur pengajuan PBI-JK dengan masyarakat fakir miskin ketika dilakukan pendataan</li> </ol>

Program ini layak untuk dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mengatasi hambatan yang ada. *Strength (S)* lebih besar daripada *Weakness (W)* dan *Opportunity (O)* lebih besar daripada *Threats (T)*.

#### h. Jadwal dan Langkah-langkah

Program akan berjalan dengan sistematis dan teratur dengan dilakukannya penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan program dengan tepat waktu.

Tabel 2.1. 5 Jadwal dan Langkah-langkah Program Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK APBD

Langkah Kegiatan	Maret			April	
	Minggu Ke				
	1	2	3	1	2
<b>1. Persiapan</b>					
Membentuk Tim Kerja Masyarakat					
Melakukan rapat konsep kegiatan, pembagian kerja, dan penjadwalan kerja					
Menyatakan komitmen untuk mengungkapkan janji hati					
Membuat proposal kegiatan dan keperluan surat menyurat					
Mengirimkan proposal					
Mempersiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan					
Tim Kerja Masyarakat mempelajari kembali mekanisme kepesertaan PBI-JK dan mempersiapkan kebutuhan pendataan					
<b>2. Pelaksanaan</b>					
Pendataan dan penyuluhan kepada masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta PBI-JK					
Pendampingan dan fasilitasi pengajuan kepesertaan PBI-JK					
<b>3. Pengakhiran</b>					
Evaluasi kegiatan					
Pembuatan laporan pertanggungjawaban					
Pembubaran Tim Kerja Masyarakat					

Berdasarkan matriks di atas, kegiatan dilaksanakan melalui tiga (3) tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

##### 1) Persiapan

##### a. Membentuk Tim Kerja Masyarakat

Tim Kerja Masyarakat ini terdiri dari pekerja sosial (praktikan) selaku koordinator, dan ketua TKM adalah Pekerja Sosial Masyarakat Desa Soreang yang beranggotakan para Kader PKK. TKM ini memiliki jumlah anggota sebanyak 15 orang yang terdiri dari 1 PSM dan 14 Kader PKK.

- b. Melakukan rapat konsep kegiatan, pembagian kerja, dan penjadwalan kerja

Pelaksanaan rapat diadakan untuk membahas konsep pendampingan yang akan dijalankan. Konsep pendampingan yang akan dilakukan adalah dimulai dengan pendataan masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta PBI-JK dan didalamnya juga memuat penyuluhan tentang mekanisme kepesertaan PBI-JK dan pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Sebelum melakukan pendataan, PSM akan menyebarkan informasi mengenai pendataan ini ke ketua RW dan RT yang ada di Desa Soreang, melalui penyebaran informasi ini, para masyarakat fakir miskin yang membutuhkan dapat melapor kepada ketua RT dan nantinya akan dilakukan pendataan oleh kader PKK. Setelah dilakukan pendataan, akan dilaksanakan pendampingan untuk masyarakat fakir miskin melakukan pengajuan kepesertaan PBI-JK.

Pembagian kerja dalam program ini adalah setiap anggota menjalankan tugasnya di 2 RW. Penjadwalan kerja, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 15 April 2023. Dengan pembagian jadwalnya adalah Minggu pertama untuk persiapan, minggu kedua sampai minggu kelima untuk pelaksanaan, dan minggu keenam untuk pengakiran. Adapun lokasi rapat adalah bertempat di kantor Pengurus PKK Desa Soreang.

- c. Menyatakan komitmen untuk mengungkapkan janji hati  
Tim Kerja Masyarakat menyatakan komitmen untuk menjalankan program ini dengan mengungkapkan janji hati, sebagai bentuk komitmen agar mau bekerja sama menyelesaikan program ini.
- d. Membuat proposal kegiatan dan keperluan surat menyurat  
Menyusun proposal kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Soreang dan pembuatan surat kepada sasaran penerima manfaat, serta pihak-pihak yang dapat mendukung terlaksananya program.
- e. Mengirimkan proposal  
Penyampain proposal kepada pemerintah Desa Soreang.
- f. Mempersiapkan alat-alat dan perlengkapan yang dibutuhkan
- g. Tim Kerja Masyarakat mempelajari kembali mekanisme kepesertaan PBI-JK dan mempersiapkan kebutuhan pendataan

## 2) Pelaksanaan

- a) Pendataan dan penyuluhan kepada masyarakat fakir miskin yang belum menjadi peserta PBI-JK

Kegiatan ini akan berlangsung selama dua minggu. Kegiatan pendataan akan dilaksanakan di setiap RW melalui anggota TKM yang bertugas sebagai fasilitator. Fasilitator akan meminta data dari setiap RT di RW tersebut data masyarakat fakir miskin yang belum memiliki PBI-JK, kemudian melakukan kunjungan langsung ke rumah masyarakat untuk memberikan penyuluhan sekaligus informasi kepada mereka mengenai hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kebutuhan pengajuan PBI-JK. Selama dua minggu tersebut, masyarakat fakir miskin diminta untuk menyiapkan keperluan berkas untuk pengajuan PBI-JK.

- b) Pendampingan dan fasilitasi pengajuan kepesertaan PBI-JK

Pada minggu selanjutnya, fasilitator akan melakukan pendampingan kepada masyarakat, fasilitator mengumpulkan berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh masyarakat fakir miskin. Kemudian, fasilitator akan mengumpulkan datanya ke puskesmas dan tahap selanjutnya fasilitator menginformasikan kepada masyarakat mengenai update pengajuan berkas.

## 3) Pengakhiran

- a) Evaluasi kegiatan

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan program. Evaluasi dilaksanakan dengan penyebaran angket kepada sasaran program setelah semua pengajuan kepesertaan PBI-JK dilaksanakan.

- b) Pembuatan laporan pertanggungjawaban

Setelah terlaksananya evaluasi, praktikan bersama TKM membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada pihak Desa.

- c) Pembubaran Tim Kerja Masyarakat

Setelah semua kegiatan dilaksanakan, Tim Kerja Masyarakat akan dibubarkan oleh praktikan.

## **B. Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial**

### **1. Gambaran Umum Masalah**

Desa Soreang merupakan salah satu desa yang terletak di kota kecamatan, dengan luas wilayah seluas 243.030 ha<sup>2</sup>. Secara administratif, wilayah Desa Soreang terbagi menjadi 4 dusun, 24 RW dan 94 RT. Dengan luas wilayah yang cukup luas, jumlah penduduk di Desa Soreang adalah 19.415 jiwa dan mayoritas penduduk di Desa Soreang bekerja pada sektor informal yaitu, sebagai buruh dan wiraswasta di bidang konveksi.

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desa Soreang, masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah yaitu termasuk dalam desil 1-3 sejumlah 2500 orang. Sebagai salah satu upaya penghapusan kemiskinan ekstrem yang terjadi di Desa Soreang, pemerintah desa sudah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial baik itu program pemerintah pusat, daerah, maupun program pemerintah desa. Program bantuan sosial yang sudah diterima masyarakat diantaranya adalah program BLT Dana Desa, BPNT, KUBE, dan juga PKH. Beberapa program tersebut tentunya ditujukan kepada masyarakat yang berada pada tingkat kesejahteraan yang rendah. Dalam pelaksanaannya, di Desa Soreang sendiri sudah memberikan bantuan sosial yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi pada kondisi di lapangan, masih ditemui permasalahan dalam program-program bantuan sosial itu sendiri. Adapun permasalahan yang ditemui praktikan di masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya keswadayaan masyarakat dalam menyukseskan program bunga desa RUTILAHU
- b. Ketidapatuhan KPM dalam menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH pada layanan kesehatan
- c. Hilangnya sistem controlling dalam mengontrol pemanfaatan dana bantuan PKH pendidikan pada KPM
- d. Penyelenggaraan PUB dan penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatan yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku
- e. Kurang optimalnya pengelolaan bantuan Said Naum karena kesibukan bisnis
- f. Rendahnya keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan bantuan sosial berbasis masyarakat pada program Bank Sampah
- g. Kurang tepatnya pemanfaatan oleh penerima manfaat pada Program Indonesia Pintar

Dari berbagai permasalahan di atas, praktikan tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen layanan kesehatan. Dalam Data Peserta PKH Desa Soreang, jumlah peserta PKH di Desa Soreang sebanyak 248 Keluarga Penerima Manfaat. PKH adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan khususnya memutus rantai kemiskinan melalui bantuan sosial kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan melalui komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Di Desa Soreang, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui komponen kesehatan sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan PKH yaitu, memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bagi ibu hamil dan anak usia dini (balita) dalam memanfaatkan fasilitas/pelayanan kesehatan. Terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada komponen kesehatan, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setelah menerima dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) harus memanfaatkannya sesuai dengan kewajiban yang sudah ditetapkan yaitu melaksanakan pola hidup sehat, hal ini diterapkan dengan pemberian makanan dengan gizi seimbang dan wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan. Kondisi ini sudah diimplementasikan dengan baik oleh sebagian besar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Soreang, tetapi masih terdapat pula Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mampu memanfaatkan dana bantuan sosial PKH dengan maksimal dan belum menaati kewajibannya sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Para pendamping PKH telah berupaya mengatasi hal tersebut dengan menyampaikan hak dan kewajiban sebagai KPM dan menumbuhkan motivasi pada KPM untuk dapat memanfaatkan dana bantuan PKH dengan semestinya.

Apabila kondisi tersebut terus terjadi, hal ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, memutus rantai kemiskinan antargenerasi karena untuk keluar dari kemiskinan, masyarakat harus memiliki kecerdasan dan kesehatan yang baik. Maka dari itu, praktikan tertarik untuk mengkaji pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen kesehatan di Desa Soreang, dengan harapan agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat

melaksanakan kewajibannya yang akan mendukung tercapainya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Konsep Bantuan Sosial**

Menurut ILO, skema bantuan sosial merupakan bantuan yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya minimum bagi individu dan rumah tangga yang hidup di bawah standar penghasilan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek kontribusi individu dan rumah tangga penerimanya.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap risiko sosial.

Pelaksanaan bantuan sosial meliputi rehabilitasi sosial; pemberdayaan sosial; perlindungan dan jaminan sosial; dan penanganan fakir miskin. Adapun jenis bantuan sosial terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Bantuan Langsung  
Bantuan sosial ini dapat berupa tunai maupun barang.
- 2) Penyediaan Aksesibilitas
- 3) Penguatan Kelembagaan

Sasaran dari bantuan sosial adalah anggota/kelompok masyarakat (individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari kondisi krisis sosial, ekonomi, politik, maupun bencana) dan lembaga non pemerintahan di bidang Pendidikan, keagamaan maupun bidang lain yang memiliki peran dalam perlindungan terhadap individu, kelompok, ataupun masyarakat dari kemungkinan mengalami risiko sosial.

Sumber dana bantuan sosial adalah berasal dari negara, hibah, dan masyarakat. Sumber dana bantuan sosial dari negara adalah berasal dari APBN dan APBD, hibah adalah bantuan dari luar negeri ataupun pihak swasta (CSR), sedangkan sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu termasuk sumbangan (pengumpulan uang dan barang), undian (pajak undian berhadiah), dan berasal dari kearifan local seperti beas jimpitan. Dalam penyaluran bantuan sosial dilaksanakan dengan menerapkan prinsip berikut:

1) Selektif

Pemberian bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

2) Memenuhi Persyaratan

Penerima bantuan sosial harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

3) Bersifat Tidak Terus Menerus

Pemberian bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) Sesuai Tujuan Penggunaan

Tujuan penggunaan bantuan sosial mencakup rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

Tujuan bantuan sosial meliputi pemberdayaan sosial yang meliputi bantuan untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil dan/atau perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang masuk kategori risiko sosial; rehabilitasi sosial meliputi bantuan untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.; perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan untuk program keluarga harapan, korban bencana alam, dan/atau korban bencana sosial; dan penanganan fakir miskin meliputi bantuan untuk bantuan sosial pangan, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, dan/atau bantuan sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

**b. Konsep Program Keluarga Harapan (PKH)**

Wujud program bantuan sosial yang termasuk dalam perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2019 adalah melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan. PKH merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Menurut Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 sebagai upaya dalam menggurangi kemiskinan, Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut. PKH memiliki tujuan utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi yang dilaksanakan melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.

Sasaran Program Keluarga Harapan yaitu keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Adapun penjelasan mengenai komponen Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- 1) Komponen Kesehatan  
Kriteria penerima PKH komponen kesehatan adalah sebagai berikut:
  - a) Ibu hamil/nifas/menyusui  
Ibu hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah

kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui

b) Anak usia dini

Anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun yang belum bersekolah.

2) Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen Pendidikan adalah anak usia sekolah dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat SD/Mi sederajat atau SMP/MTs sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

3) Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

a) Lanjut usia

Seseorang yang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b) Penyandang disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri, tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

Sebagai penerima manfaat dari PKH, terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada KPM. Menurut Prof. Dr. Notonegoro, hak adalah kekuasaan atau kemampuan seseorang untuk melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh seseorang. Sementara kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- 1) memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- 2) mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- 3) Komponen Kesejahteraan Sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti

kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali;

- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan;
- 5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*);
- 6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi. Mekanisme sanksi ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- 1) Bantuan Sosial PKH;
- 2) pendampingan PKH;
- 3) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- 4) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah dilaksanakan dengan tahapan-tahapan berikut:

- 1) Perencanaan;
- 2) Penetapan calon peserta PKH;
- 3) Validasi data calon penerima manfaat PKH;
- 4) Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- 5) Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
- 6) Pendampingan PKH;
- 7) Peningkatan Kemampuan Keluarga;
- 8) Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- 9) Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
- 10) Transformasi Kepesertaan PKH.

Sumber pendanaan PKH adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Provinsi (APBD), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Kepesertaan PKH tidak bersifat permanen, Kepesertaan penerima bantuan PKH selama enam tahun selama mereka masih memenuhi persyaratan yang ditentukan, apabila tidak ada lagi persyaratan yang mengikat maka mereka harus keluar secara alamiah (*Natural Exit*). Untuk peserta PKH yang tidak keluar

alamiah, setelah enam tahun diharapkan terjadi perubahan perilaku terhadap peserta PKH dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan status sosial ekonomi. Pada tahun kelima kepesertaan PKH akan dilakukan Resertifikasi. Resertifikasi adalah kegiatan pendataan ulang yang dilakukan pada tahun kelima kepesertaan rumah tangga dengan menggunakan metode tertentu.

**c. Konsep Pertemuan Kelompok dan P2K2**

Sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan PKH menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM, serta sarana untuk mengawasi/monitoring pemanfaatan dana bantuan PKH adalah melalui kegiatan pendampingan baik itu pendampingan secara individu/perorangan, tetapi juga pendampingan kelompok. Pendampingan kelompok dilaksanakan melalui kegiatan Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Adapun penjelasan mengenai kegiatan Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah sebagai berikut:

1) Pertemuan Kelompok (PK)

Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin yang difasilitasi oleh pendamping sosial untuk pelaksanaan tugas yang bersifat administrative dan edukatif dengan memberikan informasi terkait tata tertib dan aturan PKH, serta akses terhadap layanan kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan dari KPM PKH.

2) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat terjadinya perubahan perilaku pada KPM PKH. Materi P2K2 wajib disampaikan oleh pendamping sosial PKH kepada seluruh kelompok KPM PKH dampingannya dan menjadi salah satu bentuk verifikasi komitmen bagi KPM PKH.

Secara umum, P2K2 bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pengasuhan dan Pendidikan anak, kesehatan, pengelolaan keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial dalam lingkup keluarga, sehingga mendorong terciptanya percepatan perubahan perilaku. Komponen dalam P2K2 adalah meliputi:

1) Modul P2K2

Modul pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan keterampilan hidup KPM PKH dengan fokus utamanya di bidang ekonomi, Pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, perlindungan anak dan kesejahteraan sosial serta modul lainnya yang mendukung pelaksanaan PKH.

2) Bahan Ajar

Bahan ajar berupa buku, modul, buku pintar, flipchart, poster, dan brosur dan alat lainnya untuk mendukung penyampaian P2K2.

3) Waktu Pelaksanaan P2K2

P2K2 dilaksanakan setiap bulan selama masa kepesertaan KPM PKH.

Kegiatan P2K2 dikecualikan apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*).

**d. Konsep Pendamping PKH**

Pendamping menurut Direktorat bantuan sosial merupakan suatu proses memberikan kemudahan kepada kliennya dalam mengidentifikasi kebutuhan ataupun dalam memecahkan suatu permasalahan dan mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian dapat diwujudkan. Pendamping dalam PKH diperlukan untuk mempercepat proses pencapaian salah satu tujuan PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan kesejahteraan sosial. Pendamping PKH bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Adapun tugas dari pendamping PKH sebagai adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran
- 2) Melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap sebulan
- 3) Memfasilitasi keluarga penerima manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi ekonomi, energi, perusahaan dan pemenuhan kebutuhan dasar lain

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah terkait pemanfaatan dana bantuan sosial PKH pada layanan kesehatan oleh Keluarga Penerima Manfaat di Desa Soreang, praktikan menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada beberapa *key person* yaitu, Puskesmas Desa Soreang, pendamping PKH Desa Soreang, Fasilitator, dan ketua kelompok PKH. Selain itu, praktikan juga melakukan wawancara dengan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki balita sebagai *sample*. Kemudian, dari hasil wawancara tersebut praktikan menentukan penyebab masalah, dampak masalah, dan fokus masalah dengan menggunakan *tools* pekerjaan sosial “teknologi pohon masalah”.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Pak Iyus selaku Sekretaris Puskesmas dan Pak Rohman selaku Kepala Urusan Bidang Kesejahteraan Sosial pada tanggal 23 Februari 2023

Melalui wawancara ini, praktikan mendapatkan informasi mengenai bentuk-bentuk bantuan sosial yang diterima masyarakat Desa Soreang, bantuan sosial tersebut diantaranya BPNT, PKH, BLT-DD, KIP, Bantuan Sosial Karang Taruna.

- 2) Wawancara dengan Ibu Wilma selaku Pendamping PKH di Desa Soreang pada tanggal 3 dan 9 Maret 2023

Hasil dari wawancara ini adalah praktikan mendapat informasi bahwasannya jumlah KPM PKH dari data terakhir Januari 2022 adalah 293 KPM, tetapi KPM yang menerima dana bantuan PKH pada tahap 4 adalah sebanyak 248 KPM. Terkait layanan kesehatan pada PKH adalah terhubung dengan posyandu, kemudian apabila posyandu tersebut tidak menghubungkan KPM ke akses kesehatan, KPM tidak dapat menerima bantuan sosial PKH untuk balita atau layanan kesehatan. Pendamping PKH juga menyampaikan bahwa pada setiap kegiatan P2K2, pendamping selalu menyampaikan hak dan kewajiban para KPM, salah satunya adalah kewajiban untuk mengalokasikan dana bantuan PKH kesehatan untuk kebutuhan balita berupa keperluan susu, asupan makanan tambahan, vitamin, dan obat-obatan. Namun, kondisi nyata di lapangan masih terdapat KPM yang belum memanfaatkan dana bantuan PKH dengan maksimal dan kebutuhan seharusnya. Mengenai pengawasan pendamping PKH terhadap KPM akan penggunaan dana

bantuan PKH adalah melalui laporan secara lisan oleh para KPM setiap dilaksanakannya P2K2. Selain itu, pendamping selalu memberi motivasi kepada KPM agar dapat memanfaatkan bantuan dengan semestinya dan mengingatkan akan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh KPM PKH.

- 3) Wawancara dengan Ibu Suliyani selaku Ketua Kelompok PKH di RW 10 Desa Soreang pada tanggal 9 Maret 2023.

Melalui wawancara ini, praktikan mendapat informasi mengenai tugas-tugas sebagai ketua kelompok PKH di RW 10, bahwasannya ketua bertugas mengumpulkan tanda terima bantuan KPM dari anggotanya ketika dana bantuan PKH cair dan kemudian disetorkan kepada pendamping PKH. Selain itu, praktikan juga menggali informasi mengenai laporan-laporan KPM akan pemanfaatan dana bantuan PKH, bahwasannya KPM di RW 10 sebagian besar sudah menggunakan dana bantuan dengan semestinya, yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan perawatan kesehatan seperti imunisasi. Namun, terkadang karena kebutuhan yang mendesak, para KPM harus berhutang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dan membayarnya ketika sudah menerima dana bantuan PKH. Ketua kelompok PKH RW 10 juga menyampaikan bahwa partisipasi Ibu Patimah sebagai satu-satunya KPM yang memiliki balita, disiplin dalam mengikuti kegiatan posyandu dan kegiatan P2K2 setiap bulannya.

- 4) Wawancara dengan Ibu Patimah selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memiliki balita di RT 04/RW 10 pada tanggal 10 Maret 2023

Ibu Patimah merupakan satu-satunya KPM PKH di RW 10 yang saat ini memiliki balita. Beliau bekerja sebagai buruh penjahit membantu suaminya di sela-sela mengasuh anaknya. Sang anak yang masih balita berusia 3 tahun 3 bulan. Ibu Patimah sudah menjadi penerima PKH sejak tahun 2017, selama 5 tahun menjadi peserta PKH ia selalu hadir dalam kegiatan P2K2 dan merasa bersyukur dengan bantuan PKH yang sudah cukup membantu kebutuhan sehari-harinya. Sejak memiliki balita, ia rajin memeriksakan anaknya ke posyandu dengan tujuan mengontrol pertumbuhan sang anak sekaligus melaksanakan kewajibannya sebagai penerima PKH. Untuk kebutuhan imunisasi anak, ia membayar secara mandiri ke dokter dan itu menggunakan uang dana bantuan PKH. Beliau memanfaatkan dana bantuan PKH untuk membeli kebutuhan

susu, *pampers*, dan makanan sehari-hari untuk keluarganya. Dari dana bantuan PKH yang ia terima, ia merasa bersyukur dan selalu mengelolanya agar dapat mencukupi kebutuhan padahal sebenarnya tidak cukup.

- 5) Wawancara dengan Ibu Nani selaku Ketua Kelompok KPM di RW 07 dan RW 08 pada tanggal 14 Maret 2023.

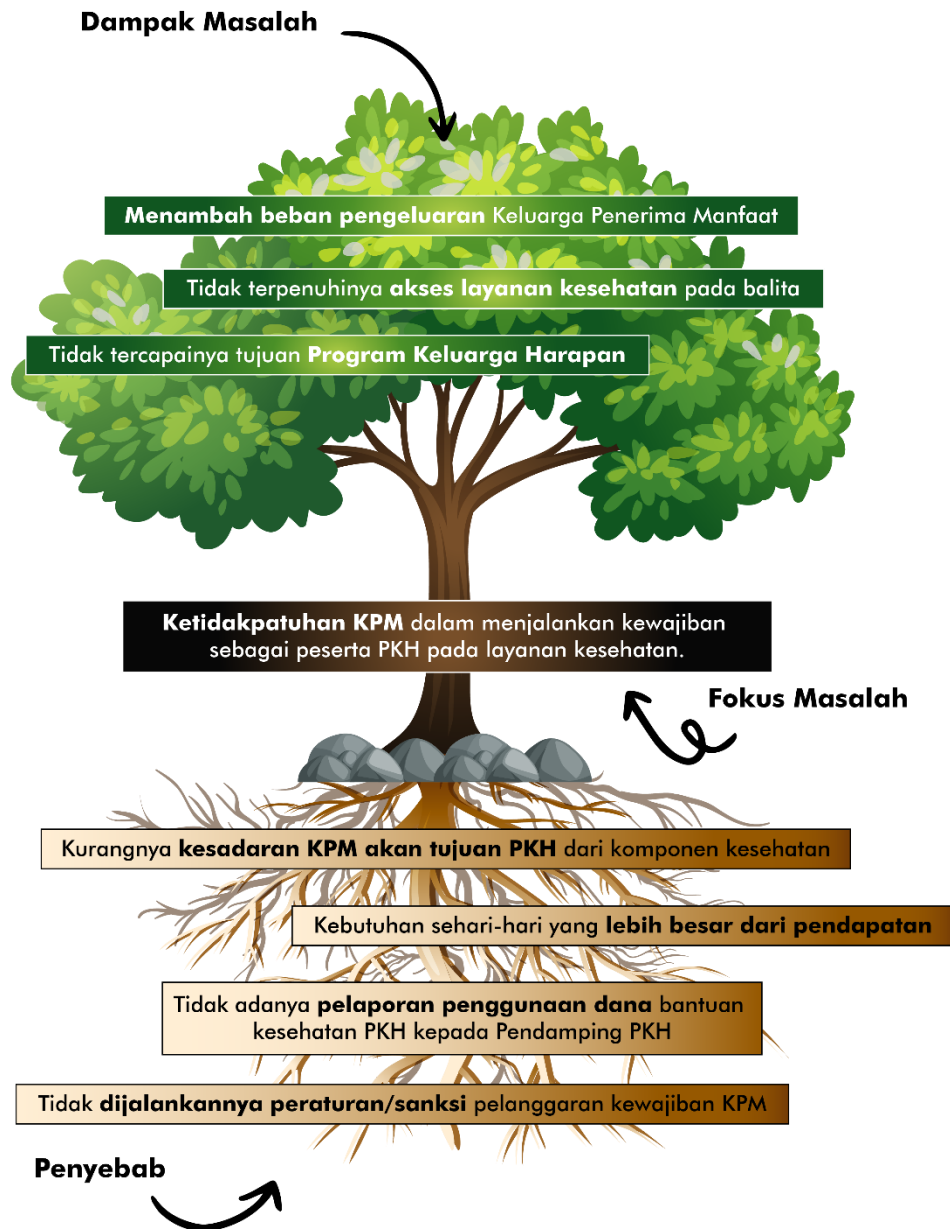
Ibu Nani merupakan ketua kelompok KPM PKH di RW 07 dan RW 08, beliau memiliki 5 anak dan sudah menjadi peserta PKH sejak tahun 2017, tetapi saat ini bantuan sosial PKH yang diterima hanyalah untuk 1 balitanya senilai RP750.000,- setiap tahapnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nani, beliau bercerita bahwasannya selama menjadi ketua kelompok, sering mendapat keluhan-keluhan dari anggota kelompoknya jika bantuan PKH belum cair/tidak cair tepat waktu. Beliau juga menyampaikan bahwa seluruh anggota kelompoknya mudah untuk bekerja sama, terutama ketika terdapat kebutuhan administratif yang harus dikumpulkan. Namun, dari penuturan beliau mengenai pemanfaatan dana bantuan PKH, masih terdapat KPM di kelompoknya yang terkadang memanfaatkan dana bantuan PKH untuk membayar hutang. Hal ini dilakukan dengan alasan pendapatan sehari-hari yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan akhirnya mereka memanfaatkan dana PKH untuk membayar hutang. Selain itu, berkaitan dengan kewajiban menghadiri P2K2 dan Posyandu, masih terdapat pula KPM yang tidak disiplin dalam menjalankannya. Beberapa permasalahan yang ditemui di kelompok tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Terdapat KPM yang jarang memeriksakan anaknya (balita) ke posyandu dengan alasan harus bekerja.
- b) Terdapat KPM yang sudah hampir 1 tahun tidak memeriksakan anaknya (balita) ke posyandu karena pindah tempat tinggal, tetapi bantuan PKH nya masih cair di Desa Soreang.
- c) Terdapat KPM yang jarang menghadiri P2K2 maupun Pertemuan Kelompok (PK) dengan alasan bekerja

Dari hasil beberapa wawancara di atas, isu permasalahan yang dapat diidentifikasi di Desa Soreang terkait sumber dana bantuan sosial adalah masih terdapat keluarga penerima manfaat yang belum patuh dalam menjalankan kewajiban Program Keluarga Harapan pada komponen kesehatan. Hal

ini termasuk dalam pemanfaatan dana bantuan PKH yang kurang maksimal dan kurangnya kedisiplinan dalam mengikuti posyandu dan P2K2. Untuk mengetahui penyebab dan dampak dari isu tersebut, praktikan menggunakan teknologi “pohon masalah” sebagai berikut:



Gambar 2.2. 1 Pohon Masalah Isu Sumber Dana Bantuan Sosial

- 1) Penyebab Masalah
  - a) Kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat akan tujuan Program Keluarga Harapan dari komponen kesehatan.

Masih terdapat KPM yang belum memiliki kesadaran bahwa rutin memeriksakan kesehatan balita melalui posyandu adalah untuk mengontrol kesehatan anak dan memanfaatkan dana bantuan PKH dengan tepat adalah untuk mendukung kesehatan anak yang merupakan tujuan PKH dari komponen kesehatan.

- b) Kebutuhan sehari-hari yang lebih besar dari pendapatan. Kebutuhan hidup setiap KPM adalah berbeda-beda dan pendapatan mereka terkadang tidak dapat mencukupi kebutuhan.
  - c) Tidak adanya pelaporan penggunaan dana bantuan kesehatan PKH kepada Pendamping PKH  
Pendamping PKH hanya menerima laporan bahwa KPM telah menerima dana bantuan yaitu, dengan melampirkan foto ketika sedang berada di ATM dan menandatangani laporan penerimaan, tetapi untuk laporan penggunaan dana bantuan PKH hanya dilaporkan secara lisan setiap P2K2 tanpa disertai bukti fisik.
  - d) Tidak dijalankannya peraturan/sanksi pelanggaran kewajiban KPM  
Peraturan mengenai sanksi bagi KPM yang melanggar kewajiban berupa pemotongan bantuan saat ini sudah tidak dijalankan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi KPM yang melanggar kewajiban.
- 2) Dampak Masalah
- a) Menambah beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat  
KPM yang tidak memanfaatkan dana bantuan PKH dengan tepat dan sesuai kebutuhan akan menambah beban pengeluaran keluarga karena jika mereka berhutang, terdapat bunga yang harus dibayarkan.
  - b) Tidak terpenuhinya akses layanan kesehatan pada balita  
Akses layanan kesehatan diberikan pada balita melalui posyandu dan penyampaian materi mengenai pengasuhan anak melalui P2K2 menjadi tidak terpenuhi.
  - c) Tidak tercapainya tujuan Program Keluarga Harapan  
KPM yang melanggar kewajiban akan mempengaruhi tercapainya tujuan dari Program Keluarga Harapan.

### 3) Fokus Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, permasalahan yang menjadi fokus praktikan adalah ketidakpatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalankan kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada layanan kesehatan.

Kondisi tersebut tergambar dalam implementasi pelaksanaan alokasi dana bantuan PKH terhadap kesehatan dan partisipasi keluarga penerima manfaat dalam posyandu dan kegiatan P2K2 yang diadakan setiap bulannya. Beberapa kasus yang ditemukan praktikan adalah adanya keluarga penerima manfaat yang mengalokasikan dana bantuan kesehatan yang diterima untuk membayar hutang. Hal tersebut ia lakukan karena pendapatannya yang tidak mencukupi kebutuhannya sehingga membuat ia harus berhutang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini terjadi juga disebabkan oleh kurangnya kemampuan manajemen keuangan yang baik pada keluarga penerima manfaat. Karena dana bantuan PKH untuk membayar hutang, terkadang kebutuhan tambahan seperti, vitamin untuk anak jadi tidak terpenuhi dan hanya cukup untuk kebutuhan pokok saja. Selain itu, terdapat masyarakat yang tidak disiplin dalam memeriksakan balitanya ke posyandu. Selain itu, masih terdapat pula Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terkadang tidak menghadiri kegiatan P2K2 dengan berbagai alasan. Padahal dalam kegiatan P2K2 menjadi wujud komitmen KPM dalam PKH dan pada kegiatan tersebut juga disampaikan materi/ilmu mengenai pola asuh anak yang benar dan beberapa penyuluhan yang mendukung kesehatan anak (balita).

#### **b. Identifikasi Kebutuhan**

Dengan mengetahui penyebab dan dampak masalah yang telah dikaji dalam pohon masalah, untuk menyelesaikan permasalahan ketidakpatuhan keluarga penerima manfaat dalam menjalankan kewajiban Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen kesehatan, kebutuhan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembuatan laporan pengeluaran alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Keluarga Penerima Manfaat

Pembuatan laporan pengeluaran dibuat untuk meningkatkan pengawasan pemanfaatan dana bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH) agar dialokasikan dengan tepat. Sistematika pelaporannya adalah Keluarga Penerima Manfaat diminta untuk mengisi formulir laporan pengeluaran (berwujud kertas) yang dilampiri dengan nota/bukti pembayaran. Laporan pengeluaran ini dikumpulkan setiap 3 bulan sekali dalam kegiatan P2K2. Dalam laporan tersebut, KPM harus melaporkan minimal 50% atau senilai Rp375.000,- dari dana bantuan PKH pada komponen kesehatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan balita. Kebutuhan tersebut termasuk pembelian susu, dan/atau asupan makanan tambahan, dan/atau, diapers (popok balita), dan/atau vitamin, dan/atau obat-obatan, dan/atau kebutuhan pokok balita yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing KPM.

- 2) Pemberian informasi mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada beberapa tahun sebelum pandemi *Covid-19*, dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terdapat sistem sanksi berupa pemotongan dana bantuan sosial jika KPM tidak melaksanakan kewajiban yaitu, menghadiri kegiatan P2K2 ataupun Posyandu. Namun, saat ini aturan tersebut sudah tidak diberlakukan oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan pernyataan Pendamping PKH di Desa Soreang, kondisi ini menjadi celah bagi Keluarga Penerima Manfaat untuk melanggar kewajiban mereka sebagai peserta Program Keluarga Harapan yang memunculkan kecemburuan diantara KPM yang disiplin dan tidak disiplin menjalankan kewajiban karena nominal bantuan yang diterima mereka sama. Selain itu, kondisi ini juga dapat menghambat perubahan perilaku pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Maka dari itu, diperlukan pemberian informasi kembali mengenai hak dan kewajiban KPM pada kegiatan P2K2 yang pertama dijalankan pada tahun 2023 dengan pendamping PKH yang baru. Tujuan pemberian informasi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan menekankan kembali kewajiban dan manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

### c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Sistem sumber yang terdapat di Desa Soreang adalah:

#### 1) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal dalam hal ini termasuk keluarga dari KPM, tetangga terdekat, ketua dan anggota kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap RW.

#### 2) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal dalam hal ini adalah pemerintah Desa Soreang dan Pendamping PKH Desa Soreang.

#### 3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan dalam hal ini adalah Posyandu, Puskesmas Desa Soreang.

## 4. Rencana Intervensi

### a. Latar Belakang

Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan kepada KPM PKH komponen Kesehatan di Desa Soreang, masih terdapat KPM yang belum melaksanakan kewajibannya sebagai KPM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyebab utamanya adalah masih kurangnya kesadaran KPM akan kewajiban mereka sebagai peserta PKH dan belum adanya sistem *controlling* dengan laporan pengeluaran alokasi dana bantuan sosial PKH (laporan fisik) kepada pendamping PKH.

Maka dari itu, diperlukan program peningkatan kesadaran dan pembuatan laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH dengan memberikan sosialisasi kepada KPM mengenai kewajiban Peserta PKH dan pelaksanaan sistem laporan pengeluaran. Program ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem sumber informal yaitu, sesama anggota kelompok KPM dan ketua kelompok KPM di setiap RW untuk dapat saling mengingatkan akan kewajiban dan melaporkan alokasi dana bantuan sosial yang diterima dari PKH. Selanjutnya, sistem sumber formal dalam program ini dapat berperan dengan memberikan sosialisasi terkait kewajiban KPM dan sistem pelaksanaan laporan pengeluaran alokasi dana bantuan sosial PKH, sehingga dengan dilaksanakannya program ini dapat meningkatkan kepatuhan KPM dalam melaksanakan kewajiban sebagai peserta PKH dan tercapainya tujuan PKH. Adapun sistem sumber formal yaitu, pendamping PKH dan Pemerintah Desa Soreang.

**b. Tujuan Umum dan Khusus**

Program Peningkatan Pengawasan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam melaksanakan Kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada Komponen Kesehatan memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Peningkatan kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam melaksanakan kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen kesehatan.

2) Tujuan Khusus

a) Meningkatkan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan pentingnya mengalokasikan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tepat dan sesuai kebutuhan yang mendukung kesehatan balita.

b) Meningkatkan transparansi pengelolaan dana bantuan PKH dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pelaporan kepada pendamping PKH.

c) Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pembuatan laporan keuangan.

d) Meningkatkan kedisiplinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan posyandu.

e) Meningkatkan kedisiplinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menghadiri P2K2 sebagai kewajiban KPM PKH.

**c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Nama program yang akan dilaksanakan adalah “KPM Disiplin Lapo”. Program tersebut terdiri dari kegiatan sosialisasi sistem laporan pengeluaran alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemberian informasi mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan sosialisasi sistem laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pengawasan/*monitoring* penggunaan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dimanfaatkan dengan tepat dan sesuai kebutuhan kesehatan balita.

Selain itu, dilaksanakannya pemberian informasi mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan

kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk disiplin dalam menghadiri posyandu dan P2K2 sebagai kewajiban mereka. Melalui hal tersebut, KPM diharapkan dapat menaati kewajiban dalam PKH sehingga tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dapat tercapai.

Tabel 2.2. 1 Rencana Program KPM Disiplin Laporan

No	Kegiatan Penyelesaian Masalah	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Sosialisasi Sistem Laporan Pengeluaran Alokasi Dana Bantuan PKH	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Meningkatkan transparansi dan rasa tanggung jawab atas pengelolaan dana bantuan PKH dari KPM dalam komponen kesehatan</li> <li>. Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan pada KPM melalui laporan pengeluaran.</li> <li>. Menciptakan kesadaran KPM akan pentingnya mengalokasikan dana bantuan PKH dengan tepat dan sesuai kebutuhan yang mendukung kesehatan balita.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPM dapat transparan dan memiliki rasa tanggung jawab atas pengelolaan dana bantuan PKH dalam komponen kesehatan</li> <li>2. KPM memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik</li> <li>3. KPM memiliki kesadaran akan pentingnya mengalokasikan dana bantuan PKH dengan tepat dan sesuai kebutuhan yang mendukung kesehatan balita</li> </ol>	Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Desa Soreang	Praktikan	Pendamping PKH dan Ketua Kelompok KPM di setiap kelompok

2.	Pemberian Informasi tentang Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)	<p>4. Meningkatkan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan pentingnya mengalokasikan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tepat dan sesuai kebutuhan yang mendukung kesehatan balita</p> <p>5. Meningkatkan kedisiplinan KPM dalam mengakses layanan kesehatan posyandu</p> <p>6. Meningkatkan kedisiplinan KPM dalam menghadiri P2K2 sebagai kewajiban KPM PKH.</p>	<p>1. KPM memiliki kesadaran akan pentingnya mengalokasikan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tepat dan sesuai kebutuhan yang mendukung kesehatan balita</p> <p>2. KPM disiplin dalam mengakses layanan kesehatan posyandu</p> <p>3. KPM disiplin dalam menghadiri P2K2 sebagai kewajiban KPM PKH</p>	Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Desa Soreang	Praktikan	Pendamping PKH dan Ketua Kelompok KPM di setiap kelompok
----	--	---	--	---	-----------	--

#### **d. Sistem Partisipan**

Netting (2017) mengatakan bahwa sistem partisipan terdiri atas sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengendali, sistem pelaksana perubahan, sistem sasaran, dan sistem kegiatan. Adapun sistem partisipan dalam rencana intervensi masalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem inisiator (*initiator system*)  
Sistem inisiator merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian adanya masalah dan merasa perlu adanya program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu praktikan sebagai pekerja sosial.
- 2) Sistem agen perubahan (*change agent*)  
Sistem agen perubahan merupakan seseorang atau lembaga yang mengkoordinasikan upaya perubahan atau pemecahan masalah, yaitu pekerja sosial dan pendamping PKH Desa Soreang.
- 3) Sistem klien (*client system*)  
Sistem klien dalam program ini ialah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Soreang, sebagai penerima utama dalam usaha perubahan dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program.
- 4) Sistem pendukung (*support system*)  
Sistem pendukung merupakan pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan dalam penyelesaian masalah yang ada, yaitu Pemerintah Desa Soreang dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
- 5) Sistem pengendali (*controlling system*)  
Sistem pengendali adalah seseorang atau pihak yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas perubahan yang diusulkan tersebut. Dalam program ini yaitu, Kepala Desa Soreang.
- 6) Sistem pelaksana perubahan (*implementing system*)  
Dalam hal ini sistem pelaksana perubahan yaitu, pendamping PKH Desa Soreang dan Ketua Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap RW yang akan mengkoordinasikan usaha perubahan atau penyelesaian masalah.
- 7) Sistem sasaran (*target system*)  
Sistem sasaran merupakan orang/sekumpulan orang-orang yang dijadikan sasaran perubahan yang diharapkan dapat

memengaruhi dan mencapai tujuan pertolongan. Sistem sasaran utama dalam program ini ialah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang patuh menjalankan kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

8) Sistem kegiatan (*action system*)

Sistem kegiatan merupakan orang-orang yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan perubahan. Dalam program ini yaitu, pendamping PKH dan ketua kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap RW.

**e. Metode dan Teknik**

Metode pekerjaan sosial yang akan digunakan dalam pelaksanaan program KPM Disiplin Lapor adalah *Community Organization And Community Development (COCD)*. COCD sebagai metode pekerjaan sosial dengan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial masyarakat secara umum dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara khusus.

Menurut Edi Suharto (2010:37) *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Secara singkat *community development* adalah suatu cara kerja untuk memecahkan masalah masyarakat. Dengan demikian penggunaan dari kedua metode ini dalam tahap pemahaman serta analisis masalah di masyarakat dimana *community organization* adalah sebagai metode intervensi yang ditekankan terhadap pemecahan masalah, sedangkan *community development* adalah sebagai proses interaksi sosial yang penekanannya terhadap perubahan sosial.

Teknik yang akan digunakan dalam program ini adalah penyuluhan dan edukasi.

1) Penyuluhan

Lucia (2005) : Penyuluhan dalam arti umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, penyuluhan sosial sebagai suatu proses sosial dan interaksi sosial perubahan

perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam program ini, penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan pentingnya mengalokasikan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tepat dan sesuai kebutuhan yang mendukung kesehatan balita, serta meningkatkan kedisiplinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalankan kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

## 2) Edukasi

Mubarak dan Chayatin (2009): Edukasi adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tidak hanya dari segi teori dan prosedur dari orang ke orang lain, melainkan juga perubahan terjadi karena menimbulkan kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri. Dalam program ini, edukasi yang akan diberikan adalah edukasi mengenai pembuatan laporan pengeluaran alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Soreang.

### **f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan**

Sebelum melaksanakan program, perlu dilakukan penyusunan rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Adapun rincian rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 2.2. 2 RAB Program KPM Disiplin Laporan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Administrasi</b>					
1.	Proposal Pengajuan	20	Lembar	1.000	20.000
2.	Surat Menyurat	30	Lembar	1.000	30.000
3.	Amplop	24	Lembar	2.000	48.000
4.	ATK	1	Pack	30.000	30.000
5.	Formulir Laporan Pengeluaran	248	Lembar	500	124.000
<b>Jumlah</b>					<b>252.000</b>
<b>Logistik</b>					
6.	Brosur	300	Lembar	2.000	600.000
7.	Banner	1	Buah	150.000	150.000
<b>Jumlah</b>					<b>750.000</b>
<b>Konsumsi</b>					
8.	Snacks Peserta	25	Paket	25.000	625.000
<b>Jumlah</b>					<b>625.000</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					<b>1.597.000</b>

Rincian alat-alat yang dibutuhkan dalam Program KPM Disiplin Laporan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. 3 Kebutuhan Alat Program KPM Disiplin Laporan

No	Alat	Satuan	Jumlah
1.	Sound System	Buah	1
2.	Microphone	Buah	2
3.	Proyektor	Buah	1
4.	Laptop	Buah	1
5.	Banner	Buah	1
6.	Meja	Buah	2
7.	Kursi	Buah	260

**g. Analisis Kelayakan Program**

Analisis uji kelayakan dilakukan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari program yang akan dilaksanakan. Berikut matriks analisis kelayakan program (analisis SWOT):

Tabel 2.2. 4 Analisis SWOT Program KPM Disiplin Lapor

<b>Internal</b>	<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja sama yang kuat antara pendamping PKH dan ketua kelompok KPM di tiap RW</li> <li>2. Ketersediaan KPM untuk melaksanakan laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH</li> <li>3. Adanya keinginan para KPM untuk melakukan perubahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pengetahuan KPM PKH tentang pengelolaan dana bantuan</li> <li>2. Kurangnya kesadaran KPM PKH akan pentingnya menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH</li> </ol>
<b>Eksternal</b>	<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Strategi SO</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dari Pemerintah Desa Soreang dan Dinas Sosial</li> <li>2. Kemauan dari ketua kelompok KPM untuk ikut menyosialisasikan program kepada para KPM</li> <li>3. Pendamping PKH menyadari adanya permasalahan pengelolaan dana dan pelanggaran kewajiban KPM PKH</li> </ol>	<b>Strategi WO</b>
	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>	<b>Strategi ST</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulit untuk mengawasi kebenaran laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KPM diminta untuk melampirkan nota sebagai bukti pembelian/pembayaran yang nantinya dikumpulkan saat P2K2 bersamaan dengan laporan pengeluaran</li> </ol>
		<b>Strategi WT</b>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkan rasa bersyukur dan tanggung jawab akan pengelolaan dana bantuan kepada KPM PKH</li> </ol>

Program ini layak untuk dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mengatasi hambatan yang ada. *Strength (S)* lebih besar daripada *Weakness (W)* dan *Opportunity (O)* lebih besar daripada *Threats (T)*.

**h. Jadwal dan Langkah-langkah**

Program akan berjalan dengan sistematis dan teratur dengan dilakukannya penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan program dengan tepat waktu.

Tabel 2.2. 5 Jadwal Kegiatan Program KPM Disiplin Laporan

Langkah Kegiatan	April			Juli	
	Minggu Ke				
	1	2	3	1	2
<b>1. Persiapan</b>					
Membentuk kepanitiaan					
Melakukan rapat konsep kegiatan dan penjadwalan kerja bersama					
Menyatakan komitmen untuk mengungkapkan janji hati					
Membuat proposal kegiatan dan keperluan surat menyurat					
Menyusun formulir laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH untuk KPM dan materi untuk sosialisasi					
Membagikan surat undangan kepada KPM PKH dan surat peminjaman ke desa					
Menyiapkan tempat dan alat-alat yang dibutuhkan					
<b>2. Pelaksanaan</b>					
Pemberian Informasi tentang Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)					
Sosialisasi Sistem Laporan Pengeluaran Alokasi Dana Bantuan PKH					
Menyatakan komitmen untuk mengikuti sistematika laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH					
Pembagian formulir laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH					
<b>3. Pengakhiran</b>					
Evaluasi kegiatan					
Pembuatan laporan pertanggungjawaban					
Pembubaran panitia					

Berdasarkan matriks di atas, kegiatan dilaksanakan melalui tiga (3) tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

1) Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan pada bulan April minggu pertama dan kedua dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Membentuk Kepanitiaan

Kepanitiaan ini terdiri dari pekerja sosial (praktikan) selaku koordinator dan pendamping PKH Desa Soreang sebagai pelaksana yang bekerja sama dengan Ketua Kelompok KPM PKH di setiap RW.

b) Melakukan Rapat Konsep Kegiatan dan Penjadwalan Kerja Bersama

Pelaksanaan rapat diadakan untuk membahas konsep sosialisasi yang akan dilakukan. Konsep sosialisasi yang akan dilakukan adalah dimulai dengan pemberian informasi tentang kewajiban Keluarga Penerima Manfaat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi sistem laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH dan pernyataan komitmen dari KPM untuk melaksanakan sistem tersebut, dan diakhiri dengan pembagian formulir laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH.

c) Menyatakan Komitmen Untuk Mengungkapkan Janji Hati

Panitia menyatakan komitmen untuk menjalankan program ini dengan mengungkapkan janji hati, sebagai bentuk komitmen agar mau bekerja sama menyelesaikan program ini.

d) Membuat Proposal Kegiatan Dan Keperluan Surat Menyurat

Menyusun proposal kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Soreang dan pembuatan surat kepada sasaran penerima manfaat, serta pihak-pihak yang dapat mendukung terlaksananya program.

e) Menyusun Formulir Laporan Pengeluaran Alokasi Dana Bantuan PKH dan Materi untuk Sosialisasi

Pendamping PKH menyusun format formulir laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH untuk disosialisasikan dan dibagikan kepada KPM. Selain itu, pendamping PKH menyusun materi untuk sosialisasi.

- f) Membagikan Surat Undangan Kepada KPM PKH dan Surat Peminjaman ke Desa  
Panitia membagikan surat undangan pelaksanaan Program KPM Disiplin Lapor kepada KPM PKH dan surat peminjaman alat-alat yang dibutuhkan kepada kantor desa untuk mendukung berlangsungnya kegiatan.
  - g) Menyiapkan Tempat dan Alat-Alat yang Dibutuhkan  
Panitia mempersiapkan kebutuhan alat-alat yang dibutuhkan dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialiasi.
- 2) Pelaksanaan
- Program KPM Disiplin Lapor dilaksanakan pada bulan April minggu ketiga dan dilaksanakan di Aula Desa Soreang dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- a) Pemberian Informasi tentang Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)  
Rangkaian program diawali dengan pemberian informasi tentang kewajiban KPM sebagai peserta PKH melalui edukasi. Pembicara dalam kegiatan ini adalah Pendamping PKH Desa Soreang. Sasaran dari program ini adalah seluruh KPM PKH di Desa Soreang khususnya adalah KPM yang kurang memiliki rasa tanggung jawab atas kewajiban yang harus mereka laksanakan.
  - b) Sosialisasi Sistem Laporan Pengeluaran Alokasi Dana Bantuan PKH  
Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi sistem laporan pengeluaran alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kegiatan ini disampaikan oleh Pendamping PKH Desa Soreang dengan dibantu oleh para Ketua Kelompok KPM PKH di setiap RW. Adapun formulir laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH *terlampir*.
  - c) Menyatakan Komitmen untuk Mengikuti Sistematika Laporan Pengeluaran Alokasi Dana Bantuan PKH  
Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyatakan komitmennya untuk mengikuti sistematika laporan pengeluaran alokasi dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
  - d) Pembagian Formulir Laporan Pengeluaran Alokasi Dana Bantuan PKH

Para ketua kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membagikan formulir laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH ke anggota kelompoknya masing-masing. Formulir laporan yang dibagikan adalah berwujud kertas untuk mempermudah KPM dalam pengisiannya, sebab beberapa dari KPM tidak memiliki *smartphone* jika mereka diminta untuk mengisi laporan melalui *smartphone*. Kemudian formulir tersebut dibawa pulang oleh KPM dan nantinya dikumpulkan saat P2K2 pada bulan ketiga setelah KPM menerima dana bantuan PKH dengan melampirkan nota sebagai bukti pembelian/pembayaran.

### 3) Pengakhiran

Tahap yang terakhir dilaksanakan pada bulan Juli minggu pertama dan kedua yaitu, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

#### a) Evaluasi Kegiatan

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan program. Evaluasi dilaksanakan dengan penyebaran angket kepada sasaran program yaitu seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan saat P2K2 pada bulan ketiga (Juli) setelah KPM menerima dana bantuan PKH.

#### b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Setelah terlaksananya evaluasi, praktikan bersama seluruh panitia membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada pihak Desa.

#### c) Pembubaran Panitia

Setelah semua kegiatan dilaksanakan, panitia Program KPM Disiplin Lapor dibubarkan.

## C. Profil Pemberdayaan Sosial

### 1. Gambaran Umum Masalah

Pemberdayaan sosial sebagai bentuk dari perlindungan sosial yang dilakukan untuk memberikan kekuatan dan kemampuan khususnya kepada kelompok rentan. Pemberdayaan sosial sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan kelompok rentan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Desa Soreang,

terdapat beberapa potensi kesejahteraan sosial yang patut untuk diberdayakan. Salah satu potensi yang ditemui praktikan adalah Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan oleh Bank Sampah Beriman.

Sampah merupakan bahaya dapat dikatakan cukup serius bagi kehidupan manusia. Hal tersebut disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Permasalahan sampah menjadi permasalahan yang kompleks, semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, tetapi tempat pembuangan sampah yang masih kurang dapat menampung seluruh sampah dari masyarakat. Kondisi tersebut berkaitan dengan pengelolaan sampah, menurut Undang-Undang Nomor 18 pasal 1 tentang Pengolahan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.

Permasalahan tentang sampah juga timbul di Desa Soreang, hal ini bermula dari kondisi masyarakat Desa Soreang yang tidak mempunyai tempat pembuangan sampah. Dalam kondisi tersebut, masyarakat awalnya membuang limbah rumah tangga/sampah mereka ke pasar, tetapi pembuangan sampah ke pasar mendapat teguran dari pihak pasar karena menimbulkan penumpukan sampah di pasar. Kemudian, pemerintah Desa Soreang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mengangkut sampah dari masyarakat Desa Soreang. Upaya tersebut berjalan dengan lancar, tetapi karena jumlah sampah yang cukup banyak dan terkadang petugas DLH dan Kebersihan terlambat untuk mengangkut sampah, hal ini kembali menimbulkan penumpukan sampah di pinggir jalan dan akhirnya sebagian masyarakat membuang sampahnya ke sungai. Hal tersebut tentu menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pada akhirnya, upaya pemerintah Desa Soreang terhadap pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah sampah berujung pada pembentukan bank sampah. Selain dapat mengurangi jumlah sampah, pembentukan bank sampah dapat menciptakan nilai ekonomis dan menjadi potensi kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Soreang. Sampah yang menjadi penyebab permasalahan lingkungan, memiliki manfaat lain yang dapat menciptakan nilai ekonomis dan menyejahterakan masyarakat dengan diolah menjadi sebuah kerajinan yang memiliki nilai manfaat dan nilai jual.

Menurut Suwerda (2012), bank sampah yaitu suatu tempat dimana teller bank sampah melakukan pelayanan kepada nasabah atau penabung sampah. Sedangkan menurut Unilever, bank sampah

adalah suatu sistem pengelolaan sampah secara kolektif yang mendorong peran aktif dari masyarakat. Bank sampah yang terdapat di Desa Soreang, tepatnya berada di Kampung Sukamanah RW 10 terbentuk pada tahun 2018 dengan nama “Bank Sampah Beriman”. Kegiatan Bank Sampah Beriman meliputi pengelolaan sampah dan Kawasan buruan hejo. Pengelolaan sampah diwujudkan dengan beberapa program, salah satunya yang berkaitan dengan pengolahan sampah menjadi kerajinan adalah pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Pengelola program tersebut adalah masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki minat dan diharapkan masyarakat kurang mampu dapat turut berpartisipasi aktif dalam program tersebut, karena mereka diberi upah dan hasil produknya dapat dijual di mana kegiatan ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai yaitu menjadi salah satu solusi menyelesaikan masalah sampah dan memberi manfaat secara ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Pengelolaan program yang belum optimal mulai dari keanggotaan, jadwal kegiatan, maupun sistem pemasarannya.

Padahal program pengolahan sampah menjadi kerajinan tersebut apabila dikembangkan dapat menjadi potensi yang cukup besar dalam membantu kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, praktikan tertarik untuk mengkaji potensi bank sampah melalui pemberdayaan sosial agar bank sampah dapat menjadi sumber pendapatan tambahan atau menjadi aktivitas ekonomi kreatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Konsep Pemberdayaan Sosial**

Pemberdayaan yang berasal dari kata daya yang berawalan ber menjadi “berdaya” bermakna memiliki daya. Daya berarti kekuatan, sedangkan pemberdayaan memiliki arti membuat sesuatu menjadi berdaya atau memiliki kekuatan. Pemberdayaan sosial (*emPOWERment*) merupakan strategi peningkatan "daya" atau kekuatan (*power*) individu, lembaga dan komunitas.

Menurut Oos M. Anwas (49:2013) pemberdayaan adalah suatu proses memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi (*disempowered*)

kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan.

Menurut Sumaryadi (2005:11) pemberdayaan merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat supaya mereka mampu untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial ditujukan khususnya untuk kelompok rentan dan lemah, sehingga membuat mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dengan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka dapat memiliki kebebasan (bebas dari kelaparan, berpendapat, kebodohan, dan kesakitan), kemampuan dalam menjangkau sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatan dan kebutuhan yang mereka perlukan. Selain itu, pemberdayaan juga ditekankan pada proses, di mana ukuran keberhasilan sebuah pemberdayaan adalah dilihat dari seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan seorang individu maupun masyarakat. Partisipasi tersebut meliputi partisipasi secara fisik, mental, dan manfaat yang didapat oleh individu.

Dengan demikian, pemberdayaan dapat disimpulkan sebagai serangkaian aktivitas untuk membuat seorang individu memiliki kekuatan khususnya pada kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami permasalahan kemiskinan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi, dan sosial. Pemberdayaan diwujudkan dengan memberi motivasi dan dorongan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas diri, meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, lalu kemudian berupaya mengembangkan potensi tersebut.

#### **b. Konsep Pengelolaan Sampah**

Definisi sampah menurut Slamet, J.S (2009:56) merupakan segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki dan bersifat padat. Sampah yang dimaksud adalah sampah yang tidak dapat terurai (*undegradable*) dan sampah yang mudah terurai secara alami (*degradable*) atau disebut “Sampah Rumah Tangga”. Sampah yang mudah untuk terurai terdiri dari zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, dedaunan dan lain-lain, sedangkan sampah yang tidak dapat terurai dapat berupa plastik, karet, logam, kertas, kaca, bahan-bahan bangunan bekas, dan lain-lain.

Menurut Basriyanta (2007:17) sampah adalah sumber daya yang tidak siap pakai dan menurut Basriyanta, sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dimanfaatkan kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Sampah padat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu:

1) Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami.

2) Sampah Anorganik

Sampah anorganik yakni sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non hayati, baik sebagai produk sintetik maupun hasil pengolahan teknologi bahan tambang, hasil olahan bahan hayati dan sebagainya.

Salah satu jenis sampah anorganik adalah plastik. Plastik merupakan bahan kimia yang mempunyai karakteristik khas, yaitu selain dapat menjadi substansi bagi material lain, plastik juga memiliki karakter sebagai material alternatif selain material yang sudah ada.

Menurut A. Guruh Permadi (2011:32) plastik merupakan bahan anorganik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Limbah dari plastik ini sangatlah sulit untuk diuraikan secara alami. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri membutuhkan kurang lebih 80 tahun agar dapat terdegradasi secara sempurna.

Menurut Arif Zulkifli (2014:106) beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah sampah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Reduce* (mengurangi), yakni upayakan meminimalisir barang atau material yang kita gunakan.
- 2) *Reuse* (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakai kembali.
- 3) *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah.
- 4) *Replace* (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama.

Menurut A. Guruh Permadi (2011:35) daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemisahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan pembuatan produk atau material bekas pakai dan komponen utama dalam manajemen sampah modern. Pengelolaan sampah yang baik memberikan dua manfaat penting yaitu (Achmad Serudji Hadi,2001:64):mengurangi pencemaran lingkungan dan pemanfaatan sampah dapat meningkatkan nilai ekonomi atas benda yang bersangkutan, sehingga menguntungkan masyarakat tertentu yang mengelolanya.

### **c. Konsep Bank Sampah**

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering rumah tangga, seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain-lain yang menerapkan sistem konversi dari sampah menjadi uang, untuk meningkatkan partisipasi warga dalam memilah serta mendaur ulang sampah. Bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Setelah itu, hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat Pengepul sampah. Sebagai gambaran, Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan.

Asal muasal berdirinya bank sampah karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah baik organik maupun anorganik. Sampah yang semakin banyak tentu akan menimbulkan banyak masalah, sehingga memerlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Alhasil, dengan adanya pengelolaan sampah dengan sistem bank sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tujuan utama pembentukan bank sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah sehingga seiring berjalannya waktu juga menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat

lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.

Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif serta terpadu baik dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan secara sinergis melalui Bank Sampah. Hal ini pun telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) ini, bank sampah merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

#### **d. Profil Bank Sampah Beriman**

Bank Sampah Beriman “Bersih Indah Aman Nyaman” merupakan bank sampah yang terletak di Kampung Sukamanah RT 01 RW 10 Desa Soreang, Kecamatan Soreang. Bank Sampah Beriman didirikan pada tahun 2018 sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah dan menjadi potensi kesejahteraan sosial dengan berbagai program di dalamnya. Latar belakang didirikannya Bank Sampah Beriman adalah bermula dari masyarakat yang tidak memiliki ruang atau tempat untuk membuang limbah sampah rumah tangga. Volume sampah rumah tangga dan konveksi menapai 2 ton setiap minggunya. Kemudian, ketua RW 10 berinisiatif untuk mengajak masyarakat mendirikan bank sampah yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Pengurus dari bank sampah tersebut saat ini berjumlah 12 orang warga RW 10 yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, penanggung jawab program, dan anggota.

Dalam Rencana Aksi 2019 Bank Sampah Beriman memiliki tiga indikator yang diwujudkan dalam program-program. Indikator tersebut terdiri atas:

- 1) Pengelolaan Sampah
- 2) Kawasan Buruan Hejo
- 3) *File Project*

Pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan menjadi salah satu program yang termasuk dalam indikator pengelolaan sampah. Program ini merupakan potensi yang menarik dan terus dilakukan pemberdayaan karena menjadi inovasi kreatif dalam mengelola sampah anorganik dan menjadi aktivitas ekonomi kreatif bagi masyarakat. Program pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan dikelola oleh lima orang *tutor* atau masyarakat yang memiliki kemampuan dalam membuat kerajinan dan para pengrajinnya adalah masyarakat yang memiliki minat yang mana sasaran utamanya adalah masyarakat kurang mampu.

Tujuan dari program pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat akan pengolahan sampah menjadi barang yang dapat memiliki nilai ekonomis
- 2) Meningkatkan *skill*/kemampuan masyarakat untuk membuat kerajinan dari limbah sampah anorganik
- 3) Menambah *income*/pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu melalui penjualan produk kerajinan tangan
- 4) Menyadarkan masyarakat akan manfaat menggunakan produk dari hasil olahan sampah.

Masyarakat yang berpartisipasi dalam pembuatan kerajinan tangan dengan sampah akan diberi upah sebesar Rp50.000,- dan ilmu yang didapat dari bank sampah dapat mereka terapkan untuk membuat kerajinan secara mandiri yang bermanfaat untuk menambah pendapatan mereka. Adapun kerajinan yang sudah diproduksi oleh Bank Sampah Beriman adalah berjumlah 20 produk dengan rincian sebagai berikut:

- 1) tikar bekas bungkus kopi
- 2) bunga dari kresek
- 3) pot dari *pempers*
- 4) tas bekas bungkus kopi
- 5) bunga dari limbah konveksi
- 6) sabun dari minyak jelantah

Kegiatan pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan dilaksanakan balai RW 10 yang sebelumnya diawali dengan pelatihan. Hasil produk kerajinan dipasarkan melalui kegiatan perkumpulan RT, RW, maupun melalui *online* dengan

memanfaatkan fitur *whatsapp story* dengan sasaran adalah masyarakat Desa Soreang.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi masalah terkait program pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan di Bank Sampah Beriman, praktikan melakukan wawancara dengan inisiator Bank Sampah Beriman untuk menggali informasi terkait Bank Sampah Beriman dan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan Tangan melalui wawancara. Selain itu, praktikan juga melakukan pengamatan di lokasi Bank Sampah Beriman untuk melihat kondisi Bank Sampah Beriman serta hasil kerajinan tangan yang sudah berhasil diproduksi. Hasil dari wawancara dan pengamatan tersebut praktikan gunakan untuk menentukan penyebab masalah, dampak masalah, dan fokus masalah yang dikaji dengan menggunakan *tools* pekerjaan sosial “teknologi pohon masalah”.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara dengan Pak Agus Hilman selaku Inisiator Bank Sampah Beriman pada tanggal 3 Maret 2023

Melalui wawancara ini, praktikan mendapatkan informasi mengenai profil Bank Sampah Beriman, program-program Bank Sampah Beriman, keberhasilan Bank Sampah Beriman, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program Bank Sampah Beriman.

Pak Agus selaku inisiator Bank Sampah menyampaikan bahwa didirikannya Bank Sampah Beriman adalah sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan sampah, khususnya dimulai dari RW 10. Bank Sampah memiliki beberapa program sebagai berikut:

- a) Program Pemilahan Sampah
- b) Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan Tangan
- c) Program Lubang Cerdas Organik (LCO)

Ketiga program tersebut diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah sampah di RW 10 maupun lingkup Desa Soreang. Selain itu, program-program yang dilaksanakan oleh Bank Sampah juga ditujukan untuk turut membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu

yaitu, melalui program pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan.

Dalam program tersebut, masyarakat diberi edukasi melalui pelatihan oleh tutor yang memiliki keahlian membuat kerajinan untuk mengolah sampah anorganik termasuk plastik, kaleng, botol bekas menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat yang memiliki minat, tetapi lebih diutamakan untuk masyarakat yang kurang mampu agar mereka memiliki *skill* yang dapat menambah pendapatan mereka sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap orang yang ikut dalam pembuatan kerajinan tangan oleh Bank Sampah akan diberi upah sebesar Rp50.000,-/pertemuan. Tidak hanya itu saja, hasil penjualan dari Bank Sampah digunakan untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat RW 10 yang membutuhkan. Selain itu, dengan ilmu dan kemampuan mereka dalam mengolah sampah, dapat diterapkan secara pribadi di rumah dan mereka bisa memiliki keuntungan sendiri dari hasil penjualan kerajinan tersebut.

Namun, dalam pelaksanaan program pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan di Bank Sampah Beriman, terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala tersebut adalah daya beli masyarakat terhadap produk kerajinan dari sampah belum terlalu tinggi. Masyarakat masih lebih memilih membeli barang baru yang bukan berasal dari sampah karena mempertimbangkan nilai estetika atau keindahan. Mereka kurang memiliki kesadaran bahwa menggunakan barang yang berasal dari barang bekas dapat membantu mengurangi jumlah sampah.

Dari hasil wawancara tersebut, beberapa permasalahan yang diidentifikasi oleh praktikan adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan Tangan Belum Tetap

Pengrajin yang ikut mengelola program ini hanya masyarakat yang minat saja, padahal sasaran utamanya adalah masyarakat yang kurang mampu. Belum adanya

struktur ataupun sistem keanggotaan yang tetap dalam program tersebut.

2) Belum Tersusunnya Jadwal Kegiatan secara Rutin

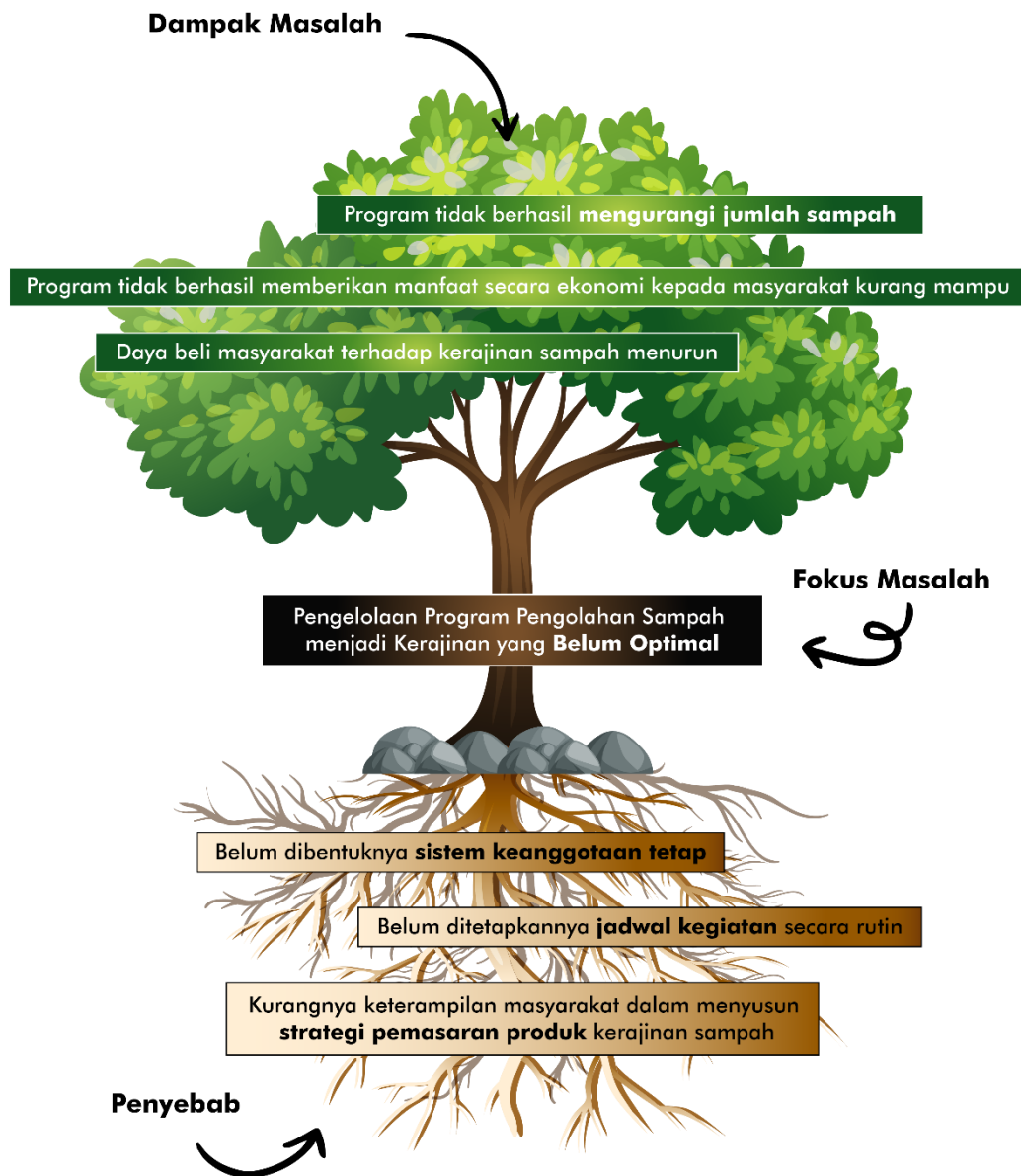
Sejak disusunnya Rencana Aksi Bank Sampah Beriman 2019, belum ada jadwal rutin untuk kegiatan pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan. Masyarakat hanya diajak untuk memproduksi kerajinan ketika *tutor* memiliki waktu luang dan tidak ada jadwal secara rutin setiap minggu/bulannya.

3) Hasil Produk yang Masih Sedikit

Produk kerajinan tangan dari pengolahan sampah saat ini masih berjumlah 20 produk. Jumlah ini tidak sebanding dengan *volume* sampah yang mencapai 2 ton setiap minggunya.

4) Strategi Pemasaran yang Belum Optimal

Hasil produk kerajinan dipasarkan melalui kegiatan RT, RW, dan memanfaatkan fitur *whatsapp story* dari pengurus Bank Sampah. Kondisi ini menggambarkan bahwa hasil produk kerajinan Bank Sampah belum memiliki wadah khusus untuk sarana mereka memasarkan produknya. Selain itu, pengemasan hasil produk juga perlu ditingkatkan untuk menarik masyarakat membeli produk kerajinan sampah.



Gambar 2.3. 1 Pohon Masalah Isu Pemberdayaan Sosial

- 1) Penyebab masalah
  - a) Belum dibentuknya sistem keanggotaan tetap  
Para pengrajin yang tergabung dalam program tersebut tidak ada keanggotaan tetap, melainkan bagi siapa saja yang memiliki minat dan ketertarikan saja, sehingga tidak memunculkan rasa tanggung jawab untuk aktif mengikuti program tersebut.
  - b) Belum ditetapkannya jadwal kegiatan secara rutin  
Kegiatan pengolahan sampah menjadi kerajinan hanya dilakukan ketika tutor dan masyarakat memiliki waktu

yang luang, yang artinya tidak ada jadwal rutin yang ditentukan bersama setiap minggu/bulannya.

- c) Kurangnya keterampilan masyarakat dalam menyusun strategi pemasaran produk kerajinan sampah

Pemasaran produk kerajinan memanfaatkan fitur whatsapp story dan kegiatan perkumpulan RT dan RW di mana sasarannya kurang luas karena hanya masyarakat RW 10 dan Desa Soreang. Bank Sampah Beriman juga belum memiliki wadah untuk penjualan hasil produk kerajinan mereka secara langsung, kondisi ini membuat hasil produk kerajinan yang belum terjual hanya menumpuk di dalam Bank Sampah Beriman tanpa adanya penataan khusus.

## 2) Dampak Masalah

- a) Program tidak berhasil mengurangi jumlah sampah

Kegiatan pengolahan sampah menjadi kerajinan yang dilakukan secara tidak rutin dan pemasaran yang kurang maksimal membuat produk kerajinan dari sampah justru tidak mengurangi jumlah sampah karena semakin banyak jumlah sampah, tetapi tidak segera dilakukan pengolahan dan hasil kerajinan yang tidak berhasil terjual pada akhirnya menumpuk dan menjadi sampah kembali.

- b) Program tidak berhasil memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat kurang mampu

Pengelolaan program pengolahan sampah menjadi kerajinan yang belum optimal mengakibatkan pendapatan masyarakat kurang mampu yang ikut memproduksi kerajinan menjadi belum optimal pula.

- c) Daya beli masyarakat terhadap kerajinan sampah menurun

Jumlah produk yang dihasilkan tidak bertambah dan belum maksimalnya strategi pemasaran produk akan membuat masyarakat semakin tidak tertarik untuk membeli produk kerajinan dari sampah.

## 3) Fokus Masalah

Dengan melihat identifikasi masalah yang sudah dijabarkan di atas, fokus masalahnya adalah Pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan yang Belum Optimal. Fokus masalah tersebut tergambar dari permasalahan di lapangan yang diidentifikasi oleh

praktikan dari hasil wawancara dan pengamatan adalah sebagai berikut:

- a) Keanggotaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan Tangan Belum Tetap
- b) Belum Tersusunnya Jadwal Kegiatan secara Rutin
- c) Hasil Produk yang Masih Sedikit
- d) Strategi Pemasaran yang Belum Optimal

#### **b. Identifikasi Kebutuhan**

Dengan mengetahui penyebab dan dampak masalah yang telah dikaji dalam pohon masalah, untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan program pengolahan sampah oleh Bank Sampah Beriman yang belum optimal, kebutuhan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) *Focus Group Discussion* (FGD) Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan

FGD dilaksanakan sebagai upaya yang dibutuhkan oleh kepengurusan Bank Sampah Beriman khususnya dalam Program Pengolahan Sampah Menjadi Kerajinan untuk mendiskusikan sistem keanggotaan tetap yang akan dijalankan. Sistem keanggotaan ini dijalankan dengan sistem *membership* di mana nantinya masyarakat yang kurang mampu akan diberi kartu tanda anggota Bank Sampah Beriman dan setiap mereka menghadiri kegiatan pengolahan sampah akan mendapat upah dan dinilai kinerjanya dengan diberikan bonus upah jika rajin dan aktif dalam mengikuti kegiatan.

Selain itu, dalam FGD juga akan disusun jadwal kegiatan secara rutin agar Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan dapat berjalan dengan maksimal dan program tersebut tidak berhenti.

- 2) Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) tentang Strategi Pemasaran Produk Kerajinan

Strategi pemasaran yang hanya melalui kegiatan perkumpulan RT, RW, dan melalui fitur *whatsapp story* memiliki sasaran yang terbatas dan kurang inovatif. Maka dari itu, diperlukan peningkatan kapasitas bagi masyarakat pengelola program pengolahan sampah menjadi kerajinan. Peningkatan kapasitas dilaksanakan untuk meningkatkan strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu, dengan mengajarkan pengelola untuk memasarkan produk kerajinan melalui *sosial media* dan *marketplace* untuk menjangkau sasaran yang lebih luas. Selain itu, peningkatan kapasitas

diberikan untuk memberikan ilmu dan keterampilan tentang cara pengemasan/packing sebuah produk agar terlihat lebih menarik.

### **c. Identifikasi Potensi dan Sumber**

Sistem sumber yang terdapat di Desa Soreang untuk mendukung penyelesaian masalah ini adalah:

1) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal dalam hal ini termasuk keluarga, tetangga terdekat, ketua RW dan warga RW 10.

2) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal dalam hal ini adalah pemerintah Desa Soreang dan Bank Sampah Beriman.

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung dan Puskesmas Desa Soreang.

## **4. Rencana Intervensi**

### **a. Latar Belakang**

Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan melalui wawancara dengan inisiator Bank Sampah Beriman dan pengamatan di lokasi Bank Sampah Beriman, pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan masih belum optimal. Penyebab utamanya adalah belum adanya sistem keanggotaan yang tetap dan belum adanya jadwal kegiatan secara rutin di dalam Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan di Bank Sampah Beriman.

Maka dari itu, diperlukan kegiatan Focus Group Discussion untuk mendiskusikan pengelolaan program bank sampah dengan lebih optimal. Selain itu, perlu dilakukan program peningkatan kapasitas (capacity building) tentang strategi pemasaran produk kerajinan bagi para pengelola program sebagai upaya pemberdayaan untuk masyarakat pengelola bank sampah.

Kedua program tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem sumber informal yaitu, warga RW 10, ketua RW 10, dan ketua-ketua RT di RW 10 sebagai memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada para pengelola Bank Sampah Beriman khususnya pada program pengolahan sampah menjadi kerajinan. Sedangkan sistem sumber formal terdiri dari Pemerintah Desa Soreang dan Bank Sampah Beriman.

## **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Adapaun tujuan dari program yang akan dilaksanakan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

### 1) Tujuan Umum

Mengoptimalkan pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan di Bank Sampah Beriman

### 2) Tujuan Khusus

- a) Mengurangi jumlah sampah anorganik
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya warga RW 10
- c) Memberdayakan masyarakat yang kurang mampu
- d) Meningkatkan pendapatan masyarakat yang kurang mampu dan desa

## **c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Nama program yang akan dilaksanakan adalah “Bank Sampah Beriman 3M (Maju Modern Mendunia)”. Program tersebut akan terdiri dari dua kegiatan yaitu:

### 1) Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*) tentang Strategi Pemasaran Produk Kerajinan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan ilmu dan keterampilan pengelola program tentang bagaimana menyusun strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk kerajinan dari sampah. Keterampilan *packing* dan foto produk agar produk kerajinan terlihat menarik saat dipasarkan. Kemudian pengelola program juga akan diberi keterampilan untuk membuat sosial media dan mendaftarkan bank sampah di *marketplace* sebagai wadah penjualan produk kerajinan agar menjangkau pasar yang lebih luas.

### 2) *Focus Group Discussion (FGD)* Pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan

FGD ini dilaksanakan untuk membenahi struktur dan kegiatan dalam program pengolahan sampah menjadi kerajinan yang dilakukan praktikan bersama pengelola Bank Sampah Beriman untuk menyelesaikan permasalahan *internal* program, untuk mencapai sistem pengelolaan yang lebih terstruktur dan terarah agar program pengolahan sampah menjadi kerajinan dapat lebih optimal, serta menyusun keanggotaan pengelola program pengolahan sampah menjadi kerajinan secara tetap serta menyusun jadwal kegiatan secara rutin dan terarah.

Tabel 2.3. 1 Rencana Kegiatan Program Bank Sampah Beriman 3M

No	Kegiatan Penyelesaian Masalah	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Peningkatan Kapasitas ( <i>Capacity Building</i> ) tentang Strategi Pemasaran Produk Kerajinan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keterampilan pengelola program dalam menyusun strategi pemasaran produk kerajinan dari sampah</li> <li>2. Meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk kerajinan dari sampah</li> <li>3. Meningkatkan keterampilan pengelola program untuk memanfaatkan sosial media dan marketplace sebagai tempat pemasaran produk kerajinan dari sampah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola program memiliki keterampilan dalam menyusun strategi pemasaran produk kerajinan dari sampah</li> <li>2. Daya beli masyarakat terhadap produk kerajinan dari sampah meningkat sebanyak minimal 50%</li> <li>3. Pengelola program mahir dalam memanfaatkan sosial media dan marketplace sebagai tempat pemasaran produk kerajinan dari sampah</li> </ol>	Pengelola Program Pengolahan Sampah Menjadi Kerajinan	Ketua Bank Sampah	Pengurus Bank Sampah

2.	<i>Focus Group Discussion</i> Pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan.	1. Menentukan keanggotaan ( <i>membership</i> ) pengelola program yang bersifat tetap 2. Menyusun jadwal kegiatan program pengolahan sampah menjadi kerajinan dengan rutin dan terarah	1. Terbentuknya keanggotaan ( <i>membership</i> ) pengelola program yang bersifat tetap 2. Tersusunnya jadwal kegiatan program pengolahan sampah menjadi kerajinan secara rutin dan terarah	Pengelola Program Pengolahan Sampah Menjadi Kerajinan	Ketua Bank Sampah	Pengurus Bank Sampah
----	---	---	--	---	-------------------	----------------------

#### **d. Sistem Partisipan**

Netting (2017) mengatakan bahwa sistem partisipan terdiri atas sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengendali, sistem pelaksana perubahan, sistem sasaran, dan sistem kegiatan. Adapun sistem partisipan dalam rencana intervensi masalah ini adalah sebagai berikut:

1) Sistem inisiator (*initiator system*)

Sistem inisiator merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian adanya masalah dan merasa perlu adanya program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu praktikan sebagai pekerja sosial.

2) Sistem agen perubahan (*change agent*)

Sistem agen perubahan merupakan seseorang atau lembaga yang mengkoordinasikan upaya perubahan atau pemecahan masalah, yaitu pekerja sosial dan pengurus Bank Sampah Beriman.

3) Sistem klien (*client system*)

Sistem klien dalam program ini ialah Pengelola Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan di Bank Sampah Beriman, sebagai penerima utama dalam usaha perubahan dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program.

4) Sistem pendukung (*support system*)

Sistem pendukung merupakan pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan dalam penyelesaian masalah yang ada, yaitu Pemerintah Desa Soreang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung, dan Sustainable Local Brand Clothing Line “Cottonology”.

5) Sistem pengendali (*controlling system*)

Sistem pengendali adalah seseorang atau pihak yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas perubahan yang diusulkan tersebut. Dalam program ini yaitu, Kepala Desa Soreang.

6) Sistem pelaksana perubahan (*implementing system*)

Dalam hal ini sistem pelaksana perubahan yaitu, Pengurus Bank Sampah Beriman dan para Pengrajin Produk Kerajinan dari Sampah di Bank Sampah Beriman yang akan mengkoordinasikan usaha perubahan atau penyelesaian masalah.

7) Sistem sasaran (*target system*)

Sistem sasaran merupakan orang/sekumpulan orang-orang yang dijadikan sasaran perubahan yang diharapkan dapat memengaruhi dan mencapai tujuan pertolongan. Sistem sasaran utama dalam program ini ialah warga Desa Soreang sebagai sasaran utama konsumen produk kerajinan dari sampah. Selain itu, sistem sasaran dalam program ini adalah Sustainable Local Brand Clothing Line “Cottonology” sebagai narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas.

8) Sistem kegiatan (*action system*)

Sistem kegiatan merupakan orang-orang yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan perubahan. Dalam program ini yaitu, pengurus Bank Sampah Beriman dan inisiator dan pengrajin kerajinan dari sampah di Bank Sampah Beriman.

**e. Metode dan Teknik**

Metode pekerjaan sosial yang akan digunakan dalam pelaksanaan program KPM Disiplin Lapor adalah *Community Organization And Community Development* (COCD). COCD sebagai metode pekerjaan sosial dengan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial masyarakat secara umum dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara khusus.

Menurut Edi Suharto (2010:37) *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Secara singkat *community development* adalah suatu cara kerja untuk memecahkan masalah masyarakat. Dengan demikian penggunaan dari kedua metode ini dalam tahap pemahaman serta analisis masalah di masyarakat dimana *community organization* adalah sebagai metode intervensi yang ditekankan terhadap pemecahan masalah, sedangkan *community development* adalah sebagai proses interaksi sosial yang penekanannya terhadap perubahan sosial.

Teknik yang akan digunakan dalam program ini adalah peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan *focus group discussion* (FGD).

1) Peningkatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Capacity building adalah pembangunan keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*capabilities*), seperti

kepemimpinan, manajemen, keuangan dan pencarian dana, program dan evaluasi, supaya pembangunan organisasi efektif dan berkelanjutan. *Capacity building* difasilitasi melalui penetapan kegiatan bantuan teknik, meliputi pendidikan dan pelatihan, bantuan teknik khusus (*specific technical assistance*) dan penguatan jaringan.

2) *Focus Group Discussion (FGD)*

Fokus penyelesaian masalah dalam FGD ini adalah menyelesaikan masalah pengelolaan program pengolahan sampah menjadi kerajinan sampah yang belum optimal, dengan indikator keberhasilannya adalah terbentuknya keanggotaan tetap dan tersusunnya jadwal secara rutin dan terarah.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan**

Adapun rincian rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan sebagai berikut:

Tabel 2.3. 2 RAB Program Bank Sampah Beriman 3M

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Administrasi</b>					
1.	Proposal Pengajuan	15	Lembar	1.000	15.000
2.	Surat Menyurat	20	Lembar	1.000	20.000
3.	Amplop	20	Lembar	2.000	40.000
4.	ATK	1	Pack	30.000	30.000
<b>Jumlah</b>					<b>105.000</b>
<b>Logistik</b>					
5.	Banner	1	Buah	150.000	150.000
<b>Honorarium Narasumber Capacity Building</b>					
6.	Marketing Strategy "Cottonology"	1		350.000	350.000
<b>Jumlah</b>					<b>500.000</b>
<b>Konsumsi</b>					
7.	Snacks Peserta	25	Paket	10.000	250.000
8.	Konsumsi Narasumber	1	Paket	30.000	30.000
<b>Jumlah</b>					<b>280.000</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					<b>885.000</b>

Rincian alat-alat yang dibutuhkan dalam Program Bank Sampah Beriman 3M Maju Modern Mendunia adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.3. 3 Alat yang Dibutuhkan*

No	Alat	Satuan	Jumlah
1.	<i>Sound System</i>	Buah	1
2.	Microphone	Buah	2
3.	Proyektor	Buah	1
4.	Laptop	Buah	1
5.	Meja	Buah	2
6.	Kursi	Buah	30

**g. Analisis Kelayakan Program**

Analisis uji kelayakan dilakukan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari program yang akan dilaksanakan. Berikut matriks analisis kelayakan program (analisis SWOT):

Tabel 2.3. 4 Analisis SWOT Program Bank Sampah Beriman 3M

<b>Internal</b>          <b>Eksternal</b>	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Sampah sudah memiliki tempat untuk pengolahan sampah</li> <li>2. Volume sampah yang cukup banyak setiap minggunya</li> <li>3. Pengurus Bank Sampah Beriman memiliki mau menerima perubahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya keterampilan pengelola program dalam menyusun strategi pemasaran yang menarik</li> <li>2. Kurangnya keterampilan pengelola dalam mengelola digital marketing</li> </ol>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Sampah Beriman mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Pemerintah Desa Soreang</li> <li>2. <i>Trend eco-living</i> yang mulai berkembang di masyarakat</li> <li>3. Gaya hidup belanja online di masyarakat yang pesat</li> <li>4. Sudah banyak perusahaan/UMKM yang memiliki usaha dengan sistem <i>sustainability business</i>/menjual barang <i>eco-friendly</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memanfaatkan sosial media dan marketplace untuk memasarkan produk kerajinan dari sampah</li> <li>2. Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk kerajinan melalui trend <i>eco living</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan keterampilan strategi pemasaran dengan sosial media dan marketplace dengan narasumber dari UMKM/perusahaan yang menjalankan <i>sustainable business/eco-friendly</i></li> </ol>
<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat menggunakan barang dari kerajinan sampah dan <i>eco living</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengedukasi masyarakat tentang manfaat menggunakan barang dari kerajinan sampah dimulai dari masyarakat di Desa Soreang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat konten edukasi melalui sosial media untuk memberikan edukasi tentang manfaat menggunakan barang dari kerajinan sampah dan gaya hidup <i>eco living</i></li> </ol>

Program ini layak untuk dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mengatasi hambatan yang ada. *Strength (S)* lebih besar daripada *Weakness (W)* dan *Opportunity (O)* lebih besar daripada *Threats (T)*.

#### h. Jadwal dan Langkah-langkah

Program akan berjalan dengan sistematis dan teratur dengan dilakukannya penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan program dengan tepat waktu.

Tabel 2.3. 5 Jadwal dan Langkah-langkah Program Bank Sampah Beriman 3M

Langkah Kegiatan	April		Mei		
	Minggu Ke				
	2	3	1	2	3
<b>1. Persiapan</b>					
Membentuk kepanitiaan					
Melakukan rapat konsep kegiatan dan penjadwalan kerja bersama					
Menyatakan komitmen untuk mengungkapkan janji hati					
Membuat proposal kegiatan dan keperluan surat menyurat					
Membagikan surat undangan kepada pengelola program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan dan surat undangan kepada narasumber kegiatan peningkatan kapasitas					
Menyiapkan tempat dan alat-alat yang dibutuhkan					
<b>2. Pelaksanaan</b>					
<i>Focus Group Discussion</i> Pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan					
<i>Capacity Building</i> tentang Strategi Pemasaran Produk Kerajinan					
<b>3. Pengakhiran</b>					
Evaluasi kegiatan					
Pembuatan laporan pertanggungjawaban					
Pembubaran panitia					

Berdasarkan matriks di atas, kegiatan dilaksanakan melalui tiga (3) tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

## 1) Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan pada bulan April minggu kedua dan ketiga dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

### a) Membentuk Kepanitiaan

Kepanitiaan ini terdiri dari pekerja sosial (praktikan) selaku koordinator dan pengurus Bank Sampah Beriman sebagai pelaksana.

### b) Melakukan Rapat Konsep Kegiatan dan Penjadwalan Kerja Bersama

Pelaksanaan rapat diadakan untuk membahas topik dalam FGD dan Konsep Capacity Building yang akan dilakukan. Topik yang akan didiskusikan dalam FGD adalah penetapan keanggotaan tetap dan penyusunan jadwal kegiatan secara rutin dan terarah. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Capacity Building tentang strategi pemasaran produk kerajinan yang akan mengundang narasumber dari pemilik UMKM/Perusahaan yang bergerak di ranah *sustainable business* ataupun *eco-friendly* untuk memberikan keterampilan kepada pengelola program pengolahan sampah menjadi kerajinan dalam memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai sarana pemasaran produk kerajinan.

### c) Menyatakan Komitmen Untuk Mengungkapkan Janji Hati

Panitia menyatakan komitmen untuk menjalankan program ini dengan mengungkapkan janji hati, sebagai bentuk komitmen agar mau bekerja sama menyelesaikan program ini.

### d) Membuat Proposal Kegiatan Dan Keperluan Surat Menyurat

Menyusun proposal kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Soreang dan Narasumber Capacity Building. Kemudian, pembuatan surat ditujukan kepada pengelola program pengolahan sampah menjadi kerajinan yang terdiri dari masyarakat yang kurang mampu (sebagai pengrajin) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang dapat mendukung berjalannya kegiatan.

### e) Membagikan surat undangan kepada pengelola program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan dan surat undangan kepada narasumber kegiatan peningkatan

kapasitas yaitu, **Cottonology** sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha konveksi (*local brand*) dengan aspek *sustainable*.

- f) Panitia membagikan surat undangan pelaksanaan Program Bank Sampah Beriman 3M kepada sasaran kegiatan dan surat peminjaman alat-alat yang dibutuhkan kepada kantor desa untuk mendukung berlangsungnya kegiatan.
- g) Menyiapkan Tempat dan Alat-Alat yang Dibutuhkan  
Panitia mempersiapkan kebutuhan alat-alat yang dibutuhkan dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

## 2) Pelaksanaan

Program Bank Sampah Beriman 3M (Maju Modern Mendunia) dilaksanakan pada bulan Mei minggu pertama dan dilaksanakan di Aula Desa Soreang dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) *Focus Group Discussion* Pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan

Rangkaian program diawali dengan FGD tentang pengelolaan program pengolahan sampah menjadi kerajinan dengan tujuan menetapkan keanggotaan tetap dan menyusun jadwal kegiatan secara rutin dan terarah. FGD akan dipimpin oleh praktikan sebagai moderator dan sasaran kegiatan ini adalah pengelola program pengolahan sampah menjadi kerajinan.

- b) *Capacity Building* tentang Strategi Pemasaran Produk Kerajinan

Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan peningkatan kapasitas tentang menyusun strategi pemasaran produk kerajinan. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola program pengolahan sampah menjadi kerajinan dan seluruh pengurus Bank Sampah Beriman agar mereka memiliki keterampilan dalam menyusun strategi pemasaran untuk memajukan program Bank Sampah Beriman tersebut. Peningkatan kapasitas akan mengundang Tim Marketing Strategy Brand Cottonology sebagai bisnis konveksi yang bergerak di ranah *sustainable business* atau *eco living* untuk memberikan ilmu dan keterampilan dalam menyusun strategi pemasaran mulai dari pengemasan produk yang menarik hingga pemanfaatan media sosial dan *marketplace* sebagai sarana pemasaran produk kerajinan.

### 3) Pengakhiran

Tahap yang terakhir dilaksanakan pada bulan Mei minggu kedua dan ketiga yaitu, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

#### a) Evaluasi Kegiatan

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan program. Evaluasi dilaksanakan dengan penyebaran angket kepada sasaran program yaitu seluruh pengurus Bank Sampah Beriman dan pengelola program pengolahan sampah menjadi kerajinan.

#### b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Setelah terlaksananya evaluasi, praktikan bersama seluruh panitia membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada pihak Desa Soreang.

#### c) Pembubaran Panitia

Setelah semua kegiatan dilaksanakan, panitia Program Bank Sampah Beriman 3M (Maju Modern Mendunia) dibubarkan.

## **D. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial**

### **1. Gambaran Umum Masalah**

Membangun lingkungan fisik yang tertib, sehat, selaras, dan lestari adalah tujuan dari kegiatan penataan lingkungan. Salah satu tujuan penataan adalah untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang menjalankan hidup bersih dan sehat, yaitu melalui peningkatan kualitas pelayanan lingkungan perumahan, sarana dan prasarana. Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah menjadi salah satu pemicu masalah dalam penataan lingkungan. Adapun di Desa Soreang sendiri praktikan menemukan beberapa permasalahan lingkungan dan juga potensi yang mendukung tercapainya penataan lingkungan sosial.

Salah satu isu penataan lingkungan yang terdapat dalam Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Bandung, adalah isu perkotaan/persampahan. Sampah merupakan material sisa dari hasil aktivitas manusia yang dibuang sebagai hasil produksi, baik yang dilakukan dalam industri maupun rumah tangga. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia, karena menghambat terwujudnya lingkungan yang sehat, tertib, selaras, dan lestari. Pengelolaan sampah meliputi pengelolaan sampah organik maupun anorganik.

Desa Soreang termasuk desa yang telah menjalankan pengelolaan sampah, baik itu organik maupun anorganik. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dan Lubang Cerdas Organik/Resapan Biopori yang terletak di RW 10 Kampung Sukamanah. Bank Sampah sebagai sarana mengelola sampah anorganik, sedangkan Lubang Cerdas Organik sebagai sarana mengelola sampah organik. Kedua hal tersebut dilaksanakan adalah implementasi dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 dan tertera dalam instruksi bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Lubang Cerdas Organik/Lubang Resapan Biopori yang menjelaskan bahwa setiap warga masyarakat Kabupaten Bandung melakukan konservasi sumber daya air dan pengelolaan sampah dengan melakukan pembuatan lubang cerdas organik (LCO)/lubang resapan biopori (LRB) minimal 2 unit per rumah.

Kampung Sukamanah RW 10 kemudian menjadi kampung percontohan di Desa Soreang yang mengimplementasikan program Lubang Cerdas Organik. Pada tahun 2018, ketua RW 10 menjalankan program tersebut dengan membuat kurang lebih 200 Lubang Cerdas Organik (LCO) di RW 10 Kampung Sukamanah. Seiring berjalannya waktu, pergantian pemimpin Kabupaten Bandung juga memengaruhi berjalannya program tersebut. Program LCO dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 juga menjadi inovasi program dalam upaya pengurangan sampah melalui pengurangan timbulan.

Namun, saat ini Lubang Cerdas Organik yang ada di RW 10 kurang dimanfaatkan secara optimal karena beberapa kendala. Diantaranya adalah banyaknya LCO yang sudah tertutupi tanah kembali karena musim hujan dan masyarakat tidak selalu mengeruk kembali tanah yang digunakan sebagai lubang cerdas organik. Selain itu, warga yang tidak memiliki pekarangan juga belum ikut membuat LCO. Padahal LCO memiliki banyak manfaat yang dapat menjadi solusi pengelolaan sampah organik dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan penataan lingkungan untuk terwujudnya lingkungan yang sehat dan nyaman. Maka dari itu, praktikan tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang program Lubang Cerdas Organik (LCO) sebagai upaya pengurangan sampah di Desa Soreang.

## 2. Tinjauan Konsep

### a. Konsep Lingkungan

Menurut Prof. St. Munajat Danusaputra, SH dalam buku Hukum Lingkungan, pengertian lingkungan secara umum adalah sumber benda dan kondisi dan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

L.L Bernard dalam Hukum Lingkungan Buku 11 oleh Munadjat Danusaputra menjelaskan pembagian lingkungan ke dalam empat (4) bagian besar, yaitu:

- 1) Lingkungan fisik/anorganik, terdiri dari tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- 2) Lingkungan biologi/organik, terdiri dari segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- 3) Lingkungan sosial, terdiri dari lingkungan fisiososial, biososial, dan psikososial.

Dalam Purba (2022), lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan (tata ruang).

- 4) Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Permasalahan lingkungan fisik dan permasalahan lingkungan sosial merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kerusakan lingkungan fisik salah satunya ditimbulkan karena adanya interaksi sosial atau aktivitas manusia yang dapat merusak alam, contohnya seperti kurangnya kesadaran manusia dalam mengelola sampah organik maupun anorganik dengan baik.

### b. Konsep Pengelolaan Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tanaman. Sampah organik memiliki karakteristik yaitu, sampah yang dapat terurai sendiri di alam dengan proses yang alamiah.

Meskipun dapat terurai sendiri, sampah organik yang tidak dilakukan pengelolaan dan dibiarkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap, mencemari lingkungan, dan mengganggu kesehatan.

Mengutip dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Buleleng, contoh-contoh sampah organik sebagai berikut:

- 1) Sisa-sisa makanan, yang banyak berasal dari sampah rumah tangga. Contoh sampah organik dari sisa makanan atau sampah dari dapur seperti sisa nasi, ampas kopi atau teh, bekas tepung, dan lain-lain.
- 2) Dedaunan, ranting dan daun-daun yang rontok dari pohon jika tidak dilakukan pengelolaan, maka akan menjadi sampah organik.
- 3) Sisa buah dan sayur, kulit atau bijinya dari buah maupun sayuran, biasanya hanya dibuang begitu saja oleh para pedagang atau hasil sampah rumah tangga. Sifatnya yang mudah busuk, menjadi alasan sisa buah dan sayur termasuk sampah organik. Contohnya, apel busuk, mangga busuk, jeruk busuk.
- 4) Kotoran hewan

Adapun sampah organik jika dilakukan pengelolaan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai kompos/pupuk organik
- 2) Tambahan pakan hewan
- 3) Biogas dan listrik

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2021, sampah rumah tangga menjadi jumlah terbanyak penghasil sampah dengan persentase 40,85% kemudian diikuti dengan sampah perniagaan di angka 18.22%. Sampah rumah tangga menyumbang persentase yang cukup tinggi. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah organik rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Melalui Lubang Biopori
- 2) Membuat Eco Enzyme
- 3) Setor Sampah Organik

**c. Konsep Lubang Cerdas Organik (LCO)/Lubang Resapan Biopori**

Biopori adalah istilah untuk lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktifitas organisme yang terjadi di dalam tanah seperti oleh cacing, rayap, semut, dan perakaran tanaman. Biopori yang terbentuk akan terisi udara dan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah.

Lubang Resapan Biopori atau biasa disebut lubang biopori merupakan metode alternatif untuk meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah. Metode ini pertama kali dicetuskan oleh Dr. Kamir R. Brata, seorang peneliti dan dosen di Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Lubang Resapan Biopori berupa sebuah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Lubang ini akan memicu munculnya biopori secara alami di dalam tanah.

Lubang resapan biopori yang dibuat dan kemudian diberi sampah organik akan memicu biota tanah seperti cacing dan semut dan akar tanaman untuk membuat rongga-rongga (lubang) di dalam tanah yang disebut biopori. Rongga-rongga (biopori) menjadi saluran bagi air untuk meresap ke dalam tanah.

Manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori/lubang cerdas organik adalah sebagai berikut:

1) Mengurangi sampah organik

Sampah dapur seperti kulit buah dan sisa sayur-sayuran dapat dimasukkan ke dalam LRB untuk kemudian diubah menjadi kompos. Hal ini tentu akan mengurangi jumlah volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Selain itu, proses perawatan lubang resapan biopori juga akan membuat masyarakat menjadi terbiasa dalam memilah sampah menjadi minimal dua kategori: sampah organik dan non-organik.

2) Menyuburkan tanah

Lubang resapan akan membuat tanah menjadi lebih gembur karena banyak mengandung air dan udara. Selain itu, sampah organik yang diletakkan di dalam lubang resapan akan menstimulasi aktivitas mikroorganisme di dalam tanah, yang kemudian akan menguraikan sampah organik dan mengubahnya menjadi pupuk kompos. Kompos tersebut nantinya akan meningkatkan kesuburan tanah, serta dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman.

3) Mencegah banjir dan menambah cadangan air tanah

Dengan adanya lubang resapan biopori, air hujan akan lebih mudah untuk masuk ke dalam tanah, karena lubang biopori dapat meningkatkan luas bidang resapan menjadi 40 kali lipat. Nantinya, air hujan yang masuk ke dalam tanah akan membuat cadangan air tanah semakin banyak, dan resiko banjir serta kekeringan dapat berkurang.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

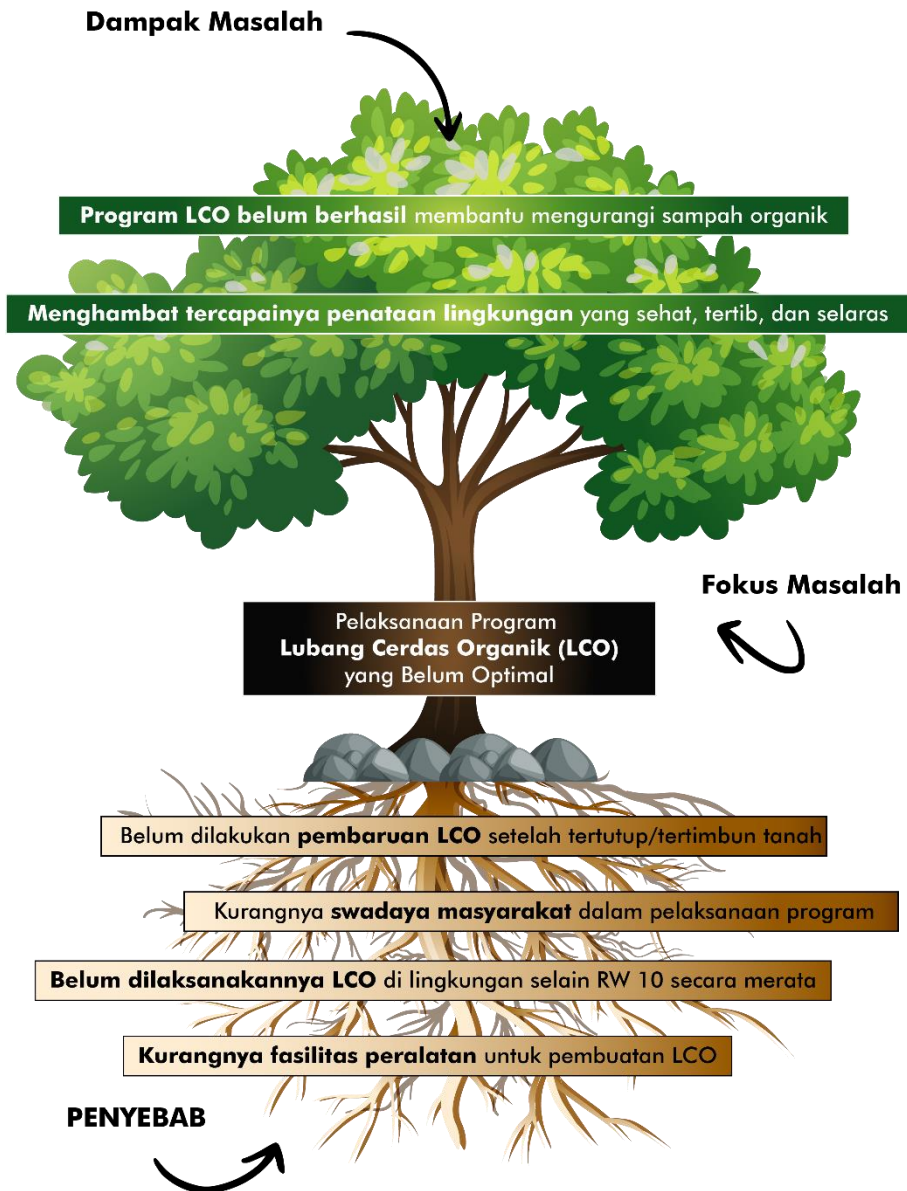
Dalam mengidentifikasi masalah terkait program Lubang Cerdas Organik/Lubang Resapan Biopori sebagai upaya pengelolaan sampah di Kampung Sukamanah RW 10, praktikan mencari informasi melalui wawancara untuk kemudian menentukan penyebab masalah, dampak masalah, dan fokus masalah yang dikaji menggunakan tools pekerjaan sosial “pohon masalah”.

Wawancara dilakukan dengan Bapak Agus dan ibu Solikhah selaku ketua RW 10 Kampung Sukamanah. Dalam wawancara tersebut praktikan menggali informasi mengenai penjelasan program Lubang Cerdas Organik, kemanfaatan Lubang Cerdas Organik, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan Program Lubang Cerdas Organik sebagai berikut:

- 1) Banyaknya Lubang Cerdas Organik yang sudah tidak terawat  
Lubang Cerdas Organik banyak yang sudah tertimbun tanah/tertutup dikarenakan musim hujan dan masyarakat tidak merawat lubang tersebut, sehingga lubang tersebut tidak dapat membantu mengurangi sampah organik.
- 2) Tidak Semua Rumah Memiliki Lubang Cerdas Organik  
Kondisi tersebut dikarenakan terdapat rumah warga yang tidak memiliki pekarangan tanah, melainkan telah dipaving. Sehingga rumah yang tidak memiliki lahan, tidak memiliki LCO. Selain itu, pada awal program dilaksanakan masih sekitar 200 LCO yang terdapat di RW 10.
- 3) Belum Memiliki Dana untuk Melanjutkan Pembuatan Lubang Cerdas Organik bagi Warga  
Pada awal pembuatan program, RW 10 mendapat bantuan alat bor tanah dan plastik sebagai penutup LCO. Keterbatasan alat bor yang hanya ada 1 dan masyarakat

belum memiliki kemauan untuk membeli peralatan dengan uang pribadi menjadi kendala dalam keberlanjutan program tersebut.

- 4) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Merawat Lubang Cerdas Organik  
Masyarakat setelah membuat LCO masih belum merasa memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberlanjutan dari LCO.



Gambar 2.4. 1 Pohon Masalah Isu Penataan Lingkungan Sosial

## 1) Penyebab Masalah

- a) Belum dilakukan pembaruan Lubang Cerdas Organik (LCO) setelah tertutup/tertimbun tanah

Pada kondisi sekarang, sebagian LCO sudah tertutup oleh timbunan tanah kembali karena musim hujan dan kurangnya perawatan dari masyarakat.

- b) Kurangnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program

Partisipasi/kemauan masyarakat baik dalam tenaga maupun materiil masih kurang, sehingga memengaruhi keberlanjutan program Lubang Cerdas Organik (LCO).

- c) Belum dilaksanakannya program Lubang Cerdas Organik (LCO) di lingkungan selain RW 10 secara merata

Kampung Sukamanah RW 10 sebagai percontohan yang ditunjuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pelaksanaan program ini, tetapi hingga saat ini program LCO belum dilaksanakan di semua RW di Desa Soreang secara merata.

- d) Kurangnya fasilitas peralatan untuk pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO)

Saat ini hanya ada 1 bor yang digunakan untuk melubangi tanah yang dimiliki oleh RW 10, sehingga jumlahnya terbatas ini menghambat berlangsungnya program pembuatan LCO.

## 2) Dampak Masalah

- a) Program Lubang Cerdas Organik (LCO) belum berhasil membantu mengurangi sampah organik

Salah satu tujuan pembuatan LCO adalah sebagai upaya pengelolaan sampah rumah tangga organik, tetapi karena tidak dijalankannya program tersebut, sampah organik tidak dapat memberi manfaat sebagai kompos dan tidak membantu mengurangi jumlah sampah.

- b) Menghambat tercapainya penataan lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras

Dengan tidak dimanfaatkannya Lubang Cerdas Organik dengan maksimal, akan memungkinkan masyarakat membuang sampah organik ke sungai, pinggir jalan, ataupun dibiarkan menumpuk dan akhirnya menimbulkan bau yang menyengat dan berisiko menimbulkan penyakit. Kondisi tersebut menghambat

tercapainya penataan lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras.

### 3) Fokus Masalah

Dengan melihat identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, fokus masalah dalam Program Lubang Cerdas Organik (LCO) adalah Pelaksanaan Program Lubang Cerdas Organik (LCO) sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Organik yang Belum Optimal. Adapun fokus masalah tersebut tergambar dengan kondisi di lapangan sebagai berikut:

- a) Banyaknya Lubang Cerdas Organik yang Sudah Tidak Terawat
- b) Tidak Semua Rumah Memiliki Lubang Cerdas Organik
- c) Belum Memiliki Dana untuk Melanjutkan Pembuatan Lubang Cerdas Organik bagi Warga
- d) Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Merawat Lubang Cerdas Organik

#### **b. Identifikasi Kebutuhan**

Dengan mengetahui penyebab dan dampak masalah yang telah dikaji dalam pohon masalah, untuk menyelesaikan permasalahan pelaksanaan program Lubang Cerdas Organik (LCO) sebagai upaya pengelolaan sampah organik belum optimal, kebutuhan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi tentang Program Lubang Cerdas Organik (LCO)  
Menurunnya kesadaran masyarakat dalam merawat Lubang Cerdas Organik (LCO) perlu menjadi perhatian khusus, sebab menurunnya kesadaran tersebut menghambat berlangsungnya keberlanjutan program. Maka dari itu, masyarakat perlu diberikan sosialisasi kembali akan kemanfaatan dan urgensi dari dilaksanakannya program Lubang Cerdas Organik (LCO) bagi masyarakat sendiri. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam merawat Lubang Cerdas Organik (LCO) dan meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- 2) Pendampingan Pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO) di seluruh RW di Desa Soreang  
Program LCO perlu dilanjutkan ke RW-RW lain yang ada di Desa Soreang, hal ini karena LCO memiliki manfaat yang sangat berguna untuk mengurangi jumlah sampah organik dan meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. Maka dengan

dilaksanakannya program ini di seluruh RW, manfaat dari program tidak hanya dirasakan oleh warga RW 10 saja, tetapi seluruh masyarakat Desa Soreang. Selain itu, lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras juga akan terwujud di semua wilayah Desa Soreang.

**c. Identifikasi Potensi dan Sumber**

Sistem sumber yang terdapat di Desa Soreang untuk mendukung penyelesaian masalah ini adalah

1) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal dalam hal ini termasuk keluarga, tetangga terdekat, ketua RT&RW.

2) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal dalam hal ini adalah pemerintah Desa Soreang dan Bank Sampah Beriman.

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung dan Karang Taruna, Kelompok Saber.

**4. Rencana Intervensi**

**a. Latar Belakang**

Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan oleh praktikan melalui wawancara dengan ketua RW 10 Kampung Sukamanah, permasalahan yang terjadi dalam program Lubang Cerdas Organik (LCO) sebagai upaya pengelolaan sampah organik belum dijalankan dengan optimal karena beberapa faktor penyebab. Penyebab utamanya adalah tidak dilaksanakannya keberlanjutan program LCO oleh masyarakat secara mandiri. Penyebab utama tersebut diidentifikasi dengan adanya lubang-lubang biopori/ Lubang Cerdas Organik yang sudah tertimbun/tertutup tanah karena tidak dilakukan perawatan dan pemanfaatan secara optimal oleh masyarakat sendiri.

Maka dari itu, untuk mengoptimalkan program Lubang Cerdas Organik yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, diperlukan kegiatan sosialisasi mengenai Lubang Cerdas Organik kepada masyarakat guna menyadarkan kembali masyarakat untuk merawat LCO. Selain itu, perlu dilakukan pendampingan pembuatan Lubang Cerdas Organik di 24 RW yang ada di Desa Soreang agar dapat membantu mengurangi sampah organik dan turut menciptakan lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras di seluruh wilayah Desa Soreang.

Kedua kegiatan tersebut akan dijalankan dengan memanfaatkan semua sistem sumber di Desa Soreang baik formal, informal, maupun kemasyarakatan untuk mendukung keberhasilan kegiatan-kegiatan yang bertujuan menyelesaikan permasalahan dalam program Lubang Cerdas Organik (LCO).

#### **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Adapun tujuan dari program yang akan dilaksanakan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

##### 1) Tujuan Umum

Mengoptimalkan pelaksanaan Program Lubang Cerdas Organik (LCO) sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Organik.

##### 2) Tujuan Khusus

- a) Mengurangi jumlah sampah organik
- b) Mewujudkan lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras
- c) Menghasilkan pupuk kompos yang dapat bermanfaat bagi tanaman
- d) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga dengan benar

#### **c. Bentuk Kegiatan dan Program**

Nama program yang akan dilaksanakan adalah “Mas Kelik (Masyarakat Kelola Sampah Organik)”. Program tersebut akan terdiri dari dua kegiatan yaitu:

##### 1) Sosialisasi tentang Program Lubang Cerdas Organik (LCO)

Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Mei, bertempat di Balai Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Peserta kegiatan adalah masyarakat Desa Soreang yang terdiri dari Ketua RW, Ketua RT, Pengurus Karang Taruna, Kelompok Saber, dan Kader PKK yang nantinya akan melanjutkan informasi dan pengetahuan yang didapat kepada warga Desa Soreang. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pengetahuan tentang program Lubang Cerdas Organik (LCO) termasuk teknik pembuatannya, dan pengetahuan tentang cara mengelola sampah organik untuk kelestarian lingkungan. Hasil dari sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah organik sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras. Kegiatan sosialisasi akan mengundang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai narasumber dan materi yang akan diberikan adalah seputar pengelolaan sampah organik, cara membuat dan merawat

lubang cerdas organik/lubang resapan biopori, serta manfaat dari Lubang Cerdas Organik.

2) Pendampingan Pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO) di seluruh RW di Desa Soreang

Kegiatan pendampingan pembuatan Lubang Cerdas Organik adalah kelanjutan dari kegiatan sosialisasi tentang Lubang Cerdas Organik. Setelah dilakukan sosialisasi, praktikan akan membentuk Tim Kerja Masyarakat di setiap RW yang terdiri dari Ketua RW dan anggota Karang Taruna di setiap RW. Dalam pendampingan ini, akan dilaksanakan kegiatan pembuatan Lubang Cerdas Organik di setiap pekarangan rumah warga di seluruh RW yang ada di Desa Soreang. Setiap rumah tangga diwajibkan membuat 2 LCO. Hal ini disesuaikan dengan instruksi bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Lubang Cerdas Organik/Lubang Resapan Biopori. Masyarakat yang tidak memiliki pekarangan untuk membuat LCO, dapat membuat 1 LCO di pekarangan rumah tetangga terdekat. Dengan dilakukannya hal tersebut, harapannya setiap rumah tangga/keluarga memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola sampah organik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga. Kegiatan pembuatan ini dilakukan secara bergilir di setiap RT, karena keterbatasan alat bor yang ada. Sembari TKM mengajukan bantuan tambahan alat pembuatan LCO ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Tabel 2.4. 1 Rencana Program Mas Kelik

No	Kegiatan Penyelesaian Masalah	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Sosialisasi tentang Program Lubang Cerdas Organik (LCO)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga dengan benar</li> <li>2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk merawat Lubang Cerdas Organik</li> <li>3. Memberikan pengetahuan tentang Program Lubang Cerdas Organik kepada masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat memiliki kesadaran untuk mengelola sampah rumah tangga dengan benar</li> <li>2. Masyarakat memiliki kesadaran untuk merawat Lubang Cerdas Organik</li> <li>3. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang program Lubang Cerdas Organik</li> </ol>	Ketua RW, RT, Pengurus Karang Taruna, Kelompok Saber, Kader PKK	Kepala Desa Soreang	Tim Kerja Masyarakat
2.	Pendampingan Pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO) di seluruh RW di Desa Soreang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan keterampilan cara membuat dan merawat Lubang Cerdas Organik kepada masyarakat</li> <li>2. Memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan Lubang Cerdas Organik</li> <li>3. Mewujudkan lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat memiliki keterampilan untuk membuat dan merawat Lubang Cerdas Organik</li> <li>2. Seluruh masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas alat dan mendapat kemudahan dalam pembuatan Lubang Cerdas Organik</li> <li>3. Terwujudnya lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras</li> </ol>	Masyarakat Desa Soreang	Kepala Desa Soreang	Tim Kerja Masyarakat

#### **d. Sistem Partisipan**

Netting (2017) mengatakan bahwa sistem partisipan terdiri atas sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengendali, sistem pelaksana perubahan, sistem sasaran, dan sistem kegiatan. Adapun sistem partisipan dalam rencana intervensi masalah ini adalah sebagai berikut:

1) Sistem Inisiator (*Initiator System*)

Sistem inisiator merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian adanya masalah dan merasa perlu adanya program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu praktikan sebagai pekerja sosial.

2) Sistem Agen Perubahan (*Change Agent*)

Sistem agen perubahan merupakan seseorang atau lembaga yang mengkoordinasikan upaya perubahan atau pemecahan masalah, yaitu pekerja sosial, ketua RW

3) Sistem Klien (*Client System*)

Sistem klien dalam program ini ialah warga Desa Soreang, sebagai penerima utama dalam usaha perubahan dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program.

4) Sistem Pendukung (*Support System*)

Sistem pendukung merupakan pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan dalam penyelesaian masalah yang ada, yaitu Pemerintah Desa Soreang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung.

5) Sistem Pengendali (*Controlling System*)

Sistem pengendali adalah seseorang atau pihak yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas perubahan yang diusulkan tersebut. Dalam program ini yaitu, Kepala Desa Soreang.

6) Sistem Pelaksana Perubahan (*Implementing System*)

Dalam hal ini sistem pelaksana perubahan yaitu, ketua-ketua RT dan anggota karang taruna di setiap RW yang akan mengkoordinasikan usaha perubahan atau penyelesaian masalah.

7) Sistem Sasaran (*Target System*)

Sistem sasaran merupakan orang/sekumpulan orang-orang yang dijadikan sasaran perubahan yang diharapkan dapat memengaruhi dan mencapai tujuan pertolongan. Sistem sasaran utama dalam program ini ialah ibu-ibu Kader PKK dan anggota Karang Taruna.

8) Sistem Kegiatan (*Action System*)

Sistem kegiatan merupakan orang-orang yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan perubahan. Dalam program ini yaitu, Tim Kerja Masyarakat yang terdiri dari para ketua RT dan anggota Karang Taruna di setiap RW.

**e. Metode dan Teknik**

Metode pekerjaan sosial yang akan digunakan dalam pelaksanaan program KPM Disiplin Lapor adalah *Community Organization And Community Development (COCD)*. *COCD* sebagai metode pekerjaan sosial dengan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial masyarakat secara umum dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara khusus.

Menurut Edi Suharto (2010:37) *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Secara singkat *community development* adalah suatu cara kerja untuk memecahkan masalah masyarakat. Dengan demikian penggunaan dari kedua metode ini dalam tahap pemahaman serta analisis masalah di masyarakat dimana *community organization* adalah sebagai metode intervensi yang ditekankan terhadap pemecahan masalah, sedangkan *community development* adalah sebagai proses interaksi sosial yang penekanannya terhadap perubahan sosial.

Teknik yang akan digunakan dalam program ini adalah penyuluhan dan fasilitasi.

1) Penyuluhan

Teknik penyuluhan digunakan dalam program ini agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras dengan membuat Lubang Cerdas Organik dan juga merawatnya. Penyuluhan dilaksanakan sebagai Teknik menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Program Lubang Cerdas Organik, pengelolaan sampah, dan manfaat merawat Lubang Cerdas Organik.

2) Fasilitasi

Fasilitasi dalam program ini adalah mendampingi masyarakat melalui TKM untuk membuat Lubang Cerdas Organik di tiap-

tiap rumah warga Desa Soreang. Praktikan akan bekerja sama dengan Tim Kerja Masyarakat yang terbagi di setiap RW untuk mendampingi masyarakat dalam pembuatan Lubang Cerdas Organik.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan**

Sebelum melaksanakan program, perlu dilakukan penyusunan rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Adapun rincian rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan sebagai berikut:

*Tabel 2.4. 2 RAB Program Mas Kelik*

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Administrasi</b>					
1.	Proposal Pengajuan	30	Lembar	500	15.000
2.	Surat Menyurat	123	Lembar	500	61.500
<b>Jumlah</b>					<b>76.500</b>
<b>Logistik</b>					
3.	Banner	1	Buah	150.000	150.000
<b>Jumlah</b>					<b>150.000</b>
<b>Konsumsi</b>					
4.	Snack Narasumber	2	Pack	7.000	14.000
5.	Snack Peserta & Panitia	130	Pack	7.000	910.000
6.	Makan Siang Narasumber	2	Pack	15.000	30.000
7.	Makan Siang Perwakilan Desa	1	Pack	15.000	15.000
<b>Jumlah</b>					<b>969.000</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					<b>1.195.500</b>

Adapun rincian alat - alat yang dibutuhkan dalam Program Mas Kelik (Masyarakat Kelola Sampah Organik) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. 3 Alat-alat dalam Program Mas Kelik

No	Alat	Satuan	Jumlah
<b>Kegiatan Sosialisasi tentang Program Lubang Cerdas Organik (LCO)</b>			
1.	Sound System	Buah	1
2.	Microphone	Buah	2
3.	Proyektor	Buah	1
4.	Laptop	Buah	1
5.	Meja	Buah	2
6.	Kursi	Buah	150
<b>Kegiatan Pendampingan Pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO)</b>			
7.	Bor tanah	Buah	24
8.	Pipa PVC (setiap rumah)	Buah	2
9.	Penutup Pipa (setiap rumah)	Buah	2

#### g. Analisis Kelayakan Program

Analisis uji kelayakan dilakukan untuk mengetahui kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari program yang akan dilaksanakan. Berikut matriks analisis kelayakan program (analisis SWOT):

Tabel 2.4. 4 Analisis SWOT Program Mas Kelik

<b>Internal</b>	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program LCO sudah berhasil dilaksanakan di Kp. Sukamanah</li> <li>2. Tingginya antusias masyarakat Desa Soreang</li> <li>3. Kelompok Saber dan pengurus Bank Sampah Beriman aktif dan memiliki semangat yang tinggi dalam memperhatikan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah organic</li> <li>2. Menurunnya kesadaran masyarakat untuk merawat LCO</li> </ol>
<b>Eksternal</b>	<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>Strategi SO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung</li> <li>2. Masih adanya perilaku gotong royong di masyarakat</li> <li>3. Sebagian besar rumah masyarakat masih terdapat pekarangan yang dapat digunakan untuk membuat LCO</li> <li>4. Masyarakat mau menerima perubahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan seluruh pihak (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Karang Taruna, Kelompok Saber, Pengurus Bank Sampah) dalam pelaksanaan program</li> <li>2. Pembuatan Lubang Cerdas Organik dapat dilaksanakan di semua wilayah Desa Soreang</li> </ol>	<b>Strategi WO</b>
	<b>Ancaman (Threats)</b>	<b>Strategi ST</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterbatasan alat (bor) untuk membuat LCO</li> <li>2. Terdapat rumah yang tidak memiliki pekarangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kegiatan pembuatan LCO dilakukan secara bergilir</li> <li>2. Masyarakat yang tidak memiliki pekarangan rumah, dapat membuat LCO di pekarangan rumah tetangga terdekat</li> <li>3. Mengajukan tambahan bantuan alat (bor) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung</li> </ol>	<b>Strategi WT</b>
		<b>Strategi WO</b>
		<b>Strategi WT</b>

Program ini layak untuk dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mengatasi hambatan yang ada. Strength (S) lebih besar daripada Weakness (W) dan Opportunity (O) lebih besar daripada Threats (T).

#### h. Jadwal dan Langkah-langkah

Program akan berjalan dengan sistematis dan teratur dengan dilakukannya penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan program dengan tepat waktu.

Tabel 2.4. 5 Jadwal Kegiatan Program Mas Kelik

Langkah Kegiatan	Mei				Juni	
	Minggu Ke					
	1	2	3	4	1	2
<b>1. Persiapan</b>						
Membentuk kepanitiaan						
Melakukan rapat konsep kegiatan dan penjadwalan kerja bersama						
Menyatakan komitmen untuk mengungkapkan janji hati						
Membuat proposal kegiatan dan keperluan surat menyurat						
Membagikan surat undangan kepada narasumber dan peserta						
Menyiapkan tempat dan alat-alat yang dibutuhkan						
<b>2. Pelaksanaan</b>						
Sosialisasi tentang Program Lubang Cerdas Organik (LCO)						
Pendampingan Pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO) di seluruh RW di Desa Soreang						
<b>3. Pengakhiran</b>						
Evaluasi kegiatan						
Pembuatan laporan pertanggungjawaban						
Pembubaran tim kerja masyarakat						

Berdasarkan matriks di atas, kegiatan dilaksanakan melalui tiga (3) tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

##### 1) Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan pada bulan Mei minggu pertama dan kedua dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Membentuk Kepanitiaan  
Pada tahap ini akan dibentuk kepanitiaan dengan wujud Tim Kerja Masyarakat yang terdiri dari ketua RW dan anggota karang taruna di setiap RW.
- b) Melakukan Rapat Konsep Kegiatan dan Penjadwalan Kerja Bersama  
Pelaksanaan rapat diadakan untuk konsep sosialisasi program Lubang Cerdas Organik dan kegiatan pembuatan LCO di setiap Kampung/RW yang akan dilakukan. Sosialisasi yang akan dilaksanakan bertempat di Balai Desa Soreang dengan mengundang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung sebagai narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan pembuatan Lubang Cerdas Organik di setiap Kampung. Dalam kegiatan tersebut, ketua RW bertanggung jawab atas sistem pembagian jadwal pelaksanaan kegiatan, sedangkan karang taruna bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam saat pembuatan LCO. Setelah membahas konsep kegiatan, Tim Kerja Masyarakat akan menyusun jadwal kerja bersama selama proses pelaksanaan program Mas Kelik (Masyarakat Kelola Sampah Organik).
- c) Menyatakan Komitmen Untuk Mengungkapkan Janji Hati  
Tim Kerja Masyarakat menyatakan komitmen untuk menjalankan program ini dengan mengungkapkan janji hati, sebagai bentuk komitmen agar mau bekerja sama menyelesaikan program ini.
- d) Membuat Proposal Kegiatan Dan Keperluan Surat Menyurat  
Menyusun proposal kegiatan dan surat izin yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Soreang dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
- e) Membagikan surat undangan kepada narasumber dan peserta  
Tim Kerja Masyarakat membagikan surat undangan pelaksanaan Program Mas Kelik (Masyarakat Kelola Sampah Organik) yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bandung selaku narasumber. Sedangkan ketua RT, kader PKK, kelompok Saber, pengurus karang taruna (bidang lingkungan hidup) sebagai peserta sosialisasi.
- f) Menyiapkan Tempat dan Alat-Alat yang Dibutuhkan  
Tim Kerja Masyarakat mempersiapkan kebutuhan alat-alat yang dibutuhkan dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO).

## 2) Pelaksanaan

Program Mas Kelik (Masyarakat Kelola Sampah Organik) dilaksanakan pada bulan Mei minggu ketiga dan Juni minggu pertama sampai dengan minggu kedua, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi tentang Program Lubang Cerdas Organik (LCO)  
Rangkaian program diawali dengan kegiatan sosialisasi tentang program Lubang Cerdas Organik (LCO) dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang program Lubang Cerdas Organik (LCO) termasuk teknik pembuatannya, dan pengetahuan tentang cara mengelola sampah organik untuk kelestarian lingkungan. Narasumber dari kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.
- b) Pendampingan Pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO) di seluruh RW di Desa Soreang  
Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO). Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Desa Soreang agar manfaat dari Lubang Cerdas Organik dapat dirasakan oleh semua masyarakat di Desa Soreang dan terciptanya lingkungan yang sehat, tertib, dan selaras di Desa Soreang. Pembuatan Lubang Cerdas Organik akan didampingi oleh anggota karang taruna di setiap RW.

## 3) Pengakhiran

Tahap terakhir dilaksanakan pada bulan Juni Minggu pertama dan kedua dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Evaluasi Kegiatan  
Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan program. Evaluasi dilaksanakan dengan penyebaran angket kepada sasaran program yaitu masyarakat Desa Soreang melalui ketua RT.
- b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban  
Setelah terlaksananya evaluasi, praktikan bersama seluruh panitia membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada pihak Desa Soreang.
- c) Pembubaran Tim Kerja Masyarakat  
Setelah semua kegiatan dilaksanakan, Tim Kerja Masyarakat (TKM) Program Mas Kelik (Masyarakat Kelola Sampah Organik) dibubarkan.

## **E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana**

### **1. Gambaran Umum Masalah**

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa – Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).

Desa Soreang sendiri memang tidak termasuk desa yang rawan terjadi bencana, tetapi ada beberapa kejadian bencana yang pernah terjadi di Desa Soreang, diantaranya adalah banjir yang disebabkan oleh saluran irigasi yang jebol dan kebakaran yang disebabkan oleh adanya arus listrik yang konslet. Disamping itu, meskipun Desa Soreang tidak termasuk desa yang rawan terjadi bencana, potensi terjadinya bencana tetap ada, salah satunya adalah bencana gempa bumi.

Menurut BNPB, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan.

Gempa bumi tetap memiliki potensi untuk terjadi di Desa Soreang. Berdasarkan analisis Aplikasi inARISK yang merupakan aplikasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, didapatkan hasil bahwa Desa Soreang memiliki potensi bencana gempa bumi kategori kelas tinggi. Pada kondisi ini, jika dilihat dari letak geografis Kabupaten Bandung dikelilingi oleh beberapa gunung dan perbukitan. Kecamatan Soreang sendiri berada kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut, di pojok selatan Cekungan Bandung dengan kontur tanah cenderung melandai ke utara dan timur sementara di selatan terdapat perbukitan yang merupakan bagian dari pegunungan Bandung Selatan.

Letak topografi tersebut, dapat memungkinkan terjadinya risiko bencana gempa bumi yang apabila masyarakat tidak memiliki kesiapan, akan menimbulkan kerentanan yang dapat memberikan

dampak negatif jika sampai terjadi bencana gempa bumi. Selain itu, bencana gempa bumi terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi oleh manusia.

Maka dari itu, perlu dilakukan usaha mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari adanya bencana gempa bumi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan dan kesiapsiagaan bencana gempa bumi sejak usia dini. Praktikan tertarik untuk mendalami tentang upaya kesiapsiagaan bencana gempa bumi pada anak-anak di SD Cibiru yang merupakan salah satu Sekolah Dasar yang terletak di Desa Soreang.

## **2. Tinjauan Konsep**

### **a. Konsep Bencana**

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP) (dalam Soehatman Ramli, 2010), bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana.

Dari dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian bencana adalah peristiwa yang terjadi karena faktor alam/non alam/manusia yang mengancam kehidupan manusia sehingga menimbulkan kerugian secara materiil dan non materiil.

Dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana terbagi menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- 1) Bencana alam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- 2) Bencana nonalam, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

- 3) Bencana sosial, bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

**b. Konsep Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api.

Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Berdasarkan penyebabnya
  - a) Gempa Vulkanik  
Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.
  - b) Gempa Tektonik  
Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di *zone* penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat.
  - c) Gempa Reruntuhan  
Gempa runtuh atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Gempa ini hanya berdampak kecil dan wilayahnya sempit.
- 2) Berdasarkan kedalamannya
  - a) Gempa bumi dalam  
Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang pusat gempanya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya.
  - b) Gempa bumi menengah  
Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa.

c) Gempa bumi dangkal

Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar.

Terjadinya gempa bumi dapat menimbulkan beberapa dampak dalam kehidupan, yaitu berdampak secara fisik maupun sosial.

1) Dampak fisik

Beberapa dampak fisik yang diakibatkan gempa bumi adalah bangunan hancur dan roboh, tanah longor akibat guncangan, korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak dan jalan menjadi putus. Selain itu, gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami.

2) Dampak sosial

Dalam Soekanto (2006:374) dampak sosial merupakan akibat dari masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Beberapa dampak sosial yang dapat terjadi adalah kemiskinan, kelaparan, penyakit.

**c. Konsep Penanggulangan Bencana**

Dalam UU No 24 Tahun 2007, Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Tahapan penanggulangan bencana terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Tahap Pra Bencana

Dalam tahap ini, terdapat dua situasi yaitu, situasi tidak ada bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Kegiatan yang dilakukan dalam situasi tidak ada bencana meliputi perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, Pendidikan, pelatihan, penelitian, penataan tata ruang. Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana, kegiatan yang dilakukan meliputi mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan.

2) Tahap Tanggap Darurat

Tahap tanggap darurat dilakukan saat kejadian bencana terjadi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana meliputi kajian secara cepat dan tepat, status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap

kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

3) Tahap Pascabencana

Tahap pascabencana dilakukan setelah terjadi bencana dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi meliputi renovasi sarana dan prasarana, rehabilitasi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Sedangkan rekonstruksi meliputi kamtib dan lingkungan.

### 3. Asesmen

#### a. Identifikasi Masalah

Dalam mengidentifikasi permasalahan terkait kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap Bencana Gempa Bumi, praktikan menggali informasi melalui wawancara dan pengamatan langsung. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah SD Cibiru dan pengamatan langsung dilakukan di lingkungan SD Cibiru. Hasil wawancara tersebut praktikan gunakan untuk menentukan penyebab masalah, dampak masalah, dan fokus masalah yang dikaji dengan menggunakan tools pekerjaan sosial “pohon masalah”.

Adapun dalam wawancara yang dilakukan praktikan dengan Ibu Roro selaku Kepala Sekolah SD Cibiru, beberapa informasi yang ditanyakan adalah seputar sejauh mana pengetahuan sekolah tentang kesiapsiagaan bencana dan sejauh mana upaya yang telah dilakukan sekolah dalam kesiapsiagaan bencana. Hasil wawancara tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap bencana sebagai berikut:

- 1) Struktur Bangunan Sekolah yang Tidak Tahan Gempa  
Berdasarkan pernyataan narasumber, bangunan SD Cibiru menggunakan batu bata biasa dan belum memenuhi standar bangunan yang tahan gempa.
- 2) Sudah Lama Tidak Dilakukan Simulasi Bencana Gempa Bumi  
Kegiatan simulasi bencana gempa bumi sudah pernah dilakukan oleh pihak puskesmas Soreang, tetapi kegiatan

itu sudah cukup lama dan belum pernah ada kegiatan simulasi yang dilakukan dari pihak lain.

3) Jumlah Siswa yang Cukup Banyak

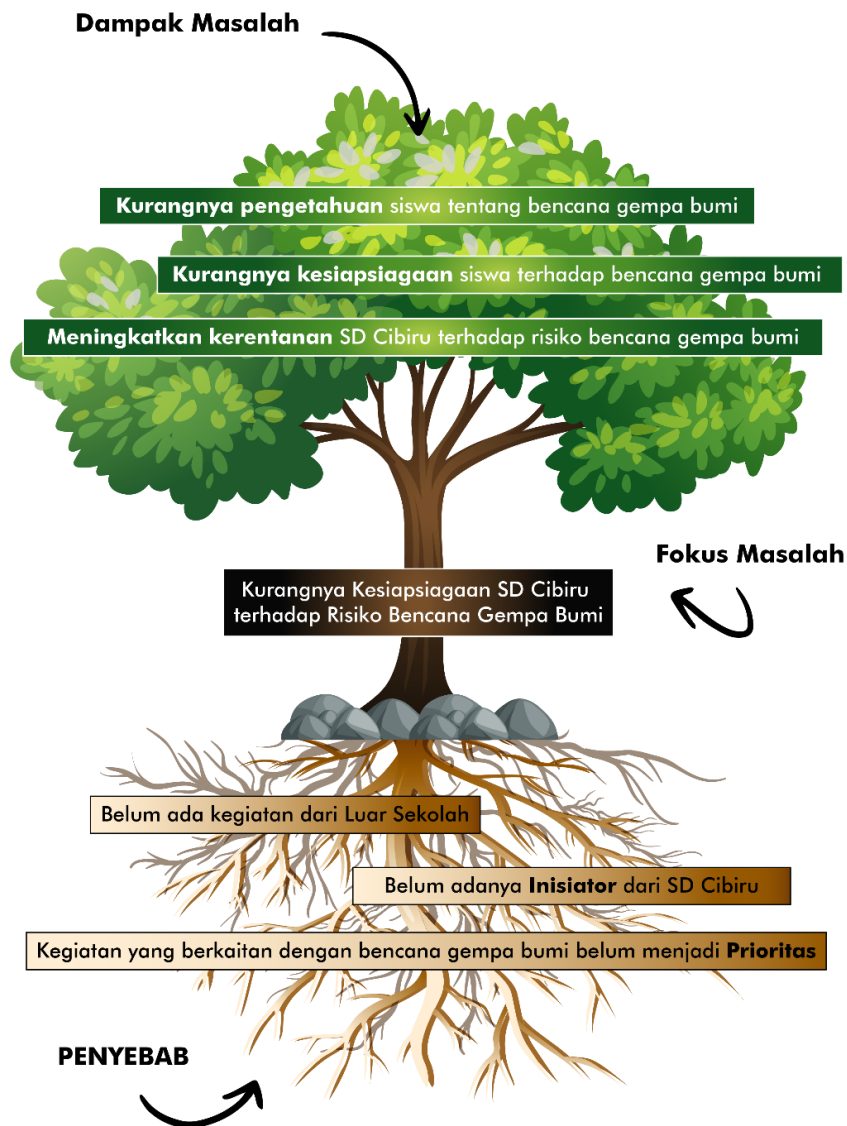
Siswa SD Cibiru berjumlah 600 orang , sedangkan jumlah guru di SD Soreang saat ini adalah 23 orang. Dengan kondisi tersebut, tidak mungkin guru dapat melindungi semua siswa ketika terjadi bencana gempa bumi.

4) Sekolah Berupaya Menyelipkan Pengetahuan Bencana dalam Pembelajaran

Sebagai upaya memberikan pengetahuan tentang bencana kepada siswa, pihak sekolah menyelipkan pengetahuan-pengetahuan tentang bencana dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan upacara, maupun kegiatan sekolah lainnya. Namun, upaya tersebut hanya sebagai pengingat bagi siswa saja untuk selalu berhati-hati ketika terjadi bencana.

5) Sekolah Membutuhkan Bantuan dari Pihak Luar dalam Upaya Kesiapsiagaan Bencana

Upaya yang telah dilakukan oleh sekolah dirasa belum cukup memberikan kesiapan untuk siswa dalam menghadapi situasi bencana. Sekolah berharap adanya kegiatan dari pihak yang kompeten untuk memberikan pengetahuan dan latihan/simulasi menghadapi bencana gempa bumi kepada siswa-siswi SD Cibiru.



Gambar 2.5. 1 Pohon Masalah Isu Penanggulangan Bencana

1) Penyebab Masalah

- a) Kegiatan yang berkaitan dengan bencana gempa bumi belum menjadi prioritas

Desa Soreang yang termasuk ke dalam desa yang tidak rawan terjadi bencana dan belum pernah terjadi bencana gempa bumi yang menimbulkan kerugian di Desa Soreang. Dengan kondisi tersebut, kegiatan yang berkaitan dengan bencana gempa bumi belum menjadi prioritas bagi Desa Soreang.

- b) Belum adanya kegiatan dari luar sekolah

Kegiatan yang berkaitan dengan simulasi dan sosialisasi tentang pengetahuan bencana hanya pernah dilakukan oleh puskesmas Soreang kepada siswa-siswi SD Cibiru. Belum

ada kegiatan yang dilakukan oleh Desa, BPBD, maupun tim Tagana Dinas Sosial.

c) Belum adanya inisiator dari SD Cibiru

Belum adanya inisiator dari pihak SD Cibiru mengajukan diadakannya kegiatan simulasi bencana untuk siswa-siswinya.

2) Dampak Masalah

a) Kurangnya pengetahuan siswa tentang bencana gempa bumi

Siswa-siswi menjadi kurang memiliki pengetahuan tentang bencana gempa bumi karena tidak pernah dilakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana gempa bumi. Khususnya siswa-siswi kelas 1-3 yang mana kegiatan yang pernah dilaksanakan di SD Cibiru sudah cukup lama dan lebih dari tiga tahun.

b) Kurangnya kesiapsiagaan siswa terhadap bencana gempa bumi

Kurangnya pengetahuan mengakibatkan kurangnya kesiapsiagaan siswa untuk menghadapi bencana, baik itu sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana gempa bumi.

c) Meningkatkan kerentanan SD Cibiru terhadap risiko bencana gempa bumi

Risiko bencana gempa bumi akan meningkat karena manajemen risiko yang kurang. Kerentanan menjadi penyebab meningkatnya risiko bencana. Kerentanan yang ada di SD Cibiru meliputi kerentanan fisik dan lingkungan dari kondisi bangunan yang tidak tahan gempa yang ditambah dengan kerentanan sosial dimana siswa-siswi dan guru kurang memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam menghadapi bencana gempa bumi.

3) Fokus Masalah/Masalah Inti/Masalah Utama

Dengan melihat identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, fokus masalah dalam manajemen penanggulangan bencana adalah Kurangnya Kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap Risiko Bencana Gempa Bumi. Adapun fokus masalah tersebut tergambar dengan kondisi di lapangan sebagai berikut:

a) Struktur Bangunan Sekolah yang Tidak Tahan Gempa

b) Sudah Lama Tidak Dilakukan Simulasi Bencana Gempa Bumi

c) Jumlah Siswa yang Cukup Banyak

- d) Sekolah Berupaya Menyelipkan Pengetahuan Bencana dalam Pembelajaran
- e) Sekolah Membutuhkan Bantuan dari Pihak Luar dalam Upaya Kesiapsiagaan Bencana

#### **b. Identifikasi Kebutuhan**

Dengan mengetahui penyebab dan dampak masalah yang telah dikaji dalam pohon masalah, untuk menyelesaikan permasalahan kurangnya kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap risiko Gempa Bumi, kebutuhan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

##### 1) Sosialisasi tentang Bencana Alam

Untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang bencana gempa bumi, diperlukan upaya memberikan informasi dan pengetahuan dasar terkait bencana khususnya bencana alam. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan di SD Cibiru dengan narasumber yang kompeten di bidang penanggulangan bencana. Dengan memiliki pengetahuan mengenai bencana dan dikenalkan dengan cara-cara menghadapi bencana, siswa tidak akan merasa kebingungan saat mereka berada dalam situasi terjadi bencana, khususnya bencana gempa bumi yang terjadi tiba-tiba tanpa bisa diprediksi terlebih dahulu.

##### 2) Simulasi Bencana Gempa Bumi

Selain memiliki pengetahuan tentang bencana, siswa-siswi juga memerlukan keterampilan atau perlu dilakukannya pelatihan dalam menghadapi situasi bencana baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun situasi setelah terjadi bencana. Pelatihan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa bumi, karena jika bencana gempa bumi terjadi saat mereka sedang mengikuti pembelajaran di sekolah, tidak ada orang tua yang dapat melindungi mereka satu per satu, jumlah guru yang tidak banyak juga tidak dapat melindungi mereka secara keseluruhan. Maka dari itu, mereka harus bisa berupaya menyelamatkan diri mereka sendiri yaitu, melalui kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa bumi.

#### **c. Identifikasi Potensi dan Sumber**

Sistem sumber yang terdapat di Desa Soreang untuk mendukung penyelesaian masalah ini adalah

##### 1) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber informal dalam hal ini termasuk orang tua wali dan guru-guru SD Cibiru.

- 2) Sistem Sumber Formal  
Sistem sumber formal dalam hal ini adalah SD Cibiru.
- 3) Sistem Sumber Kemasyarakatan  
Sistem sumber kemasyarakatan dalam hal ini adalah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Bandung, pemerintah Desa Soreang, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

#### **4. Rencana Intervensi**

##### **a. Latar Belakang**

Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan oleh praktikan melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SD Cibiru, permasalahan yang terjadi kaitannya dengan penanggulangan bencana, dimana praktikan melakukan pendalaman tentang kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi, adalah SD Cibiru masih belum memiliki kesiapsiagaan terhadap risiko terjadinya bencana Gempa Bumi. Penyebab utamanya adalah belum pernah diadakannya kegiatan simulasi bencana Gempa Bumi di SD Cibiru untuk siswa-siswinya.

Maka dari itu, untuk meningkatkan kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap bencana Gempa Bumi, diperlukan kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana Gempa Bumi.

Kedua kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan memanfaatkan semua sistem sumber yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan.

##### **b. Tujuan Umum dan Khusus**

Adapun tujuan dari program yang akan dilaksanakan terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum  
Meningkatkan kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap bencana Gempa Bumi.
- 2) Tujuan Khusus
  - a) Meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang bencana alam khususnya bencana Gempa Bumi
  - b) Mengurangi kerentanan sosial SD Cibiru dari risiko bencana Gempa Bumi
  - c) Upaya manajemen risiko bencana Gempa Bumi
  - d) Mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari terjadinya bencana Gempa Bumi

### c. Bentuk Kegiatan dan Program

Nama program yang akan dilaksanakan adalah SD Cibiru Tangguh Bencana. Program tersebut akan terdiri dari dua kegiatan sebagai berikut:

#### 1) Sosialisasi tentang Bencana

Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juni, bertempat di SD Cibiru. Peserta kegiatan adalah siswa-siswi kelas 1 sampai 6 yang akan terbagi menjadi dua sesi. Tujuan dari kegiatan sosialisasi tentang bencana adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang bencana. Hal-hal yang akan disampaikan adalah pengetahuan dasar terkait jenis-jenis bencana, simbol-simbol dalam bencana termasuk rambu-rambu untuk evakuasi, dan prosedur kesiapsiagaan bencana baik sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana. Narasumber yang akan menjadi pembicara dalam sosialisasi ini adalah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Harapan dari dilaksanakannya sosialisasi ini adalah siswa-siswi memahami situasi bencana dan tidak kebingungan ketika mereka berada dalam situasi bencana, khususnya bencana gempa bumi.

#### 2) Simulasi Bencana Gempa Bumi

Kegiatan simulasi adalah kelanjutan dari kegiatan sosialisasi tentang bencana. Siswa-siswi akan diberikan pelatihan dengan simulasi apabila terjadi bencana gempa bumi. Kegiatan simulasi akan diikuti oleh semua siswa-siswi dan guru-guru di SD Cibiru dan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu simulasi di dalam ruang kelas dan simulasi di luar ruang kelas termasuk di taman, lapangan, halaman belakang, dan *green house* yang ada di lingkungan SD Cibiru. Pada saat kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa bumi yang dipandu oleh instruktur dari TAGANA Dinas Sosial Kabupaten Bandung, instruktur akan memberikan contoh-contoh terlebih dahulu tentang tahapan-tahapan yang dilakukan ketika simulasi mitigasi bencana gempa bumi. Tahapan-tahapan yang akan disampaikan antara lain adalah siswa-siswi diarahkan untuk tidak panik, melindungi organ-organ vital dengan tangan ataupun barang yang ada di sekitar, keluar ruangan, dan berkumpul di titik kumpul

Tabel 2.5. 1 Rencana Program SD Cibiru Tangguh Bencana

No	Kegiatan Penyelesaian Masalah	Tujuan	Indikator Keberhasilan	Sasaran	Penanggung Jawab	Pelaksana
1.	Sosialisasi tentang Bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang bencana alam khususnya bencana Gempa Bumi</li> <li>2. Meningkatkan pengetahuan siswa-siswi tentang tahapan menghadapi situasi bencana Gempa Bumi</li> <li>3. Mengurangi kerentanan sosial SD Cibiru dari risiko bencana Gempa Bumi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siswa-siswi memiliki pengetahuan tentang bencana khususnya bencana Gempa Bumi</li> <li>2. Siswa-siswi memiliki pengetahuan tentang tahapan menghadapi situasi bencana Gempa Bumi</li> <li>3. Berkurangnya kerentanan sosial di SD Cibiru dari risiko bencana Gempa Bumi</li> </ol>	Siswa-siswi SD Cibiru	Kepala Sekolah SD Cibiru	Guru-guru SD Cibiru dan TAGANA Kabupaten Bandung (Narasumber)
2.	Simulasi Bencana Gempa Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari terjadinya bencana Gempa Bumi</li> <li>2. Meningkatkan kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap bencana Gempa Bumi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila terjadi bencana Gempa Bumi</li> <li>2. SD Cibiru memiliki kesiapsiagaan yang cukup terhadap bencana Gempa Bumi</li> </ol>	Siswa-siswi SD Cibiru	Kepala Sekolah SD Cibiru	Guru-guru SD Cibiru dan TAGANA Kabupaten Bandung (Narasumber)

#### **d. Sistem Partisipan**

Netting (2017) mengatakan bahwa sistem partisipan terdiri atas sistem inisiator, sistem agen perubahan, sistem klien, sistem pendukung, sistem pengendali, sistem pelaksana perubahan, sistem sasaran, dan sistem kegiatan. Adapun sistem partisipan dalam rencana intervensi masalah ini adalah sebagai berikut:

- 1) **Sistem Inisiator (*Initiator System*)**  
Sistem inisiator merupakan orang yang pertama kali menaruh perhatian adanya masalah dan merasa perlu adanya program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu praktikan sebagai pekerja sosial.
- 2) **Sistem Agen Perubahan (*Change Agent*)**  
Sistem agen perubahan merupakan seseorang atau lembaga yang mengkoordinasikan upaya perubahan atau pemecahan masalah, yaitu kepala sekolah SD Cibiru
- 3) **Sistem Klien (*Client System*)**  
Sistem klien dalam program ini ialah siswa-siswi SD Cibiru, sebagai penerima utama dalam usaha perubahan dan melibatkan diri dalam pelaksanaan program.
- 4) **Sistem Pendukung (*Support System*)**  
Sistem pendukung merupakan pihak-pihak yang diharapkan memberikan dukungan dalam penyelesaian masalah yang ada, yaitu Pemerintah Desa Soreang, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
- 5) **Sistem Pengendali (*Controlling System*)**  
Sistem pengendali adalah seseorang atau pihak yang memiliki otoritas dan kekuatan untuk menyetujui dan memerintahkan pelaksanaan atas perubahan yang diusulkan tersebut. Dalam program ini yaitu, Kepala Desa Soreang.
- 6) **Sistem Pelaksana Perubahan (*Implementing System*)**  
Dalam hal ini sistem pelaksana perubahan yaitu, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial Kabupaten Bandung yang akan mengkoordinasikan usaha perubahan atau penyelesaian masalah.
- 7) **Sistem Sasaran (*Target System*)**  
Sistem sasaran merupakan orang/sekumpulan orang-orang yang dijadikan sasaran perubahan yang diharapkan dapat memengaruhi dan mencapai tujuan pertolongan. Sistem sasaran utama dalam program ini ialah para orang tua wali murid dan bapak/ibu guru SD Cibiru.

8) Sistem Kegiatan (*Action System*)

Sistem kegiatan merupakan orang-orang yang bersama pekerja sosial berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas dan mencapai tujuan perubahan. Dalam program ini yaitu, kepala sekolah dan bapak/ibu guru di SD Cibiru.

**e. Metode dan Teknik**

Metode pekerjaan sosial yang akan digunakan dalam pelaksanaan program SD Cibiru Tangguh Bencana adalah *Community Organization And Community Development (COCD)*. *COCD* sebagai metode pekerjaan sosial dengan perencanaan, pengorganisasian, atau proyek pengembangan berbagai aktivitas pembuatan program yang bertujuan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan sosial masyarakat secara umum dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara khusus.

Menurut Edi Suharto (2010:37) *Community Development* (Pengembangan Masyarakat) merupakan salah satu metode pekerjaan sosial yang tujuan utamanya adalah memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mendayagunakan sumber yang ada serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Secara singkat *community development* adalah suatu cara kerja untuk memecahkan masalah masyarakat. Dengan demikian penggunaan dari kedua metode ini dalam tahap pemahaman serta analisis masalah di masyarakat dimana *community organization* adalah sebagai metode intervensi yang ditekankan terhadap pemecahan masalah, sedangkan *community development* adalah sebagai proses interaksi sosial yang penekanannya terhadap perubahan sosial.

Teknik yang akan digunakan dalam program ini adalah tanya jawab dan edukasi.

1) Tanya Jawab

Sudirman dalam Zainal Aqib dan Ali Murtadlo (2016:203) menyatakan bahwa “tanya jawab diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari pendidik kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik kepada pendidik”.

Teknik tanya jawab akan digunakan dalam kegiatan sosialisasi tentang bencana. Teknik ini dipilih karena sasaran klien dalam program SD Cibiru Tangguh Bencana adalah anak-anak. Maka dari itu, perlu dilakukan cara agar mereka dapat berpartisipasi aktif dan memahami informasi yang disampaikan dalam sosialisasi yaitu, dengan cara melibatkan

mereka melalui teknik tanya jawab antara narasumber dengan siswa-siswi.

2) Edukasi

Menurut Fitriani (2011) edukasi diartikan sebagai pendidikan yang diperoleh melalui belajar, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak tahu mengatasinya sampai tahu solusinya.

Edukasi dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam program SD Cibiru Tangguh Bencana, teknik edukasi diterapkan dalam simulasi mitigasi bencana Gempa Bumi. Siswa-siswi diberikan pengetahuan dan pelatihan dalam menghadapi situasi sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana.

**f. Rencana Anggaran Biaya dan alat yang dibutuhkan**

Sebelum melaksanakan program, perlu dilakukan penyusunan rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Adapun rincian rencana anggaran biaya dan alat yang dibutuhkan sebagai berikut:

*Tabel 2.5. 2 RAB Program SD Cibiru Tangguh Bencana*

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>Administrasi</b>					
1.	Proposal Pengajuan	15	Lembar	500	7.500
2.	Surat Menyurat	8	Lembar	500	4.000
<b>Jumlah</b>					<b>11.500</b>
<b>Logistik</b>					
3.	Banner	1	Buah	150.000	150.000
<b>Jumlah</b>					<b>150.000</b>
<b>Konsumsi</b>					
4.	Snack Narasumber	2	Pack	7.000	14.000
5.	Snack Panitia	24	Pack	7.000	168.000
6.	Makan Siang Narasumber	2	Pack	15.000	30.000
7.	Makan Siang Panitia	24	Pack	15.000	360.000
<b>Jumlah</b>					<b>572.000</b>
<b>Jumlah Keseluruhan</b>					<b>733.500</b>

Adapun rincian alat-alat yang dibutuhkan dalam Program SD Cibiru Tangguh Bencana adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.5. 3 Alat-Alat Program SD Cibiru Tangguh Bencana*

No	Alat	Satuan	Jumlah
<b>Kegiatan Sosialisasi tentang Bencana</b>			
1.	Sound System	Buah	1
2.	Microphone	Buah	2
3.	Proyektor	Buah	1
4.	Laptop	Buah	1
5.	Meja	Buah	2
6.	Kursi	Buah	4
<b>Kegiatan Simulasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi</b>			
7.	Peluit	Buah	1
8.	Mikrofon Megaphone	Buah	1
9.	Meja	Buah	2

**g. Analisis Kelayakan Program**

Untuk menganalisis kelayakan program, maka diperlukan analisis SWOT sehingga dapat dijadikan tolak ukur menganalisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman di dalam program “SD Cibiru Tangguh Bencana” .

Tabel 2.5. 4 Analisis SWOT Program SD Cibiru Tangguh Bencana

<b>Internal</b>	<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak sekolah terbuka dalam menerima perubahan</li> <li>2. Adanya kemauan dari pihak sekolah untuk melaksanakan program</li> <li>3. Tingginya rasa kepedulian dari guru terhadap siswa-siswi</li> <li>4. Adanya keinginan dan dukungan dari orang tua siswa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah belum pernah melakukan kegiatan berkaitan dengan simulasi bencana sebelumnya</li> <li>2. Tempat yang terbatas untuk melakukan sosialisasi</li> </ol>
<b>Eksternal</b>	<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Strategi WO</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Dinas Sosial Kab. Bandung dan pemerintah Desa Soreang</li> <li>2. Ada orang tua siswa yang termasuk bagian dari TAGANA Kab. Bandung</li> </ol>	<b>Strategi SO</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan simulasi bencana gempa bumi untuk siswa-siswi SD Cibiru</li> <li>2. Kegiatan sosialisasi dan simulasi dilaksanakan secara bergantian/ terbagi menjadi 2 sesi</li> </ol>
<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan tidak terkoordinir dengan baik karena belum pernah dilaksanakan sebelumnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan guru-guru dan narasumber dengan baik sebelum menjalankan kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pembagian sesi kegiatan dan melakukan gladi bersih sebelum kegiatan dilaksanakan</li> </ol>

Program ini layak untuk dilaksanakan karena terdapat strategi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan mengatasi hambatan yang ada. *Strength (S)* lebih besar daripada *Weakness (W)* dan *Opportunity (O)* lebih besar daripada *Threats (T)*.

#### h. Jadwal dan Langkah-langkah

Program akan berjalan dengan sistematis dan teratur dengan dilakukannya penyusunan jadwal dan langkah-langkah kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan program dengan tepat waktu.

Tabel 2.5. 5 Jadwal dan Langkah-langkah Kegiatan Program SD Cibiru Tangguh Bencana

Langkah Kegiatan	Mei			
	Minggu Ke			
	1	2	3	4
<b>1. Persiapan</b>				
Membentuk kepanitiaan	■			
Melakukan rapat konsep kegiatan dan penjadwalan kerja bersama	■			
Menyatakan komitmen untuk mengungkapkan janji hati	■			
Membuat proposal kegiatan dan keperluan surat menyurat	■			
Membagikan surat undangan kepada narasumber dan peserta		■		
Menyiapkan tempat dan alat-alat yang dibutuhkan		■		
<b>2. Pelaksanaan</b>				
Sosialisasi tentang Bencana			■	
Simulasi Bencana Gempa Bumi			■	
<b>3. Pengakhiran</b>				
Evaluasi kegiatan			■	
Pembuatan laporan pertanggungjawaban				■
Pembubaran panitia				■

Berdasarkan matriks di atas, kegiatan dilaksanakan melalui tiga (3) tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

##### 1) Persiapan

Tahap persiapan dilaksanakan pada bulan Mei minggu pertama dan kedua dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

##### a) Membentuk Kepanitiaan

Pada tahap ini akan dibentuk kepanitiaan yang terdiri dari guru-guru SD Cibiru.

- b) Melakukan Rapat Konsep Kegiatan dan Penjadwalan Kerja Bersama

Pelaksanaan rapat diadakan untuk konsep sosialisasi tentang bencana dan kegiatan simulasi bencana gempa bumi yang akan dilakukan. Sosialisasi yang akan dilaksanakan bertempat di ruang pertemuan SD Cibiru dengan mengundang Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagai narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Simulasi Bencana Gempa Bumi. Setelah membahas konsep kegiatan, panitia akan menyusun jadwal kerja bersama selama proses pelaksanaan program SD Cibiru Tangguh Bencana.

- c) Menyatakan Komitmen Untuk Mengungkapkan Janji Hati  
Panitia kegiatan menyatakan komitmen untuk menjalankan program ini dengan mengungkapkan janji hati, sebagai bentuk komitmen agar mau bekerja sama menyelesaikan program ini.
- d) Membuat Proposal Kegiatan Dan Keperluan Surat Menyurat  
Menyusun proposal kegiatan dan surat izin yang ditujukan kepada Pemerintah Desa Soreang dan Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
- e) Membagikan surat undangan kepada narasumber dan peserta  
Panitia membagikan surat undangan pelaksanaan Program sd Cibiru Tangguh Bencana yang ditujukan kepada Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bandung selaku narasumber dan kepada orang tua murid SD Cibiru.
- f) Menyiapkan Tempat dan Alat-Alat yang Dibutuhkan  
Panitia mempersiapkan kebutuhan alat-alat yang dibutuhkan dan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana Gempa Bumi.

## 2) Pelaksanaan

Program SD Cibiru Tangguh Bencana dilaksanakan pada bulan Mei minggu ketiga, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi tentang Bencana  
Rangkaian program diawali dengan kegiatan sosialisasi tentang Bencana dengan tujuan memberikan pengetahuan siswa-siwi tentang jenis-jenis bencana, simbol-simbol bencana. Narasumber dari kegiatan ini adalah Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
- b) Simulasi Bencana Gempa Bumi  
Kegiatan selanjutnya adalah simulasi bencana Gempa Bumi. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SD Cibiru. Kegiatan

akan dilaksanakan di dua tempat yaitu di dalam ruangan dan di luar ruangan.

3) Pengakhiran

Tahap terakhir dilaksanakan pada bulan Mei minggu keempat dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a) Evaluasi Kegiatan

Pada tahap ini, evaluasi dilakukan untuk mengukur bagaimana keberhasilan program. Evaluasi dilaksanakan dengan penyebaran angket kepada sasaran program yaitu siswa-siswi SD Cibiru.

b) Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban

Setelah terlaksananya evaluasi, praktikan bersama seluruh panitia membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan pelaksanaan program mulai dari tahap persiapan sampai dengan pengakhiran. Laporan tersebut diberikan kepada pihak SD Cibiru dan Desa Soreang.

c) Pembubaran Panitia

Setelah semua kegiatan dilaksanakan, panitia Program SD Cibiru Tangguh Bencana dibubarkan.

### **III. Kesimpulan dan Rekomendasi**

#### **A. Kesimpulan**

Praktikum laboratorium sangat bermanfaat bagi praktikan dalam mengembangkan teknik-teknik pekerjaan sosial yang sudah dipelajari dalam Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Dalam praktikum, praktikan menerapkan tahapan intervensi mulai dari inisiasi sosial sampai dengan perencanaan intervensi. Selain itu, praktikan menerapkan teknik inisiasi sosial, transect walk, wawancara, dan home visit.

Teknologi yang diterapkan dalam praktikum ini adalah teknologi pohon masalah untuk menganalisis isu masalah yang praktikan temui di masyarakat. Dari praktikum laboratorium ini, praktikan menambah pengalaman dalam membangun komunikasi dengan stakeholder dan mendekatkan diri dengan masyarakat sebagai permulaan dari praktikum selanjutnya.

##### **1. Analis Jaminan Sosial**

Pada profil analis jaminan sosial, praktikan mengambil isu masalah terkait jaminan kesehatan, dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat fakir miskin yang belum mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK). Dari isu masalah tersebut, program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah “Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK APBD” dengan bentuk kegiatan sosialisasi dan fasilitasi. Program tersebut bertujuan untuk Pemerataan PBI-JK bagi seluruh masyarakat fakir miskin di Desa Soreang.

##### **2. Analis Sumber Dana Bantuan Sosial**

Pada profil analis sumber dana bantuan sosial, praktikan mengambil isu masalah terkait Program Keluarga Harapan, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam menjalankan kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada layanan kesehatan. Dari isu masalah tersebut, program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah “Keluarga Penerima Manfaat Disiplin Laporan” dengan bentuk kegiatan sosialisasi sistem laporan pengeluaran alokasi dana bantuan PKH. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam melaksanakan kewajiban sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen kesehatan.

### 3. Analisis Pemberdayaan Sosial

Pada profil analisis pemberdayaan sosial, praktikan mengambil isu masalah terkait program pemberdayaan masyarakat miskin dalam program pengolahan sampah menjadi kerajinan di Bank Sampah Beriman, dalam pelaksanaannya program tersebut masih dilaksanakan dengan belum optimal. Dari isu masalah tersebut, program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah “Bank Sampah Beriman 3M (Maju Modern Mendunia)” dengan bentuk kegiatan peningkatan kapasitas dan *focus group discussion*. Program tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Program Pengolahan Sampah menjadi Kerajinan di Bank Sampah Beriman.

### 4. Analisis Penataan Lingkungan Sosial

Pada profil analisis penataan lingkungan sosial, praktikan mengambil isu masalah terkait Program Lubang Cerdas Organik (LCO) atau resapan biopori, yang dalam pelaksanaannya sebagai upaya mengelola sampah belum secara optimal. Dari isu masalah tersebut, program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah “Mas Kelik (Masyarakat Kelola Sampah Organik)” dengan bentuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan Lubang Cerdas Organik (LCO) di seluruh RW di Desa Soreang. Program tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Lubang Cerdas Organik (LCO) sebagai upaya pengelolaan Sampah Organik.

### 5. Analisis Penanggulangan Bencana

Pada profil analisis penanggulangan bencana, praktikan mengambil isu masalah terkait tahap pra bencana pada situasi tidak ada bencana, yang dalam pelaksanaannya praktikan memilih SD Cibiru sebagai sasaran. Pada tahap tersebut, isu masalah yang ditemukan praktikan adalah masih kurangnya kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap risiko bencana Gempa Bumi. Dari isu masalah tersebut, program rencana intervensi yang direkomendasikan praktikan untuk menangani masalah tersebut adalah “SD Cibiru Tangguh Bencana” dengan bentuk kegiatan sosialisasi dan simulasi. Program tersebut bertujuan untuk Meningkatkan kesiapsiagaan SD Cibiru terhadap risiko bencana Gempa Bumi.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, praktikan mengajukan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum laboratorium. Rekomendasi ini diajukan sebagai upaya peningkatan

pelaksanaan praktikum laboratorium bagi praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

1. Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
  - a. Menetapkan Pedoman Praktikum Laboratorium yang sudah disesuaikan dan diperbaharui yang mana Pedoman ini adalah landasan dan petunjuk teknis pelaksanaan praktikum laboratorium
  - b. Menambahkan Guideline yang spesifik pada Pedoman Praktikum Laboratorium sebagai tambahan langkah-langkah pada pelaksanaan praktikum
  - c. Memerinci format laporan praktikum untuk mempermudah praktikan dalam menyusun dan memberikan standar yang sama kepada seluruh praktikan.
2. Politeknik Kesejahteraan Sosial
  - a. Meningkatkan perlindungan dan kenyamanan para praktikan selama di lokasi praktikum
  - b. Meningkatkan fungsi controlling kepada mahasiswa praktikum agar lebih terarah dalam melaksanakan praktikum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Y. (2021, October 8). *Pengertian Edukasi adalah: Macam dan Contoh*. Retrieved from Deepublish Store:  
<https://deepublishstore.com/blog/pengertian-edukasi-adalah/>
- Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 58-62.
- Arisona, R. (2020). Sosialisasi dan Simulasi Mitigasi Bencana Gempa Bumi Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Siswa Sdn 2 Wates Ponorogo . *ASANKA: Journal of Social Science and Education*, 1-7.
- Defitri, M. (2022, July 22). *4 Cara Efektif Mengelola Sampah Organik*. Retrieved from waste4change.com: <https://waste4change.com/blog/cara-jitu-mengelola-sampah-organik-anti-ribet-dan-kotor/>
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan . (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*.
- Handayani, T. W. (2019, August 30). *Penataan Lingkungan Terpadu di Tingkat Kelurahan*. Retrieved from kompasiana.com:  
<https://www.kompasiana.com/haniabd/5d694a350d82300a29627ab4/penataan-lingkungan-terpadu-di-tingkat-kelurahan>
- Hetty Krisnani, S. H. (2017). Perubahan Pola Pikir Masyarakat Mengenai Sampah Melalui Pengolahan Sampah Organik Dan Non Organik Di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kab. Sumedang. *Jurnal Penelitian dan PPM*, 129-389.
- Imran, M. N. (2019). Pendampingan Pembuatan dan Pemasangan Biopori Sebagai Wadah Resapan Air dan Komposting di Kelurahan Biawu Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. *Monsu'ani Tano Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 62-67.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.
- Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*.
- Indriasari, F. N. (2016). Pengaruh Pelatihan Siaga Bencana Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Anak Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Bencana. *Akper Notokusumo Yogyakarta*, 1-8.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019, Agustus 9). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Retrieved from kemensos.go.id:  
<https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>

- Lararenjana, E. (2022, July 19). *Pengertian Lingkungan Secara Umum Menurut Para Ahli, Berikut Pembagiannya*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-lingkungan-secara-umum-menurut-para-ahli-berikut-pembagiannya-klm.html>
- Linda, R. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai). *Jurnal Al-Iqtishad*, 3-8.
- Mdigital. (2020, July 6). *Pengertian Capacity Building dan Contoh penerapannya*. Retrieved from materialdigital.com: <https://www.materidigital.com/pengertian-capacity-building-dan-contoh-penerapannya/>
- Poltekkes Jogja. (n.d.). Retrieved from eprints.poltekkesjogja.ac.id: <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/3327/5/CHAPTER%202.pdf>
- Provinsi Jawa Barat. (2018). *Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Konservasi Sumber Daya Air dan Pengelolaan Sampah Melalui Pembuatan Lubang Cerdas Organik/Lubang Resapan Biopori*. Kabupaten Bandung.
- Purwanto, S. S. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Society and Humanity Studies*, 79-96.
- Rumah.com. (2022, March 25). *Apa Itu Bank Sampah? Pengertian, Mekanisme, dan Manfaatnya*. Retrieved from Rumah.com: <https://www.rumah.com/panduan-properti/bank-sampah-63229>
- Waste 4 Change. (2018, December 21). *Lubang Resapan Biopori: Pencegah Banjir dan Penghasil Kompos*. Retrieved from waste4change.com: <https://waste4change.com/blog/resapan-biopori/>
- Wijaya, P. (2021, March 23). *Edukasi Adalah; Arti, Tujuan, Manfaat, Macam, Metode, dan Contoh Edukasi*. Retrieved from ukulele.co.nz: <https://www.ukulele.co.nz/edukasi-adalah/>

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1. 1 SURAT IZIN PRAKTIKUM



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENYULUHAN SOSIAL  
**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**  
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 367, Bandung 40135 Telepon 022-2504836, 2501330  
Fax. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, email:humas@poltekesos.ac.id

---

Nomor : 0141/7.1.8/DL.02.01/01/2023 Bandung, 13 Januari 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Melaksanakan kegiatan  
Praktikum Laboratorium

**Yth. Kepala Desa Soreang**  
**Kecamatan Soreang**  
**Kabupaten Bandung**  
**Jawa Barat**  
**Di**  
**Soreang**

Mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dalam proses pembelajarannya, diwajibkan melaksanakan praktik lapangan (praktikum). Kegiatan praktikum laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam melakukan asesmen dan rencana intervensi pekerjaan sosial di masyarakat sesuai profil lulusan. Pada proses pelaksanaannya mahasiswa akan menerapkan keterampilan dalam melakukan tahapan praktik pekerjaan sosial yang dimulai dengan melakukan pendekatan awal, kemudian asesmen, dan diakhiri dengan penyusunan rencana intervensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merencanakan menempatkan peserta praktikum mahasiswa Poltekesos Bandung di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat yang rencana pelaksanaan praktikumnya dimulai tanggal 8 Februari s.d. 15 April 2023 (nama mahasiswa praktikan terlampir).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI ;  
2. Peringgal.

## LAMPIRAN 1. 2 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 1



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**  
Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330  
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 0157/9.7/KS.01/01/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial wajib menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Kamis, 2 Februari 2023
W a k t u	: Pk. 08.00 – 11.30 WIB
Materi	: Peningkatan Kompetensi Analisis Jaminan Sosial
Narasumber	: Gayatri Waditra Nirwesti,ME
Tempat	: Gedung Pascasarjana lantai 2 Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 31 Januari 2023



Ketua Prodi  
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Lina Favourita Sutia Putri, Ph.D

## LAMPIRAN 1. 3 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 2



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**  
Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330  
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 0157/9.7/KS.01/02/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial wajib menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

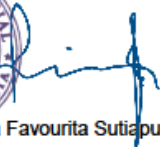
Hari/ Tanggal : Rabu, 22 Februari 2023  
W a k t u : Pk. 10.00 – 12.00 WIB  
Materi : Peningkatan Kompetensi Analisis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial  
Narasumber : Tonton Heriyanto (CSR Manager PT.AAPC Indonesia)  
Tempat : Auditorium Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 17 Februari 2023



Ketua Prodi  
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

  
Lina Favourita Sutia Putri, Ph.D

## LAMPIRAN 1. 4 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 3



### **KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**

Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330  
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 0169/9.7/KS.01/03/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial wajib menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Rabu, 8 Maret 2023
W a k t u	: Pk. 08.00– 11.30 WIB
Materi	: Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial
Narasumber	: Samsul Maarif (Project Manager Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur)
Tempat	: Gedung Auditorium Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 6 Maret 2023

Ketua Prodi  
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial



Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

## LAMPIRAN 1. 5 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 5



### KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG

Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330  
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

## PENGUMUMAN

Nomor : 0169/9.7/KS.01/03/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial wajib menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :


Hari/ Tanggal	: Rabu, 5 April 2023
W a k t u	: Pk. 08.00– 11.30 WIB
Materi	: Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana
Narasumber	: Mohd Robi Amri (Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta)
Tempat	: Gedung Auditorium Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 3 Maret 2023



Ketua Prodi  
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

  
Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D

## LAMPIRAN 1. 6 PENGUMUMAN PEMBEKALAN 4



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**  
Jalan Ir. H. Juanda No. 367 Bandung 40135 Telepon (022) 2504838, 2501330  
Faks. 022-2502962, website:www.poltekesos.ac.id, e-mail:humas@poltekesos.ac.id

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 0169/9.7/KS.01/03/2023

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium Mahasiswa Angkatan Tahun 2020 Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Program Sarjana Terapan Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa praktikan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial **wajib** menghadiri kegiatan pembekalan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal	: Jumat, 24 Maret 2023
W a k t u	: Pk. 08.00– 11.30 WIB
Materi	: Peningkatan Kompetensi Analis Penata Lingkungan Sosial Narasumber : Ade Reno, AKS.,MSW (Deputy 1 CEO, Islamic Relief Indonesia))
Tempat	: Gedung Auditorium Poltekesos Bandung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bandung, 20 Maret 2023

Ketua Prodi  
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial



Lima Favourita Sutiaputri, Ph.D

LAMPIRAN I. 7 UNDANGAN SUPERVISI LEMBAGA



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL BANDUNG**

Jl. Ir. Juanda No.167 Bandung 40135 Telp. (022) 2504333, 2504330 Faks. (022) 2502952 <https://www.pks.kemkes.go.id/>

Nomor : 0520/ 9.7/KS.01/03/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Supervisi Lembaga

Bandung, 13 Maret 2023

Kepada:

**Yth. Kepala Desa Soreang**  
**Kecamatan Soreang**  
**Kabupaten Bandung**

di

Soreang

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Supervisi Lembaga pada Praktikum Laboratorium mahasiswa Angkatan 2020 Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dimohon kehadiran Saudara dan perangkat desa Soreang pada pelaksanaan kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/ 16 Maret 2023  
Waktu : Pk. 10.00 – 12.00 WIB  
Acara : Supervisi Lembaga  
Tempat : Kantor Desa Soreang, Kecamatan Soreang

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan perkenannya disampaikan terima kasih.



*LAMPIRAN 1. 8 SUPERVISI DOSEN PEMBIMBING*



*LAMPIRAN 1. 9 SUPERVISI LEMBAGA*





LAMPIRAN 1. 11 LEMBAR EVALUASI PROFIL 1

KUESIONER EVALUASI

“Pendampingan Masyarakat Fakir Miskin dalam Pengajuan Kepesertaan PBI-JK APBD”

Nama :

Alamat :

Keterangan

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Informasi terkait jaminan sosial BPJS Kesehatan dan kepesertaan PBI-JK disampaikan dengan jelas				
2.	Kesadaran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan meningkat setelah dilaksanakan kegiatan				
3.	Kegiatan Sosialisasi tentang program BPJS Kesehatan dan Kepesertaan PBI-JK dikemas secara menarik				
4.	Kegiatan fasilitasi pengajuan kepesertaan PBI-JK bermanfaat bagi Saya				
5.	Saya mengurus kepesertaan PBI-JK setelah dilaksanakan kegiatan ini				

LAMPIRAN 1. 12 LEMBAR EVALUASI PROFIL 2

**KUESIONER EVALUASI**  
**“KPM Disiplin Lapor”**

**Nama :**

**Alamat :**

**Keterangan**

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Materi dalam kegiatan Sosialisasi disampaikan dengan jelas				
2.	Saya menggunakan 50% bantuan PKH untuk kebutuhan makanan balita				
3.	Saya menuliskan pengeluaran dari dana PKH pada laporan keuangan				
4.	Tata cara pengisian laporan pengeluaran dana bantuan PKH disampaikan dengan jelas				
5.	Kesadaran untuk mengikuti Posyandu meningkat				
6.	Kesadaran untuk mengikuti P2K2 meningkat				

LAMPIRAN 1. 13 LEMBAR EVALUASI PROFIL 3

KUESIONER EVALUASI

“Bank Sampah Beriman 3M (Maju Modern Mendunia)”

Nama :

Alamat :

Keterangan

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Materi dalam kegiatan peningkatan kapasitas disampaikan dengan jelas				
2.	Daya beli produk kerajinan sampah meningkat				
3.	Pendapatan penjualan produk kerajinan sampah meningkat				
4.	Partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota bank sampah meningkat				
5.	Bank Sampah Beriman memiliki jadwal kegiatan yang tetap				

LAMPIRAN 1. 14 LEMBAR EVALUASI PROFIL 4

**KUESIONER EVALUASI**

**"Mas Kelik (Masyarakat Kelola Sampah Organik)"**

**Nama :**

**Alamat :**

**Keterangan**

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya memiliki kesadaran untuk mengelola sampah organik				
2.	Saya memahami cara membuat Lubang Cerdas Organik (LCO)				
3.	Saya merawat Lubang Cerdas Organik satu kali dalam seminggu				
4.	Tata cara membuat Lubang Cerdas Organik (LCO) disampaikan dengan jelas				
5.	Saya memahami manfaat dari Lubang Cerdas Organik (LCO)				

LAMPIRAN 1. 15 LEMBAR EVALUASI PROFIL 5

**KUESIONER EVALUASI**  
**“SD Cibiru Tangguh Bencana”**

**Nama** :

**Alamat** :

**Keterangan**

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Materi dalam kegiatan Sosialisasi disampaikan dengan jelas				
2.	Siswa-siswi memahami simbol-simbol bencana				
3.	Siswa-siswi dapat mempraktikkan simulasi bencana Gempa Bumi				

LAMPIRAN 1. 16 LOKAKARYA

